

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Triwulan I - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Padang**

BANK INDONESIA PADANG
SEKSI STATISTIK DAN KAJIAN EKONOMI MONETER
Jl. Jend.Sudirman No. 22 Padang
Telp.0751-31700
Fax. 0751-27313

KATA PENGANTAR

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat ini disusun secara triwulanan sebagai salah satu produk/output Bank Indonesia Padang. Dalam terbitan ini dibahas beberapa materi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam merencanakan dan menerapkan kebijaksanaan moneter.

Cakupan materi dan sistematika pelaporan pada terbitan ini mengacu pada Petunjuk Umum Penelitian dan Pelaporan Ekonomi Regional serta format pelaporan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia. Pada dasarnya yang dibahas adalah materi yang terkait langsung dengan tugas Bank Indonesia antara lain : perkembangan inflasi regional, kondisi ekonomi makro regional, perkembangan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran regional, serta prospek perekonomian daerah. Data yang dianalisis adalah data triwulan I-2006 yang bersumber dari laporan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disampaikan kepada Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Sumatera Barat, dan lain-lain.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya terbitan ini.

Padang, Mei 2006

ttd

C.Y. Boestal
Pemimpin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI	7
1.1. Umum	7
1.2. PDRB Dari Sisi Permintaan	8
1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga/Masyarakat	10
1.2.2. Konsumsi Pemerintah	10
1.2.3. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10
1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi	10
1.2.5. Ekspor - Impor	12
1.3. PDRB Dari Sisi Penawaran	14
1.3.1. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	16
1.3.2. Sektor Industri Pengolahan	17
1.3.3. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran	18
1.3.4. Sektor Pengangkutan & Komunikasi	18
1.3.5. Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	19
1.3.6. Sektor Jasa-jasa	19
1.4. Kondisi Ketenagakerjaan	19
1.5. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah	20
Boks: Kunjungan Kerja Pemimpin Bank Indonesia Padang dan Rombongan ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat	
Boks: RI-Malaysia Tandatangani Kesepakatan Kerjasama Bisnis dan Investasi	
BAB 2 INFLASI	22
2.1. Umum	22
2.2. Perkembangan Inflasi kota Padang dan Kota-kota di Provinsi Tetangga	23
2.3. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa	25
2.4. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar	31
2.5. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah	32
Boks: Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Laju Inflasi Daerah	

BAB 3 PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	34
3.1. Perkembangan Perbankan	34
3.1.1. Perkembangan Bank Umum	35
3.1.1.1. Total Asset	35
3.1.1.2. Penghimpunan Dana	36
3.1.1.3. Penyaluran Kredit	39
3.1.1.4. Perkembangan Kolektibilitas dan Profitabilitas	41
3.1.1.5. Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	43
3.1.2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	44
3.2. Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah	46
3.2.1. Asesmen Korporasi dan Rumah Tangga	46
3.2.1.1. Risiko Kredit Korporasi	46
3.2.1.2. Risiko Kredit Rumah Tangga	47
3.2.2. Asesmen Perbankan	48
3.2.2.1. Risiko Kredit	48
3.2.2.2. Risiko Likuiditas	48
3.2.2.3. Risiko Pasar	49
3.3. Perkembangan Sistem Pembayaran	50
3.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai	50
3.3.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar	50
3.3.1.2. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)	50
3.3.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu	51
3.3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai	51
3.3.2.1. Perkembangan Kliring Lokal	51
3.3.2.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)	52
 Boks: Pertemuan Tahunan Perbankan 2006 Bank Indonesia Padang dengan Mitra Strategis	
 Boks: Forum Komunikasi Lintas Pelaku dalam rangka Menggali dan Mengembangkan Potensi UMKM	
 Boks: Coffee Morning Bank Indonesia dengan BPR se-Sumatera Barat: Evaluasi Perkembangan Kinerja dan Lembaga APEX	
 BAB 4 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	54
4.1. APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2006	54
4.2. Anggaran Pendapatan Daerah	54
4.3. Anggaran Pengeluaran/Belanja Daerah	55
 BAB 5 PROSPEK PEREKONOMIAN	58
5.1. Prospek Ekonomi	58
5.2. Proyeksi Inflasi	59

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1.	Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan 8
Tabel	1.2.	Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan 9
	1.3.	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan 9
Tabel	1.4.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Sumatera Barat 11
Tabel	1.5.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Sumatera Barat . 11
Tabel	1.6.	Realisasi Komoditi Ekspor Non Migas Utama 13
Tabel	1.7.	7 Negara Tujuan Utama Ekspor Non Migas 13
Tabel	1.8.	Realisasi Komoditi Impor Non Migas Utama 14
Tabel	1.9.	7 Negara Utama Asal Impor Non Migas 14
Tabel	1.10.	Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi 15
Tabel	1.11.	Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi 16
Tabel	1.12.	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi 16
Tabel	1.13.	Jumlah Pencarai Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 20
Tabel	2.1.	Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (m-t-m,%) 25
Tabel	2.2.	Perkembangan Inflasi Padang Menurut Kelompok Barang 26
Tabel	2.3.	Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan 26
Tabel	2.4.	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi 27
Tabel	2.5.	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan 28
Tabel	2.6.	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi 29
Tabel	2.7.	Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan 29
Tabel	2.8.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan 30
Tabel	2.9.	Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang 30
Tabel	2.10	Komoditi/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (y-o-y) 31
Tabel	2.11.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (y-o-y) 32
Tabel	3.1.	Komposisi Aktiva Produktif Bank Umum 36

Tabel	3.2.	Perkembangan Dana Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis Simpanan	36
Tabel	3.3.	Struktur Deposito Bank Umum Menurut Jangka Waktu	38
Tabel	3.4.	Struktur Kepemilikan Dana Simpanan Bank Umum	38
Tabel	3.5.	Sebaran DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpun Dana	39
Tabel	3.6.	Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	39
Tabel	3.7.	Sebaran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	41
Tabel	3.8.	Perkembangan Kolektibilitas Kredit/Pembiayaan Bank Umum	41
Tabel	3.9.	Sebaran NPLs Bank Umum per Penggunaan dan Sektoral	42
Tabel	3.10.	Perkembangan Profitabilitas Bank Umum	42
Tabel	3.11.	Distribusi Kredit/Pembiayaan Bank Umum Menurut Baki Debet	43
Tabel	3.12.	Sebaran Kredit dan NPLs UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi	43
Tabel	3.13.	Indikator Perkembangan BPR	45
Tabel	3.14.	Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong	52
Tabel	3.15.	Perkembangan Transaksi BI-RTGS Wilayah KBI Padang	53
Tabel	4.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006	57

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik	1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sumatera Barat 7
Grafik	2.1.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (q-t-q) 22
Grafik	2.2.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (y-o-y) 23
Grafik	2.3.	Perkembangan Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang 24
Grafik	3.1.	Perbandingan Kinerja Perbankan Sumbar dan Nasional Triwulan I -2006 34
Grafik	3.2.	Perkembangan Aktiva Bank Umum 35
Grafik	3.3.	Perkembangan Suku Bunga Simpanan (%) 37
Grafik	3.4.	Perkembangan Suku Bunga Kredit dan SBI 1-bulan (%) 40
Grafik	3.5.	Perkembangan Suku Bunga Kredit dan NPLs di Sumbar, Tw I-04 s.d Tw I-06 49
Grafik	3.6.	Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar 50
Grafik	3.7.	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar 51
Grafik	4.1.	Perkembangan Anggaran Pendapatan 55
Grafik	4.2.	Perkembangan Anggaran Belanja 56
Grafik.	5.1.	Perkembangan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU): Triwulan I-2005 s.d Triwulan I-2006 58
Grafik.	5.2.	Perkembangan Hasil Survei Konsumen: Juli 2005 – Maret 2006 59
Grafik.	5.3.	Pola Inflasi IHK Triwulanan 2001-2005 60

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	1.A.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, Triwulanan 2005-2006
Tabel	1.B.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Triwulanan 2005-2006
Tabel	2.A.	PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, Triwulanan Tahun 2005-2006
Tabel	2.B.	PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Triwulanan Tahun 2005-2006
Tabel	3.	Indeks Harga Konsumen Bulanan Kota Padang (2002=100)
Tabel	4.	IHK Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa (Tahun Dasar 2002)

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN EKONOMI REGIONAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN I - 2006

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh positif, harga-harga mengalami inflasi.

Memasuki tahun 2006, perekonomian Sumatera Barat mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan dari pertumbuhan PDRB triwulan I-2006 yang lebih besar dari pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berasal dari semua sektor ekonomi. Sektor yang tumbuh paling tinggi pada triwulan laporan adalah sektor pertanian, yang berasal dari subsektor perkebunan.

Tingginya inflasi yang dialami kota Padang pada triwulan IV-2005, akibat kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), terkoreksi di triwulan I-2006 hingga mencapai 1,17% (*q-t-q*). Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 11,25% (*q-t-q*).

Kinerja perbankan di Sumbar pada triwulan I-2006 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit mengalami pertumbuhan yang positif. Stabilitas sistem keuangan regional Sumbar selama triwulan laporan secara umum relatif terjaga. Hal ini terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang cukup terkendali, sementara perbankan daerah mampu membukukan kinerja yang positif walupun mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat.

Perkembangan lalu lintas sistem pembayaran regional secara umum memperlihatkan penurunan kegiatan transaksi pembayaran, baik tunai maupun non-tunai.

KONDISI MAKROEKONOMI

Ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 7,37% (y-o-y)

Perekonomian Sumatera Barat Pada triwulan I-2006 mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tampak dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat di triwulan I-2006 yang lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I-2006 tumbuh sebesar 7,37% (*y-o-y*), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2005 yang tumbuh sebesar 6,97% (*y-o-y*).

Dari sisi permintaan, memasuki triwulan I-2006 konsumsi rumah tangga tetap merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pangsa konsumsi rumah tangga mencapai 55,76%, disusul pengeluaran pembentukan modal tetap bruto dengan pangsa sebesar 18,40%, ekspor netto sebesar 12,95% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,95%. Sementara pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya memiliki pangsa sebesar 0,94%.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan positif terjadi pada semua jenis penggunaan.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (*y-o-y*), di triwulan I-2006 konsumsi rumah tangga tumbuh secara signifikan sebesar 7,57%, disusul kemudian pertumbuhan ekspor sebesar 5,68%, konsumsi pemerintah sebesar 5,52%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,23%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 4,93%. Pertumbuhan konsumsi tersebut diperkirakan masih merupakan dampak dari meningkatnya pengeluaran

akibat naiknya harga barang/jasa pasca kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri mulai tahun 2006 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin, memberi tekanan terhadap kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah.

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dengan kontribusi pada triwulan I-2006 sebesar 25,59%. Pangsa tersebut relatif tidak bergeser sejak 5 tahun belakangan. Hal ini berarti struktur perekonomian Sumatera Barat masih sangat tergantung dengan hasil pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan, yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca dan faktor musiman. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi sebesar 17,97%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor jasa-jasa (16,37%), sektor pengangkutan & komunikasi (12,45%), sektor industri pengolahan (13,00%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (5,30%), sektor bangunan/konstruksi (4,96%), sektor pertambangan & penggalian (3,27%), dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 1,09%.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor ekonomi.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (y-o-y), semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2006, dengan pertumbuhan mencapai 9,78%, yang berasal dari pertumbuhan subsektor perkebunan sebesar 17,07%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor industri pengolahan (8,32%), dan berturut-turut pada sektor bangunan/konstruksi (7,35%), sektor listrik, gas & air bersih (6,65%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (6,61%), sektor pertambangan & penggalian (6,58%), sektor jasa-jasa (6,31%), sektor pengangkutan dan komunikasi (6,13%), dan sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 5,65%.

INFLASI

Kota Padang pada triwulan I-2006 inflasi sebesar 1,17% (q-t-q).

Tingginya inflasi yang dialami kota Padang pada triwulan IV-2005, akibat kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), terkoreksi di triwulan I-2006 hingga mencapai 1,17% (q-t-q). Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 11,25% (q-t-q). Begitu pula apabila dibandingkan inflasi nasional triwulan I-2006 yang tercatat sebesar 1,98% (q-t-q), inflasi kota Padang juga masih lebih rendah. Hingga Maret 2005, laju inflasi kota Padang mencapai 1,17% (y-t-d), lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,98% (y-t-d).

Kelompok kesehatan mengalami inflasi tertinggi.

Dilihat dari kelompok Barang dan Jasa, semua kelompok mengalami inflasi pada triwulan I-2006, kecuali kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 5,52% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,16%, disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 5,43% (sumb. inflasi 0,88%). Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok perumahan sebesar 2,29% (sumb. inflasi 0,44%), kelompok sandang sebesar 0,55% (sumb. inflasi 0,04%), kelompok transportasi sebesar 0,48% (sumb. inflasi 0,08%), dan kelompok pendidikan sebesar 0,11% (sumb. inflasi 0,01%). Sementara itu, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar -1,34% dengan sumbangan deflasi sebesar -0,43%.

Beberapa harga komoditi yang masuk dalam kelompok bahan makanan, seperti cabe merah dan bawang merah, mengalami penurunan harga, selain karena permintaan yang kembali normal juga karena *supply* yang cukup di pasaran. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap komoditi ikan tampaknya belum mengalami peningkatan akibat isu formalin

yang pernah merebak di Sumatera Barat, sehingga harga ikan mengalami penurunan. Pada kelompok bahan makanan, hanya subkelompok padi-padian yang mengalami inflasi tinggi, akibat kenaikan harga beras. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari berkurangnya pasokan beras di pasaran Sumatera Barat, terutama kota Padang, akibat cuaca yang kurang baik dan banyaknya pembeli beras dari luar provinsi Sumatera Barat, seperti Pekanbaru dan Jakarta, yang membeli beras dari Sumatera Barat.

Upah minimum provinsi yang naik dari Rp540.000/bulan menjadi Rp650.000/bulan untuk tahun 2006, dan relatif masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan memberikan dampak terhadap biaya operasional rumah sakit, baik tenaga kerja maupun alat medis sehingga memberi tekanan terhadap kelompok kesehatan. Sementara itu, keluarnya pernyataan pemerintah di bulan Februari 2006 yang akan menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 10% per tanggal 1 April 2006, telah direspon pasar dengan menaikkan harga komoditi rokok selama triwulan laporan. Bahkan peningkatan harga rokok putih di pasaran telah mengalami peningkatan sebesar 20%, atau dua kali lebih tinggi dari rencana kenaikan HJE yang memberikan tekanan terhadap kelompok makanan jadi.

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja perbankan Sumatera Barat Tw.I-2006 meningkat.

Sejalan dengan perkembangan kondisi makro ekonomi Sumatera Barat yang kondusif, Indikator-indikator kinerja perbankan Sumbar baik pada bank umum maupun pada BPR menunjukkan perbaikan selama triwulan laporan. Selain itu, kinerja perbankan Sumbar juga relatif lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan nasional. Pertumbuhan yang positif pada total aset, penghimpunan DPK dan penyaluran kredit dialami oleh perbankan di Sumbar sementara secara nasional semua indikator tersebut menunjukkan penurunan. Total aset bank umum mengalami peningkatan sebesar Rp798,7 miliar (6,54%), menjadi Rp13,01 triliun pada triwulan I-2006. Meningkatnya aktiva bank umum, salah satunya merupakan kontribusi dari pertumbuhan kredit serta penempatan pada BI selama triwulan laporan. Dana yang berhasil dihimpun bank umum meningkat sebesar Rp156,4 miliar (1,75%), menjadi Rp9,11 triliun pada triwulan I-2006. Berdasarkan komposisinya, peningkatan DPK tersebut terjadi pada jenis simpanan giro dan deposito yang meningkat masing-masing sebesar 14,01% dan 11,83%. Sementara nominal tabungan mengalami penurunan sebesar 12,55%. Penurunan tabungan bersamaan dengan peningkatan deposito antara lain menunjukkan terjadinya pengalihan simpanan kepada jenis simpanan yang memberikan tingkat pengembalian (return) yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan suku bunga deposito dari 10,08% di triwulan IV-2005 menjadi 10,37% di triwulan I-2006. Sementara itu pada periode yang sama, suku bunga tabungan hanya naik sedikit, dari 4,02% menjadi 4,05%.

Peningkatan DPK yang berhasil dihimpun, berdampak pula terhadap kredit yang disalurkan. Posisi kredit bank umum, baik konvensional maupun syariah di Sumatera Barat, mengalami peningkatan sebesar Rp315,1 miliar (3,31%), menjadi Rp9,83 triliun pada triwulan I-2006. Peningkatan kredit tersebut terjadi pada kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,36% dan 3,14%. Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit tersebut terutama disumbang oleh kredit modal kerja yang meningkat 6,91%, kemudian diikuti oleh kredit konsumsi dan kredit investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 2,20% dan 0,25%. Secara sektoral, peningkatan kredit tertinggi selama triwulan I-2005 dialami oleh sektor industri sebesar 21,81%.

Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK, menyebabkan LDR bank umum mengalami peningkatan 106,2% pada triwulan IV-2005 menjadi 107,9% pada triwulan I-2006. Namun pertumbuhan

kredit tersebut juga diikuti oleh penurunan kualitas kredit seperti ditunjukkan oleh nisbah NPLs, dari 3,73% pada akhir triwulan IV-2005 menjadi 4,0% pada akhir triwulan I-2006. Secara sektoral, nisbah NPLs tertinggi dialami oleh sektor pertambangan (27,47%), diikuti oleh sektor pertanian (10,41%) dan sektor konstruksi (8,46%).

Perkembangan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat pada triwulan laporan juga terus menunjukkan perkembangan yang positif. Posisi kredit UMKM pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp5,8 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp170,8 miliar (3,05%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit bank umum pada triwulan I-2006 mencapai 73,56%, dengan alokasi terbesar diberikan kepada kredit untuk usaha mikro (40,27%).

*Kinerja BPR
Sumbar Tw.I-2004
positif.*

Sama halnya dengan bank umum, indikator-indikator kinerja BPR pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2005, seperti ditunjukkan oleh peningkatan asset (0,13%), DPK (0,1%) dan kredit (5,0%). Dengan laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK maka LDR BPR di Sumbar meningkat, dari 105,53% pada triwulan IV-2005 menjadi 110,70% pada triwulan I-2006. Namun pada saat yang sama, peningkatan kredit tersebut disertai dengan penurunan kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah (NPLs) BPR secara umum mengalami sedikit peningkatan, yakni dari 9,23% menjadi 9,52%.

*Stabilitas
keuangan daerah
relatif terjaga*

Asesmen terhadap keuangan daerah Sumbar menunjukkan stabilitas keuangan daerah relatif terjaga seperti terlihat dari risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang terkendali serta kinerja positif yang dialami perbankan daerah walupun ditengah tekanan risiko kredit yang meningkat.

Melewati situasi yang berat di triwulan IV-2005 akibat kenaikan biaya-biaya produksi sehubungan dengan peningkatan tajam harga BBM, kredit untuk sektor bisnis seperti ditunjukkan oleh kredit modal kerja dan kredit investasi masih tumbuh positif. Sejalan dengan itu, hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) menunjukan situasi bisnis dan kondisi keuangan selama triwulan I-2006 relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV-2005. Dari sisi rumah tangga, penurunan daya beli masyarakat tercermin dari pertumbuhan kredit konsumsi yang relatif rendah. Kondisi ini didukung pula oleh hasil survei konsumen yang menunjukkan keyakinan dan ekspektasi konsumen pada triwulan I-2006 masih negatif (pesimis).

Asesmen terhadap sektor perbankan Sumbar selama triwulan I-2006 menunjukkan masih cukup terjaganya stabilitas perbankan daerah di tengah tekanan laju inflasi yang tinggi serta tren suku bunga yang meningkat. Hal tersebut tercermin dari kemampuan perbankan daerah untuk membukukan kinerja yang positif walaupun mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat sehubungan dengan penurunan kualitas kredit terutama untuk kredit investasi. Risiko likuiditas perbankan Sumbar relatif tinggi sehubungan dengan struktur dana yang cenderung likuid dan bersifat jangka pendek. Sementara itu risiko pasar yang dihadapi perbankan daerah tidak sensitif dengan perkembangan suku bunga kredit.

*Kegiatan di bidang
sistem pemby.
secara umum
menurun.*

Transaksi di bidang sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai pada triwulan laporan secara umum menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari aliran kas keluar dan kas masuk, transaksi kliring dan BI-RTGS.

Aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (inflow) turun sebesar Rp365 miliar menjadi Rp1.958 miliar. Sementara itu, aliran uang kas keluar dari Bank Indonesia Padang (outflow) tercatat sebesar Rp 1.228 miliar atau terjadi penurunan sebesar Rp256 miliar dibanding triwulan sebelumnya.

Dengan demikian, terjadi aliran uang kas masuk bersih (net-inflow) sebesar Rp730 miliar pada triwulan laporan, turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp839 miliar.

Transaksi menggunakan kliring lokal wilayah KBI Padang dalam triwulan laporan mengalami penurunan baik volume maupun nominalnya. Volume kliring turun 4,7% menjadi 158,8 ribu lembar dengan nilai transaksi yang juga menurun 12,6% menjadi Rp3.135,6 miliar. Perkembangan transaksi menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang pada triwulan I-2006 menunjukkan nilai transaksi transfer masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, turun sebesar 10,15% menjadi Rp7.797,5 miliar dengan penurunan volume tranfer 11,74% menjadi 4.954 transaksi. Sementara untuk transfer keluar dari Sumbar, nilai transaksi meningkat sebesar 15,28% menjadi Rp10.369 miliar namun terjadi penurunan volume transaksi sebesar 9,18% menjadi 7.159 transaksi.

PROSPEK PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Tw.II-2006 diperkirakan tetap positif.

Berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran pada triwulan I-2006 serta kondisi makro ekonomi nasional yang cukup kondusif, kegiatan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II-2006 diprediksikan tetap mengalami pertumbuhan positif. Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang menunjukkan ekspektasi peningkatan kegiatan usaha responden. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan diperkirakan terkait dengan peningkatan pengeluaran pemerintah sehubungan dengan telah disahkannya APBD Propinsi Sumatera Barat 2006 pada tanggal 23 Maret 2006. Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti tercermin dari hasil survei konsumen, dibayang-bayangi ekspektasi yang pesimis. Dari sisi investasi, realisasi investasi diharapkan mulai meningkat pada triwulan I-2006 setelah pada triwulan I-2006 tumbuh relatif rendah. Kesuksesan Pemda Sumbar menjadi tuan rumah pertemuan bilateral antara Presiden RI dan PM Malaysia turut memberikan sentimen positif terhadap citra Sumbar di mata investor. Sementara itu dari sisi perdagangan internasional, ekspor Sumbar yang ditopang hasil-hasil perkebunan terutama produk kelapa sawit diperkirakan tetap mengalami peningkatan sejalan dengan permintaan dunia yang cenderung kuat.

Inflasi Tw.II-2006 diperkirakan lebih rendah dibandingkan Tw.I-2006.

Berdasarkan data historis 2001-2005, tingkat inflasi pada triwulan II rata-rata sekitar 1,36% (q-t-q), lebih rendah dibanding rata-rata inflasi triwulan I sebesar 3,72% (Grafik 5.2). Namun demikian apabila pola inflasi triwulanan tersebut mengesampingkan kebijakan kenaikan harga BBM pada triwulan II di tahun 2001 maka rata-rata inflasi triwulan II hanya berkisar 0,60%. Bahkan di tahun 2003 dan 2005, tingkat harga-harga kota Padang mengalami deflasi pada triwulan II. Dengan asumsi pada kondisi triwulan II-2006 akan mengikuti pola triwulanan seperti lima tahun terakhir yaitu memasuki musim panen padi dan dengan keberhasilan panen yang relatif baik serta tidak ada kebijakan pemerintah di bidang harga yang dapat memicu inflasi, laju inflasi triwulan II-2005 diperkirakan sekitar 1%.

**TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
SUMATERA BARAT**

INDIKATOR	2005				2006
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I
MAKRO					
Laju Inflasi (q-t-q)	6.80%	-1.32%	2.75%	11.25%	1.17%
Laju Inflasi (y-o-y)	12.56%	8.35%	11.64%	20.47%	14.13%
IHK Bahan Makanan	12.70%	-5.45%	5.75%	10.43%	-1.34%
IHK Makanan Jadi	4.12%	1.68%	2.61%	5.72%	5.43%
IHK Perumahan	1.12%	0.07%	0.45%	8.22%	2.29%
IHK Sandang	0.90%	0.47%	3.62%	4.23%	0.55%
IHK Pendidikan	0.32%	-0.01%	0.37%	2.30%	0.11%
IHK Kesehatan	0.08%	1.80%	0.92%	8.25%	5.52%
IHK Transport	13.50%	0.59%	0.58%	30.61%	0.48%
Pertumbuhan PDRB (q-t-q) *	1.15%	1.39%	1.98	1.94	1.64
Pertumbuhan PDRB (y-o-y) *	4.99%	5.19%	5.28	6.61	7.37
Ekspor (Ribu USD) **	140,593	172,715	225,139	178,723	134,406
Impor (Ribu USD) **	2,240	-	1,050	-	-
PERBANKAN					
Aktiva (miliar rp)	10,909.90	11,375.30	11,656.80	12,213.07	13,011.75
Deposito (miliar rp)	2,274.85	2,396.05	2,654.26	2,785.10	3,114.56
Giro (miliar rp)	1,573.85	1,836.62	2,060.73	2,265.00	2,582.21
Tabungan (miliar rp)	2,851.97	2,808.52	3,533.88	3,906.10	3,415.94
DPK berdasarkan lokasi kantor penghimpun dana (miliar rp)	7,703.02	8,027.52	8,248.87	8,956.30	9,112.70
Kredit Umum berdasarkan lokasi proyek (miliar rp)	8,776.05	9,124.35	9,286.13	9,515.80	9,830.88
Kredit UMKM (miliar rp)	5,012.76	5,269.86	5,352.86	5,608.23	5,779.05
Suku Bunga Kredit (rerata tertimbang akhir periode)	15.04	14.98	15.32	15.82	16.28
Suku Bunga Deposito 1 bln (rata2 tertimbang akhir periode)	6.13	6.36	7.73	10.08	10.37
NPLs	3.36%	3.39%	4.33%	3.73%	4.00%
NIM	2.69%	4.39%	6.65%	8.74%	2.28%
LDR	89.05%	113.66%	112.57%	106.25%	107.88%
SISTEM PEMBAYARAN					
Cash Inflow (miliar rp)	1,825.50	1,477.04	1,912.46	2,323.11	1,958.38
Cash Outflow (miliar rp)	1,059.50	946.85	1,280.58	1,483.94	1,227.93
PTTB (nominal)	1,140	788	682	668	576
Volume Kliring (lembar)	160,438	161,213	176,707	166,567	158,752
Nominal Kliring (miliar rp)	3,131.90	2,174.00	3,533.41	3,586.50	3,135.61
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah (miliar rp)	93.70	223.44	329.33	448.299	na
Dana Alokasi Umum (miliar rp)	82.50	144.37	206.24	247.49	na
Dana Alokasi Khusus (miliar rp)	-	-	-	-	na
Pengeluaran APBD (miliar rp)	46.18	248.15	468.05	766.42	na

Keterangan :

* Tw.I-2006 angka sangat sementara, mulai Tw.I-2005 digunakan tahun dasar 2000

** Tw.I-2006 angka sementara, *open file data* .

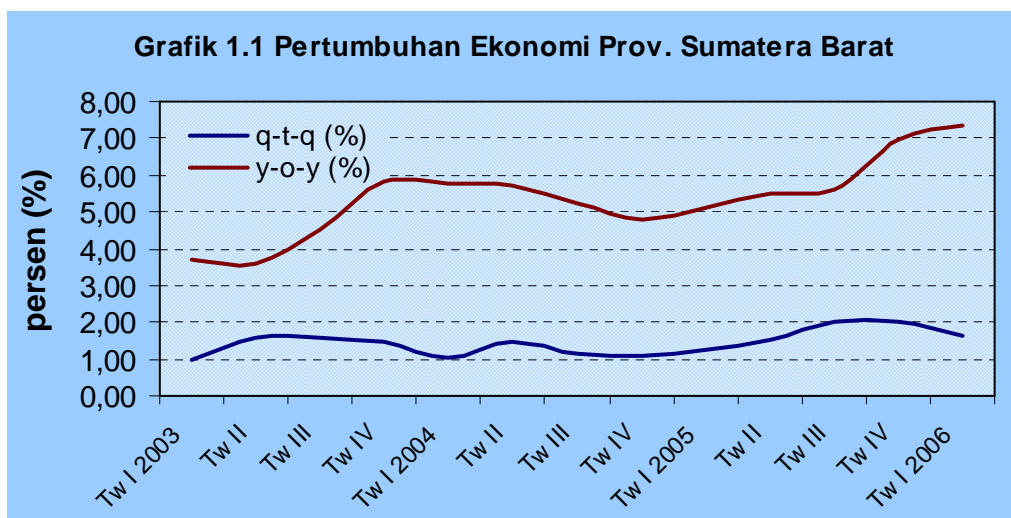
na = data belum tersedia

BAB 1

KONDISI MAKRO EKONOMI SUMATERA BARAT

1.1. Umum

Memasuki awal tahun 2006, perekonomian Sumatera Barat mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di akhir tahun 2005 belum berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian Sumatera Barat. Hal tersebut tampak dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat yang terus meningkat. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I-2006 tumbuh sebesar 7,37% (y-o-y), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2005 yang tumbuh sebesar 6,97% (y-o-y). Namun secara triwulanan, pertumbuhan PDRB pada triwulan I-2006 lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2005, yaitu tumbuh sebesar 1,64% (q-t-q), sementara pada triwulan IV-2005 tumbuh sebesar 1,99% (q-t-q). Seperti halnya ekonomi nasional, konsumsi masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Grafik 1.1).



Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I-2006 terjadi pada semua jenis penggunaan. Walaupun terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, pengeluaran pada konsumsi rumah tangga masih merupakan kontributor terbesar terhadap struktur PDRB Sumatera Barat.

Di sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor ekonomi. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan/konstruksi, merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I-2006. Berdasarkan struktur ekonomi Sumatera Barat, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa masih merupakan sektor yang memiliki pangsa yang cukup besar. Gabungan 4 sektor tersebut pada triwulan I-2006 telah mencapai 72,93% dari total PDRB Sumatera Barat.

1.2. PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, memasuki triwulan I-2006 konsumsi rumah tangga tetap merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pangsa konsumsi rumah tangga mencapai 55,76%, disusul pengeluaran pembentukan modal tetap bruto dengan pangsa sebesar 18,40%, ekspor netto sebesar 12,95% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,95%. Sementara pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya memiliki pangsa sebesar 0,94% (Tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2005**				2005**	2006***
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
A. Makanan	35,95	35,93	36,10	36,28	36,07	36,14
B. Non Makanan	19,42	19,43	19,55	19,67	19,52	19,62
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,96	0,96	0,96	0,95	0,96	0,94
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,10	12,02	11,96	11,89	11,99	11,95
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,68	18,58	18,52	18,46	18,56	18,40
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	12,91	13,08	12,91	12,75	12,91	12,95
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Ket : Mulai triwulan I-2005 digunakan tahun dasar 2000

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sementara, ***angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (*y-o-y*), di triwulan I-2006 pengeluaran konsumsi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,57%, disusul kemudian pertumbuhan ekspor sebesar 5,68%, konsumsi pemerintah sebesar 5,52%, pertumbuhan pada pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,23%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 4,93% (Tabel 1.2). Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan kuartalan (*q-t-q*), di triwulan I-2006 pertumbuhan ekspor sebesar 2,56%, disusul kemudian konsumsi pemerintah

sebesar 2,14%, pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 1,25%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 1,25%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 0,37% (Tabel 1.3).

Tabel 1.2.
Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

(y-o-y, dalam %)

Jenis Penggunaan	2005***				2005***	2006***
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,65	3,67	5,20	5,54	4,28	7,57
A. Makanan	2,58	3,48	5,08	5,37	4,14	7,40
B. Non Makanan	2,76	4,02	5,44	5,86	4,53	7,89
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	(1,86)	(1,12)	(0,94)	4,42	0,10	4,93
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,87	2,94	3,21	4,07	3,28	5,52
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,93	4,99	5,23	6,14	5,33	5,23
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-
6 Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	15,85	12,60	7,24	4,90	9,94	5,68
7 Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	3,74	2,78	2,72	2,42	2,92	1,33
	5,10	5,47	5,58	6,97	5,79	7,37

Ket : Mulai triwulan I-2005 digunakan tahun dasar 2000

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sementara, ***angka sangat sementara

Tabel 1.3.
Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

(q-t-q, dalam %)

Jenis Penggunaan	2005**				2005**	2006***
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(0,66)	1,67	2,18	2,27	4,28	1,25
A. Makanan	(0,69)	1,63	2,14	2,22	4,14	1,22
B. Non Makanan	(0,61)	1,74	2,26	2,37	4,53	1,30
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	(0,12)	1,97	1,27	1,24	0,10	0,37
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,74	1,08	1,07	1,12	3,28	2,14
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,12	1,14	1,33	1,41	5,33	1,25
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-
6 Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	1,81	2,19	0,42	0,41	9,94	2,56
7 Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	1,71	(0,18)	0,65	0,24	2,92	0,63
	1,25	1,55	2,01	1,99	5,79	1,64

Ket : Mulai triwulan I-2005 digunakan tahun dasar 2000

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sementara, ***angka sangat sementara

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga/Masyarakat

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2006 meningkat sebesar 7,57% (y-o-y), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,54% (y-o-y). Dilihat dari komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan, pertumbuhan terjadi pada makanan maupun non makanan masing-masing naik sebesar 7,40% (y-o-y) dan 7,89% (y-o-y). Pertumbuhan konsumsi

makanan maupun non makanan tersebut diperkirakan masih merupakan dampak dari meningkatnya pengeluaran akibat naiknya harga barang/jasa pasca kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Masih kuatnya sektor konsumsi dalam perekonomian Sumatera Barat juga dicerminkan oleh pertumbuhan outstanding kredit konsumsi pada triwulan I-2006, yang tumbuh sebesar 2,20% dari triwulan IV-2005.

1.2.2 Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran/konsumsi pemerintah pada triwulan I-2006 meningkat sebesar 5,52% (*y-o-y*). Peningkatan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 4,07% (*y-o-y*). Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan didorong oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji pegawai negeri mulai awal tahun 2006 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap lanjutan kepada keluarga miskin.

1.2.3 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba mengalami peningkatan pada triwulan laporan yaitu naik sebesar 4,93% (*y-o-y*) pada triwulan I-2006. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2005 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,42% (*y-o-y*).

Meningkatnya konsumsi lembaga swasta nirlaba, yang meliputi output pelayanan jasa sosial kepada masyarakat, masih merupakan rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan dan organisasi dalam rangka memberikan bantuan terhadap beberapa bencana yang terjadi di Sumatera Barat, seperti tanah longsor dan banjir.

1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi

Kegiatan investasi di Sumatera Barat, yang diestimasi dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB), memperlihatkan perlambatan pertumbuhan. Hal ini dicerminkan oleh pertumbuhan PMTB yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Di triwulan I-2006, PMTB tumbuh sebesar 5,23% (*y-o-y*), sementara pada triwulan sebelumnya mencapai 6,14% (*y-o-y*).

Melambatnya pertumbuhan PMTB tersebut diperkirakan akibat tertundanya proyek pembangunan fisik yang didanai APBD, terkait dengan pola anggaran APBD yang baru disetujui pada bulan Maret 2006. Selama APBD belum disetujui

DPRD setempat, maka pengeluaran pemerintah daerah hanya berupa biaya operasional seperti gaji, listrik, telepon dll. Namun demikian, beberapa proyek pembangunan oleh pihak swasta terus berlanjut, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan sektor bangunan pada PDRB Sumatera Barat triwulan I-2006 sebesar 7,35% (y-o-y). Beberapa proyek pembangunan yang terus berjalan, seperti pembangunan Pasar Modern Goan Hoat, Pasar Ganto, dan lain-lain memberikan andil terhadap pertumbuhan PMTB.

Berdasarkan data Badan Koordinasi & Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Prov. Sumatera Barat dan data dari *Website* BKPM, tidak ada realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat selama triwulan I-2006. Sementara itu, persetujuan PMDN pada periode triwulan I-2006 sebesar Rp10 miliar. Adanya investasi PMDN tersebut sebenarnya merupakan realisasi dari persetujuan yang telah diberikan sebelumnya (Tabel 1.4). Sedangkan pada penanaman modal asing (PMA) di Sumatera Barat, persetujuan yang diberikan kepada calon investor asing, selama triwulan I-2006 mencapai USD0,4 juta (Tabel 1.5).

Tabel 1.4 Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Sumatera Barat

Tahun	PERSETUJUAN				REALISASI			
	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja			Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja		
		Indns.	Asing	Jumlah		Indns.	Asing	Jumlah
2004	712.333,44	4.368	13	4.381	631.733,33	300	9	309
2005 :								
Tw. I	368.142,70	768	0	768	2.583,47	276	0	276
Tw. II	144.300,00	na	na	na	190.600,00	na	na	na
Tw. III	na	na	na	na	1.600,00	na	na	na
Tw. IV	na	na	na	na	70.000,00	na	na	na
2006 :								
Tw. I	10.000,00	na	na	na	na	na	na	na

Sumber : *Website* BKPM, na = data tidak tersedia

Tabel 1.5 Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Sumatera Barat

Tahun	PERSETUJUAN				REALISASI			
	Investasi (US\$ 000)	Tenaga Kerja			Investasi (US\$ 000)	Tenaga Kerja		
		Indns.	Asing	Jumlah		Indns.	Asing	Jumlah
2004	18.443,95	1.346	14	1.360	29.532,64	169	16	185
2005 :								
Tw. I	60.964,00	82	0	82	23.578,82	68	6	74
Tw. II	11.500,00	na	na	na	19.000,00	na	na	na
Tw. III	111.600,00	na	na	na	10.300,00	na	na	na
Tw. IV	20.900,00	na	na	na	0,00	na	na	na
2006 :								
Tw. I	400,00	na	na	na	na	na	na	na

Sumber : *Website* BKPM, na = data tidak tersedia

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2006 sebesar 5,7% - 6%. Guna mencapai pertumbuhan tersebut, diperlukan investasi sekitar Rp6,2 triliun. Beberapa langkah yang akan dilakukan pemprov Sumatera Barat untuk mencapai target tersebut diantaranya :

- Melakukan analisis potensi sumber daya guna memetakan peluang dan prioritas investasi di Sumatera Barat.
- Merancang peraturan daerah yang mampu meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan investasi di daerah.
- Memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan perizinan penanaman modal dengan sistem satu atap.
- Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah.

1.2.5 Ekspor – Impor

Kegiatan ekspor barang & jasa pada triwulan I-2006 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tampak dari pertumbuhan ekspor barang & jasa yang tumbuh sebesar 5,68% (*y-o-y*). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 4,90% (*y-o-y*). Tumbuhnya ekspor di triwulan I-2006 tidak diiringi dengan pertumbuhan impor barang & jasa, sehingga berdampak terhadap transaksi berjalan yang positif sebesar 1,33% (*y-o-y*) di triwulan laporan.

Berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai (*data open file*), ekspor Sumatera Barat pada triwulan I-2006 mencapai USD134,41 juta, angka ini lebih rendah apabila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai USD178,72 juta. Sementara itu, di triwulan I-2006 tidak tercatat adanya impor barang/jasa ke Sumatera Barat. Dengan demikian, pada triwulan I-2006 terjadi nilai neraca perdagangan/*trade balance* non migas positif sebesar USD134,41 juta (Tabel 1.6 & Tabel 1.8).

Berdasarkan komoditi ekspor, komoditi minyak dan lemak masih merupakan komoditi yang paling banyak di ekspor dari Sumatera Barat. Di triwulan I-2006, porsi ekspor komoditi minyak dan lemak nabati mencapai 42,69% dari total ekspor Sumatera Barat, disusul kemudian oleh komoditi karet mentah & sintesis sebesar 39,55%, komoditi kopi, teh, coklat & rempah sebesar 3,36%, produk kayu & gabus sebesar 2,63%, komoditi batubara, kokas & briket sebesar 1,95%,

komoditi buah & sayuran sebesar 1,64%, minyak atsiri & wangi-wangian sebesar 0,95%, dan sisanya merupakan gabungan komoditi lainnya (Tabel 1.6).

Apabila dilihat dari negara tujuan ekspor, Singapura merupakan negara tujuan ekspor terbesar dari Sumatera Barat dengan pangsa ekspor sebesar 76,31%, selanjutnya adalah Hongkong yang mencapai 5,46% dari total ekspor Sumatera Barat, Amerika sebesar 3,91%, RRC sebesar 3,16%, Belanda sebesar 1,49%, Malaysia sebesar 1,47%, Jerman sebesar 1,13% dan sisanya ke negara lainnya (Tabel 1.7).

Tabel 1.6
Realisasi Komoditi Ekspor Non Migas Utama

(000' USD)

Akhir Periode	Batubara, Kokas dan Briket	Produk Kayu dan Gabus	Minyak dan Lemak Nabati	Minyak Atsiri dan Wangi-wangian	Kopi, Teh Coklat dan Rempah	Karet Mentah dan Sintetis	Buah dan Sayuran	Lainnya	Total
2004	5.790	12.558	312.293	6.397	26.113	209.447	6.493	20.443	599.534
2005	14.594	43.610	363.670	8.111	29.688	233.353	7.290	16.854	717.170
Tw. I	2.532	3.444	71.266	2.691	7.409	48.451	1.382	3.418	140.593
Porsi (%)	1,80	2,45	50,69	1,91	5,27	34,46	0,98	2,43	100
Tw. II	5.390	4.476	87.647	2.031	8.492	58.310	2.553	3.816	172.715
Porsi (%)	3,12	2,59	50,75	1,18	4,92	33,76	1,48	2,21	100
Tw. III	3.927	32.618	106.068	1.851	7.276	66.425	1.731	5.242	225.139
Porsi (%)	1,74	14,49	47,11	0,82	3,23	29,50	0,77	2,33	100
Tw. IV*	2.745	3.073	98.689	1.537	6.512	60.167	1.624	4.377	178.723
Porsi (%)	1,54	1,72	55,22	0,86	3,64	33,66	0,91	2,45	100
2006									
Tw. I	2.616	3.539	57.373	1.276	4.517	53.153	2.210	9.721	134.406
Porsi (%)	1,95	2,63	42,69	0,95	3,36	39,55	1,64	7,23	100
Pertumb. (%)	(4,67)	15,19	(41,86)	(16,97)	(30,64)	(11,66)	36,11	122,09	(24,80)

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data open file /masih dapat berubah

Tabel 1.7
7 Negara Tujuan Utama Ekspor Non Migas

(000' USD)

Akhir Periode	Amerika	Belanda	Jerman	Hongkong	RRC	Singapura	Malaysia	lainnya	Total
2004	35.283	5.246	6.387	11.239	4.386	498.390	3.443	35.160	599.534
2005	24.583	5.968	6.010	29.976	26.047	554.474	34.062	36.050	717.170
Tw. I	6.568	1.504	1.237	3.659	2.910	114.645	2.101	7.969	140.593
Porsi (%)	4,67	1,07	0,88	2,60	2,07	81,54	1,49	5,67	100
Tw. II	5.522	1.805	2.002	9.425	6.141	135.783	2.187	9.850	172.715
Porsi (%)	3,20	1,05	1,16	5,46	3,56	78,62	1,27	5,70	100
Tw. III	5.387	1.437	1.502	3.651	10.945	164.302	28.016	9.900	225.139
Porsi (%)	2,39	0,64	0,67	1,62	4,86	72,98	12,44	4,40	100
Tw. IV*	7.107	1.222	1.269	13.241	6.051	139.745	1.758	8.330	178.723
Porsi (%)	3,98	0,68	0,71	7,41	3,39	78,19	0,98	4,66	100
2006									
Tw. I	5.251	2.003	1.519	7.338	4.243	102.566	1.976	9.510	134.406
Porsi (%)	3,91	1,49	1,13	5,46	3,16	76,31	1,47	7,08	100
Pertumb. (%)	(26,12)	63,98	19,68	(44,58)	(29,88)	(26,60)	12,36	14,17	(24,80)

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data open file /masih dapat berubah

Sedangkan di sisi impor, terhitung sejak triwulan IV-2005 tidak tercatat adanya impor barang dan jasa ke Sumatera Barat. Tidak adanya impor ke Sumatera Barat diduga karena banyak perusahaan di Sumatera Barat memanfaatkan jasa distributor di provinsi lain, khususnya Jakarta, untuk

memasukkan barang dari luar negeri sehingga tercatat sebagai impor pada daerah tersebut (Tabel 1.8 dan Tabel 1.9).

Tabel 1.8
Realisasi Komoditi Impor Non Migas Utama

(000' USD)

Akhir Periode	Pupuk dan Mineral Alam Lainnya	Pupuk Kimia Buatan Pabrik	Kertas dan Olahannya	Mesin-Mesin	Gandum dan Olahan Gandum	Besi, Baja dan Logam Lainnya	Barang dr Mineral non Logam	lainnya	Total
2004	752	4.971	963	743	-	299	8	120	7.929
2005	313	287	-	266	1.320	2	-	1.102	3.290
Tw. I	313	287	-	266	1.320	2	-	52	2.240
Porsi (%)	13,97	12,81	-	11,88	58,93	0,09	-	2,32	100
Tw. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. III	-	-	-	-	-	-	-	1.050	1.050
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Tw. IV*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data open file / masih dapat berubah

Tabel 1.9
7 Negara Utama Asal Impor Non Migas

(000' USD)

Akhir Periode	Jepang	Singapura	Thailand	USA	Jerman	Inggris	Belanda	lain	Total
2004	174	515	388	-	49	82	-	6.721	7.929
2005	-	134	1.440	-	14	-	-	1.702	3.290
Tw. I	-	134	1.440	-	14	-	-	652	2.240
Porsi (%)	-	5,98	64,29	-	0,63	-	-	29,11	100
Tw. II*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. III	-	-	-	-	-	-	-	1.050	1.050
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100
Tw. IV*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data open file / masih dapat berubah

1.3. PDRB Dari Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dengan kontribusi pada triwulan I-2006 sebesar 25,59%. Pangsa tersebut relatif tidak bergeser sejak 5 tahun belakangan. Hal ini berarti struktur perekonomian Sumatera Barat masih sangat tergantung dengan hasil pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan, yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca dan faktor musiman. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi sebesar 17,97%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor jasa-jasa (16,37%), sektor

pengangkutan & komunikasi (12,45%), sektor industri pengolahan (13,00%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (5,30%), sektor bangunan/konstruksi (4,96%), sektor pertambangan & penggalian (3,27%), dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 1,09% (Tabel 1.10).

Tabel 1.10.
Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

(dalam %)

Sektor Ekonomi	2005**				2005**	2006***
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I
1 Pertanian	25,03	25,19	25,40	25,59	25,30	25,59
2 Pertambangan & Penggalian	3,29	3,29	3,29	3,27	3,29	3,27
3 Industri Pengolahan	12,89	12,88	12,95	13,00	12,93	13,00
4 Listrik, Gas dan Air	1,10	1,10	1,10	1,09	1,10	1,09
5 Bangunan	4,97	4,99	5,03	4,99	4,99	4,96
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	18,26	18,17	18,06	17,96	18,11	17,97
7 Pengangkutan dan Komunikasi	12,59	12,55	12,47	12,48	12,52	12,45
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,34	5,35	5,33	5,32	5,33	5,30
9 Jasa-Jasa	16,53	16,47	16,38	16,30	16,42	16,37
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Ket : Mulai triwulan I-2005 digunakan tahun dasar 2000

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sementara, ***angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (*y-o-y*), semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2006, dengan pertumbuhan mencapai 9,78% (*y-o-y*). Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor industri pengolahan (8,32%), dan berturut-turut pada sektor bangunan/konstruksi (7,35%), sektor listrik, gas & air bersih (6,65%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (6,61%), sektor pertambangan & penggalian (6,58%), sektor jasa-jasa (6,31%), sektor pengangkutan dan komunikasi (6,13%), dan sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 5,65% (Tabel 1.11).

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan kuartalan (*q-t-q*), semua sektor ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2006, dengan pertumbuhan mencapai 2,05%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor listrik, gas & air bersih (1,68%), dan berturut-turut pada sektor perdagangan, hotel & restoran (1,66%), sektor industri pengolahan (1,65%), sektor pertanian (1,64%), sektor pertambangan & penggalian (1,48%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (1,37%), sektor pengangkutan dan komunikasi (1,36%), dan sektor bangunan/konstruksi sebesar 1,20% (Tabel 1.12).

Tabel 1.11.
Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

(y-o-y, dalam %)

Sektor Ekonomi	2005**				2005**	2006***
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1 Pertanian	4,89	4,14	6,68	9,86	8,28	9,78
2 Pertambangan & Penggalian	2,82	2,65	3,20	6,68	4,71	6,58
3 Industri Pengolahan	2,68	3,62	5,75	7,88	4,99	8,32
4 Listrik, Gas dan Air	5,70	7,07	5,44	6,85	-8,88	6,65
5 Bangunan	6,10	4,26	5,90	7,18	5,86	7,35
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	5,72	9,32	5,32	4,99	8,61	5,65
7 Pengangkutan dan Komunikasi	7,55	6,84	5,39	5,54	3,05	6,13
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,69	9,27	6,60	6,69	11,59	6,61
9 Jasa-Jasa	3,31	3,55	4,28	5,28	4,11	6,31
	5,10	5,47	5,58	6,97	5,79	7,37

Ket : Mulai triwulan I-2005 digunakan tahun dasar 2000

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sementara, ***angka sangat sementara

Tabel 1.12.
Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

(q-t-q, dalam %)

Sektor Ekonomi	2005**				2005**	2006***
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1 Pertanian	1,72	2,20	2,87	2,74	8,28	1,64
2 Pertambangan & Penggalian	1,59	1,56	1,91	1,46	4,71	1,48
3 Industri Pengolahan	1,24	1,48	2,56	2,38	4,99	1,65
4 Listrik, Gas dan Air	1,87	1,99	1,30	1,52	-8,88	1,68
5 Bangunan	1,04	2,12	2,66	1,18	5,86	1,20
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	1,03	1,04	1,38	1,45	8,61	1,66
7 Pengangkutan dan Komunikasi	0,80	1,22	1,37	2,03	3,05	1,36
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,45	1,74	1,55	1,79	11,59	1,37
9 Jasa-Jasa	1,05	1,14	1,44	1,54	4,11	2,05
	1,25	1,55	2,01	1,99	5,79	1,64

Ket : Mulai triwulan I-2005 digunakan tahun dasar 2000

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sementara, ***angka sangat sementara

1.3.1 Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan pada triwulan I-2006 mengalami pertumbuhan sebesar 9,78% (y-o-y). Pertumbuhan PDRB sektor pertanian pada triwulan laporan tersebut, sedikit lebih rendah apabila dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2005 yang mencapai 9,86% (y-o-y).

Pertumbuhan pada sektor pertanian di triwulan I-2006, terutama disumbang dari pertumbuhan pada subsektor perkebunan yang meningkat sebesar 17,07% (y-o-y), disusul pertumbuhan pada subsektor peternakan sebesar 9,19%, subsektor

tanaman pangan & hortikultura sebesar 8,49%, subsektor perikanan sebesar 6,05%, dan subsektor kehutanan sebesar 1,90%.

Pertumbuhan pada subsektor perkebunan didorong oleh peningkatan produksi komoditi kelapa sawit, caka, dan karet pada triwulan laporan. Sementara itu, seiring dengan perayaan hari Idul Adha yang jatuh pada bulan Januari, jumlah hewan ternak yang ada di Sumatera Barat mengalami peningkatan. Selain itu, program penggemukan sapi pada beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat, ikut menggerakkan pertumbuhan pada subsektor peternakan.

1.3.2 Sektor Industri Pengolahan

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Oktober 2005, belum berdampak negatif pada sektor industri. Hal tersebut tampak dari perkembangan sektor industri pengolahan di Sumatera Barat, yang keseluruhannya merupakan industri non migas, pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan pada triwulan I-2006 tumbuh sebesar 8,32% (y-o-y). Pertumbuhan pada triwulan laporan tersebut, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV-2005 yang tumbuh sebesar 7,88% (y-o-y).

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan laporan berasal dari pertumbuhan pada semua subsektor industri non migas. Pertumbuhan terutama berasal dari industri semen dan barang non logam sebesar 12,11% (y-o-y), disusul industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,22%, industri tekstil, barang kulit & alas kaki sebesar 7,39%, industri barang kayu & hasil hutan sebesar 5,02%, industri pupuk kimia dan barang dari karet sebesar 4,98%, industri kertas dan barang cetakan sebesar 4,40%, dan industri alat angkutan mesin dan peralatan sebesar 3,15%.

Pertumbuhan yang terjadi terhadap subsektor semen dan barang non logam, terkait dengan produktifitas dan kinerja PT. Semen Padang yang semakin baik. Sementara itu, kenaikan harga BBM telah menaikkan harga beberapa barang dan jasa, termasuk makanan dan minuman yang mendorong pertumbuhan subsektor makanan, minuman & tembakau. Secara umum, pertumbuhan sektor industri pengolahan seiring dengan peningkatan pada outstanding kredit sektor industri pengolahan yang meningkat sebesar 21,81% dari Rp993 miliar pada akhir tahun 2005 menjadi Rp1,21 triliun di triwulan laporan.

1.3.3 Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

Di triwulan I-2006 sektor perdagangan, hotel & restoran mengalami pertumbuhan sebesar 5,65% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 4,99% (y-o-y).

Pertumbuhan yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel & restoran disumbang dari pertumbuhan yang terjadi pada semua subsektornya yaitu subsektor perdagangan besar & eceran, subsektor hotel dan subsektor restoran yang masing-masing tumbuh sebesar 5,67%, 3,01%, dan 5,70%. Bila dikaitkan dengan perkembangan outstanding kredit di Sumatera Barat pada triwulan I-2006, ternyata pertumbuhan PDRB di sektor ini diikuti oleh peningkatan outstanding kredit di sektor perdagangan, hotel & restoran yang meningkat sebesar 3,97% yaitu dari Rp2,08 triliun pada triwulan IV-2005 menjadi Rp2,17 triliun di triwulan I-2006.

Selain itu, kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 diperkirakan belum berdampak terhadap pengurangan konsumsi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan subsektor perdagangan besar & eceran dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga mengalami peningkatan.

1.3.4 Sektor Pengangkutan & Komunikasi

Pada triwulan I-2006, sektor pengangkutan & komunikasi kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,13% (y-o-y). Pertumbuhan pada triwulan laporan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 5,54% (y-o-y).

Pertumbuhan pada triwulan laporan terutama disumbangkan subsektor komunikasi yang tumbuh sebesar 13,65% (y-o-y), sedangkan subsektor angkutan hanya meningkat sebesar 4,44%. Pertumbuhan pada subsektor angkutan terjadi pada kereta api sebesar 14,02%, jalan raya (5,89%), angkutan udara (4,22%), dan jasa penunjang angkutan (3,20%). Sementara itu, angkutan sungai, danau & penyeberangan dan angkutan laut mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -12,13% dan -1,75%.

Bila dikaitkan dengan perkembangan kredit di Sumatera Barat pada triwulan I-2006, ternyata pertumbuhan PDRB di sektor ini diikuti oleh peningkatan *outstanding* kredit di sektor angkutan dan komunikasi yang meningkat sebesar

1,29%, yaitu dari Rp133 miliar pada triwulan IV-2005 menjadi Rp135 miliar di triwulan I-2006.

1.3.5 Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan pada triwulan I-2006 tumbuh sebesar 6,61% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan, sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,69% (y-o-y).

Pertumbuhan sektor keuangan sebagian besar berasal dari pertumbuhan subsektor lembaga keuangan non bank sebesar 7,06% (y-o-y), disusul kemudian subsektor bank sebesar 6,81%, subsektor sewa bangunan sebesar 6,33%, dan subsektor jasa perusahaan sebesar 3,51%. Meningkatnya subsektor keuangan non bank masih merupakan andil dari meningkatnya transaksi pada perum pegadaian dan perusahaan pembiayaan di Sumatera Barat. Sementara itu, kinerja perbankan Sumatera Barat yang relatif cukup baik pada triwulan I-2006, memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan pada subsektor bank. Meningkatnya pertumbuhan pada subsektor sewa bangunan, sebagai dampak dari beroperasinya pusat perbelanjaan, baik pusat perbelanjaan baru maupun lama di Sumatera Barat.

1.3.6 Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan I-2006 tumbuh sebesar 6,31% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,28% (y-o-y). Pertumbuhan pada sektor jasa-jasa sebagian besar berasal dari subsektor swasta yang meningkat sebesar 5,91% (y-o-y), sedangkan subsektor pemerintahan umum & pertahanan tumbuh sebesar 6,50% (y-o-y).

Bila dikaitkan dengan perkembangan kredit di Sumatera Barat pada triwulan I-2006, ternyata pertumbuhan PDRB di sektor ini diikuti oleh peningkatan *outstanding* kredit di sektor jasa-jasa (jasa dunia usaha dan jasa sosial masyarakat) yang meningkat sebesar 8,10%, yaitu dari Rp320 miliar pada triwulan IV-2005 menjadi Rp346 miliar di triwulan I-2006.

1.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja di Sumatera Barat pada periode triwulan I-2006 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Pencari kerja yang terdaftar selama bulan Januari 2006 tercatat sebanyak 2.080

orang, sementara pada periode triwulan IV-2005 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 36.214 orang (Tabel 1.13). Menurunnya jumlah pencari kerja pada triwulan I-2006 dikarenakan masa kelulusan yang telah berakhir dan sebagian besar lulusan SMP/SMA serta universitas/akademi telah terdaftar sebagai pencari kerja pada periode triwulan sebelumnya.

Menurut tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja pada periode triwulan I-2006 terbanyak berpendidikan tingkat SMA/SLTA sebanyak 1.345 orang (64,66% dari total pencari kerja). Hal ini sedikit berbeda dengan komposisi pencari kerja pada triwulan IV-2005 yang mayoritas adalah lulusan Sarjana. Selanjutnya, pencari kerja terbanyak adalah Sarjana/S1 yaitu mencapai 418 orang (20,10%), disusul kemudian tingkat D.I/D.II/D.III sebanyak 276 orang (13,27%), SMP/SLTP sebanyak 35 orang (1,68%), tingkat SD sebanyak 4 orang (0,19%), dan S2/S3 sebanyak 1 orang (0,05%) serta tidak tamat SD sebanyak 1 orang (0,05%).

Tabel 1.13 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Trw III 2005		Trw IV 2005		Trw I 2006 *	
	Jumlah	Share (%)	Jumlah	Share (%)	Jumlah	Share (%)
Tidak Tamat SD	14	0,03	1	0,00	1	0,05
Sekolah Dasar	243	0,57	136	0,38	4	0,19
SMP/SLTP	2.266	5,33	981	2,71	35	1,68
SMA/SLTA	25.586	60,18	15.563	42,98	1.345	64,66
D.I/D.II/D.III	6.131	14,42	3.069	8,47	276	13,27
Sarjana (S1)	8.073	18,99	16.451	45,43	418	20,10
S2/S3	206	0,48	13	0,04	1	0,05
Total	42.519	100	36.214	100	2.080	100

* Data Tw.I-2006 s.d bulan Januari 2006

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Sumbar

1.5. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah

Berdasarkan perkembangan ekonomi Sumatera Barat di triwulan I-2006, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah diantaranya :

- Sektor pertanian yang mendominasi struktur ekonomi Sumatera Barat perlu didukung dengan sektor industri pengolahan, melalui penambahan pabrik pengolahan, agar diperoleh nilai tambah yang lebih tinggi.

- Komoditi hasil perkebunan yang menjadi andalan dan secara konsisten memenuhi pasar ekspor dunia, seperti kelapa sawit, caka, dan karet, agar lebih mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam pengembangannya.
- Mengingat pasar Asia, seperti Singapura dan Malaysia, sangat berpotensi terhadap ekspor hasil komoditi Sumatera Barat, dan jalur ekspor yang relatif lebih dekat apabila melalui Provinsi Riau, maka pembangunan jalan Kelok Sembilan guna memperlancar distribusi barang dan jasa harus segera direalisasikan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

KUNJUNGAN KERJA PEMIMPIN BANK INDONESIA PADANG DAN ROMBONGAN KE KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra strategis Bank Indonesia, dan guna menginventarisasi kendala penyaluran kredit di Kabupaten Solok, Bank Indonesia Padang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2006 melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Dalam kunjungan tersebut, Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Padang didampingi oleh pejabat dan staf Bank Indonesia Padang, diantaranya Kepala Seksi Statistik & Kajian Ekonomi Moneter (SKEM), Kepala Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter (PKM), Staf SKEM, Staf PKM dan juga rombongan BPD Sumatera Barat yang terdiri dari Direktur Kredit, Kepala Cabang Alahan Panjang, dan Kepala Cabang Muara Labuh.

II. PERTEMUAN DENGAN BUPATI SOLOK

Bertempat di ruang kerja Bupati Solok, Bp. H. Gusmal, SE, MM, dilakukan pertemuan dan pembicaraan seputar perkembangan ekonomi Kabupaten Solok dan kinerja perbankan di Kabupaten Solok. Hadir pula dalam pertemuan, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dan Dirut PT. BPR X Koto Singkarak.



Pemimpin Bank Indonesia Padang, Bp. C.Y Boestal, saat berdiskusi dengan Bupati Solok, Bp. H. Gusmal.

Pertemuan diawali dengan sambutan dari Bupati Solok yang menyambut baik adanya kunjungan kerja Bank Indonesia Padang beserta rombongan, dan juga pihak BPD Sumatera Barat ke Kabupaten Solok.

Selanjutnya, beberapa hal yang disampaikan **Bupati Solok** dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Komoditas utama Kabupaten Solok adalah produk sayur mayur, terutama di daerah Alahan Panjang sebagai sentra produksi sayur mayur seperti kol, kentang, tomat dan cabe merah. Produk sayur mayur dari Alahan Panjang ini sebenarnya telah masuk ke pasar Malaysia, namun ekspornya dilakukan melalui pedagang di

Bukittinggi. Selain ke Malaysia, produk sayur mayur dari Alahan Panjang juga menyuplai kebutuhan sayur mayur di Kabupaten Riau.

- Kondisi geografis yang berada di daerah ketinggian, menguntungkan Kabupaten Solok dalam membudidayakan tanaman sayuran yang biasanya akan tumbuh baik di daerah ketinggian. Hal ini merupakan potensi tersendiri bagi Kabupaten Solok yang dapat terus dikembangkan.
- Kabupaten Solok juga terkenal dengan komoditi buah Markisa, hanya saja Markisa tersebut hanya dijual/konsumsi sebagai buah saja dan belum diolah sedemikian rupa sehingga meningkatkan nilai jualnya.
- Di Kabupaten Solok juga terdapat sentra produksi gula enau. Gula enau merupakan gula merah yang berasal dari sari pohon Aren/Nira. Gula jenis ini telah masuk di hotel-hotel sebagai pengiring gula pasir putih yang sudah ada sebelumnya.
- Selain pertanian, terdapat pula potensi ternak sapi di daerah Talang Bungo yang layak untuk dibiayai.
- Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Solok, Pemda Kabupaten Solok berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana, sementara perbankan semestinya berperan sebagai lembaga penyedia dana.
- Saat ini ada hal yang belum terselesaikan antara Pemda Kabupaten Solok dengan perbankan dalam hal pembiayaan. Perbankan lebih suka dan cenderung membiayai usaha yang telah berjalan dan *bankable*, sementara Pemda ingin agar usaha yang belum *bankable* juga bisa dibiayai guna pemerataan pembiayaan.
- Jalan keluar yang pernah ditawarkan oleh pihak bank yaitu agar pemerintah daerah Kabupaten Solok membiayai terlebih dahulu usaha yang belum bankable dan baru berjalan, setelah berkembang dengan baik baru diberikan kepada bank untuk pembiayaan usaha berikutnya.
- Tentunya hal ini tidak semudah dibayangkan. Selain dana, biasanya usaha mikro dan kecil membutuhkan pula adanya bimbingan, baik dalam hal teknis maupun administratif berupa penatausahaan *cashflow*/pembukuan guna melihat perkembangan usaha dari segi keuangan.
- Saat ini, pada pasar-pasar tradisional di Kabupaten Solok terkadang sering muncul kredit dengan istilah kredit 649, yaitu pinjaman kredit sebanyak 6 namun kredit yang diterima hanya 4, sementara kredit harus dilunasi sebesar 9. Ini tentunya menjadi beban bagi pedagang

mikro seperti pedagang sayuran, pedagang telur, pedagang buah-buahan dan lain sebagainya.

- Guna mengantisipasi perkembangan kredit 649 tersebut dan guna memberikan bantuan modal bagi usaha mikro & kecil, peran bank sangat dibutuhkan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Solok berencana untuk mendirikan BPR di wilayah kerjanya guna membantu usaha mikro & kecil memperoleh modal/kredit.

Selanjutnya **PBI Padang** mengemukakan beberapa hal, diantaranya :

- Perkembangan perbankan di Kabupaten Solok di tahun 2005 relatif masih cukup baik. Adanya dropping kredit untuk proyek listrik di Kabupaten Solok sangat mendongkrak penyaluran kredit di Kabupaten Solok. Total outstanding kredit di Kabupaten Solok pada akhir tahun 2005 mencapai Rp1,62 triliun atau meningkat 473% dari tahun 2004, dengan LDR sebesar 1.306%.
- Sementara apabila kredit di sektor listrik, gas & air dikeluarkan, maka outstanding kredit bank umum di Kabupaten Solok sebesar Rp310 miliar atau meningkat 9,43% dari tahun 2004, dengan LDR sebesar 250%.
- Hanya saja dana pihak ketiga bank umum di Kabupaten Solok mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 14% menjadi Rp124 miliar. Penurunan tersebut berasal dari jenis simpanan giro yang turun sebesar 70% dan deposito sebesar 35%. Penurunan ini apabila berlangsung terus menerus tentu akan mengganggu kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.
- Pemerintah daerah Kabupaten Solok, dalam hal ini mungkin sebagai pemilik mayoritas giro di bank umum di Kabupaten Solok, tentunya bisa menjaga posisi gironya di bank umum, kecuali adanya kebutuhan pembangunan/ proyek daerah yang membutuhkan dana besar dan segera.
- Dilihat dari PDRB Kabupaten Solok yang didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hendaknya BPD Sumatera Barat, sebagai bank milik daerah, meningkatkan kreditnya di kedua sektor tersebut yang telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan daerah. Saat ini kredit BPD Sumatera Barat yang disalurkan di Kabupaten Solok masih dinilai belum memadai.
- Bank Indonesia membuka pintu dan akan membantu apabila pemerintah daerah Kabupaten Solok akan melakukan penelitian

mengenai komoditi unggulan di daerah Kabupaten Solok. Bantuan yang diberikan bisa berupa dana penelitian maupun tenaga konsultan PUKM.

- Saat ini Bank Indonesia Padang dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Satgas tersebut bertugas untuk merekrut dan memberikan pelatihan kepada BDSP dalam rangka menjembatani dan mendampingi usaha mikro & kecil yang berpotensi namun belum *bankable* hingga dibiayai oleh bank.
- KKMB ini dapat dimanfaatkan di Kabupaten Solok guna meneliti dan menginventarisir usaha yang belum *bankable* dan menghubungkannya dengan bank. Bank Indonesia akan berusaha untuk memfasilitasinya apabila diperlukan dan diminta oleh pemerintah Kabupaten Solok.
- Mengenai kerjasama pemerintah daerah dengan bank dalam membiayai usaha mikro & kecil, mungkin Kabupaten Solok dapat mencontoh pemerintah kota Sawahlunto yang telah menjalin kerjasama dengan BPD Sumatera Barat, dimana porsi pembiayaan untuk usaha mikro & kecil adalah 40% dana pemerintah kota Sawahlunto dan 60% dana BPD Sumatera Barat. Sementara itu, bantuan teknis kepada usaha mikro & kecil diberikan oleh *Business Development Center* (BDC) kota Sawahlunto, sehingga usaha mikro & kecil tidak hanya diberikan dana namun juga bantuan teknis yang dapat berupa bimbingan manajemen, pembukuan/administrasi hingga perluasan pasar.
- Terobosan lain yang juga pernah dilakukan guna pembiayaan usaha mikro & kecil yaitu dengan menjaminkan hewan ternak, seperti sapi dan kerbau, kepada bank. Hal ini pernah dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan peraturan daerah agar hewan ternak diberikan sejenis sertifikat kepemilikan, dimana sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan bank.
- Pemda Kabupaten Solok juga dapat menjadikan BPD Sumatera Barat di wilayahnya sebagai konsultan atau ahli di bidang perkreditan dan pembiayaan, sehingga terhadap suatu permasalahan pembiayaan dapat dicarikan jalan keluarnya bersama BPD.
- Mengenai pendirian BPR baru untuk pengembangan usaha mikro & kecil di Kabupaten Solok, Bank Indonesia menyarankan beberapa alternatif : (1) agar pemerintah daerah memaksimalkan BPR-BPR yang telah ada di Kabupaten Solok dengan menambah modalnya. Dengan

permodalan yang kuat/besar selanjutnya BPR-BPR tersebut dapat membuka cabang di daerah-daerah yang menurut pemda perlu dibuka; (2) mengambil alih BPR-BPR yang kondisinya tidak sehat atau kurang sehat.

- Kedua alternatif tersebut diatas, relatif lebih mudah/cepat prosesnya dibandingkan mendirikan BPR baru. Apabila diinginkan, pemda dapat mengganti nama atau memindahkan lokasi BPR dengan terlebih dahulu meminta izin Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dalam waktu dekat ini akan mengadakan Forum Komunikasi KKMB yang akan dihadiri oleh para Bupati dan Walikota, BDSP, perbankan dan dinas/instansi terkait. Pertemuan direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung.

Atas informasi dan input dari Bank Indonesia Padang, Bupati Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pada akhir tahun 2005, giro pemda Kabupaten Solok yang ada di BPD Sumatera Barat memang berkurang, yang disebabkan karena adanya penarikan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok.
- Kredit yang diberikan BPD Sumatera Barat kepada pegawai di lingkungan pemda Kabupaten Solok memang memberikan manfaat dan cukup membantu bagi pegawai yang bersangkutan. Hanya saja seringkali pegawai negeri, terutama guru, ke bank guna mengurus dan membayar cicilan kreditnya dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja dari pegawai yang bersangkutan.
- Untuk itu, pemda Kabupaten Solok mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberikan izin meminjam bank kepada pegawai negeri yang baru diangkat di lingkungan pemda Kabupaten Solok.
- Mengenai rencana Forum Komunikasi KKMB, Pemda Kabupaten Solok menawarkan diri sebagai tempat berlangsungnya pertemuan KKMB. Namun apabila lokasi sudah ditetapkan di Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, pemda Kabupaten Solok menawarkan untuk pertemuan KKMB berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut, **BPD Sumatera Barat** menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- BPD Sumatera Barat saat ini sedang merencanakan untuk menambah jaringan bank di Kabupaten Solok. Penambahan tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan BPD

Sumatera Barat bagi nasabahnya khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Solok pada umumnya.

- Pada posisi Desember 2005, kantor cabang BPD Sumatera barat yang berlokasi di Kabupaten Solok, telah menyalurkan kredit sebesar Rp68 miliar yang tersebar pada 4 sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor angkutan dan sektor lainnya.
- Mengenai turunnya dana pihak ketiga (DPK) BPD Sumatera Barat, khususnya jenis simpanan giro, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2006. Dari APBD Kabupaten Solok tahun 2006 sebesar Rp362 miliar, sekitar Rp2 miliar akan ditempatkan di BPD Sumatera Barat. Hal ini tentunya akan memberikan kekuatan baru bagi BPD Sumatera Barat untuk menyalurkan kreditnya.
- Adanya Divisi Micro Banking di BPD Sumatera Barat merupakan salah satu langkah BPD Sumatera Barat dalam partisipasinya memperhatikan dan ikut mengembangkan usaha mikro & kecil di Sumatera Barat.
- Selain itu, BPD Sumatera Barat juga memiliki skim kredit KUKI atau Kredit Usaha Kecil Informal, yang sangat cocok bagi usaha mikro. Jenis kredit ini ditujukan bagi usaha mikro perorangan, anggota koperasi, anggota binaan BDS dan kelompok usaha yang bergerak pada semua sektor ekonomi, baik untuk modal kerja maupun investasi.



Diskusi kinerja perbankan dan perekonomian Kabupaten Solok berlangsung dalam suasana yang santai dan penuh keakraban.



Dalam kunjungan kerja, baik Bank Indonesia Padang maupun BPD Sumatera Barat, mengikutsertakan Pejabat & Staf terkait.

Pemerintah Indonesia-Malaysia sepakat melakukan kerjasama bidang bisnis dan investasi meliputi sektor infrastruktur, perkebunan, pabrik pengolahan kelapa sawit, minyak dan gas serta sektor energi. Penandatanganan kesepakatan kerjasama dilakukan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Tahunan antara Indonesia-Malaysia di Bukit Tinggi, Kamis (12/01), yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Datok Sri Abdullah Ahmad Badawi dan sejumlah menteri kedua negara.

Kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua Malaysia-Indonesia Bisnis Council (MIBC), Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dan Ketua Indonesia-Malaysia Bisnis Council (IMBC), Tanri Abeng. Menurut Tanri Abeng, secara umum tujuan untuk melanjutkan kerjasama investasi bisnis termasuk perdagangan merupakan hal yang penting yang akan dilakukan pelaku ekonomi dua negara. Dengan demikian, para anggota yang tergabung dalam MIBC maupun IMBC dapat memfokuskan sektor mana saja yang bisa dikembangkan bersama.

Sementara itu, dalam sambutannya, Seri Ahmad Sarji, mengatakan lima perusahaan Malaysia telah mengikuti enam tender jalan tol yang nilai totalnya US\$1,345 miliar. Selain itu, satu perusahaan Malaysia telah membeli tanah seluas 10.000 hektare di Sei Mawang dan 20.000 hektare di Sekadau, propinsi Kalimantan Barat. "Kajiannya sedang dilakukan oleh perusahaan perkebunan Malaysia dengan perusahaan Indonesia dengan *joint venture* dan plasma di Kalimantan," kata Seri Ahmad Sarji.

Program kerjasama lainnya adalah proyek pembangunan pabrik minyak sawit di Ketapang dan Sanggau, Kalimantan Barat senilai 30 juta Ringgit Malaysia yang sedang dirundingkan. Di sektor minyak dan gas, satu perusahaan Malaysia akan membangun pipa gas dari Kalimantan Timur ke Pulau Jawa sepanjang 1.700 kilometer. Perusahaan lainnya, PECD Berhard, pada kesempatan itu, langsung melakukan penandatanganan kontrak pembangunan pipa gas dari Sumatera ke Pulau Jawa sepanjang 165 kilo meter senilai US\$140 juta. Sedangkan pada sektor tenaga kerja, lanjut dia, perusahaan Malaysia telah membuat penawaran untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Cirebon, Jawa Barat senilai US\$600 juta dan sedang menjajaki kerjasama dengan PT. PLN untuk pembinaan 2x100 Mega Watt Mine-Mouth Coal Fired Plant (Pembangkit listrik tenaga uap batubara mulut tambang) di Sumatera Selatan senilai US\$200 juta.

Kerjasama juga sedang dijajaki untuk pembinaan sebuah Coal Fired Power Plant with Steam (Pembangkit listrik tenaga batu bara dan uap) di Merak senilai 30 juta Dolar AS.

Di sektor pelabuhan perusahaan Malaysia akan berinvestasi membangun pelabuhan kecil untuk ekspor minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat senilai 5 juta Ringgit Malaysia.

(Sumber : Kapanlagi.Com).

Sumbar Dapat Rahmat Setelah Suksesnya Pertemuan Bilateral Indonesia-Malaysia

Sukses penyelenggaraan Pertemuan Bilateral Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi di Kota Bukittinggi, seolah membawa rahmat bagi Sumatera Barat. Hal itu, setidaknya terungkap dari apresiasi luar biasa disampaikan Presiden SBY, bahwa pihaknya akan memberikan perhatian besar bagi peningkatan pembangunan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. "Saya minta Gubernur Sumbar dengan tokoh-tokoh masyarakatnya tiga bulan ke depan, dapat mempresentasikan kepada saya di Jakarta, berbagai program pembangunan dan program pengembangan investasi yang telah dirancang bersama masyarakat, baik dalam konteks regional maupun nasional.

Insya Allah saya akan bantu mengkomunikasikan dengan semua pihak, khususnya para kepala negara di dunia agar mereka dapat memberikan perhatian dan bantuan lebih luas untuk Sumatera Barat," ujar presiden SBY dihadapan Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi serta pengurus PWI Sumbar, pada acara silaturahmi yang dipandu Pemimpin Umum Singgalang Basril Djabar di ruang pertemuan Istana Negara Triarga, Bukittinggi, Jumat (13/1) sore, kemarin.

Di mata SBY, Sumatera Barat adalah inspirasi Indonesia. Banyak putra-putri Ranah Minang telah mengisi pusat keunggulan di negeri ini. Sederet nama seperti Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, Natsir, HAMKA serta sejumlah nama lain, termasuk para sastrawan terkenal, di antaranya Ismail Marzuki ataupun Taufiq Ismail, yang lahir di Sumatera Barat, sumbangsihnya telah terukir dalam perjalanan sejarah bangsa.

"Inilah antara lain, yang mendorong saya memberikan perhatian khusus mengapa penyelenggaraan pertemuan Bilateral Indonesia-Malaysia di Bukittinggi. Bahwa, negara ini telah "berhutang" kepada masyarakat Sumatera Barat yang telah menyumbangkan putra-putri terbaiknya selama

ini. Dan, kini saatnya potensi-potensi Sumatera Barat bangkit dan berkembang lebih pesat lagi di segala bidang, baik dalam konteks pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, maupun investasi mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat. Tanpa basa-basi, dihadapan Gubernur Gamawan dan Wakil Ketua DPD-RI Irman Gusman yang hadir, dan berperan mewadahi dialog dan silaturahmi itu, Presiden SBY menyatakan optimisnya Sumatera Barat akan gemilang beberapa tahun ke depan.

"Gubernurnya cerdas, cekatan dan jago memenej dalam mengatasi persoalan. Saya sudah buktikan ketika musibah meletusnya Gunung Talang. Apa yang dilakukan Gubernur Gamawan, ketika masih menjabat Bupati Solok itu, saya jadikan model di tingkat nasional," tegas SBY dalam dialog yang berjalan sangat akrab dan komunikatif itu. Dalam catatan SBY, Sumatera Barat memiliki sejumlah potensi dengan keunggulan komparatif.

Dimulai dari kehidupan beragamanya yang kuat, adat istiadatnya yang spesifik, ini bergandeng dengan keramah-tamahan masyarakat. Begitu juga keindahan alamnya, seperti pantai, danau dan gunung. Selanjutnya, industri rumah tangga, baik handicraf, songket dan sejenisnya yang berkualitas tinggi. "Saya dengar para tamu dari Malaysia dan Jakarta memborong habis produk *home industry* masyarakat Minang itu. Termasuk istri saya juga membelinya, dan saya lihat kualitasnya bagus. Saatnya Sumatera Barat membangun pusat kegiatan wisatawan yang betul-betul lengkap, dengan Rumah Gadang sebagai representasinya. Sebab, makin banyak turis yang datang, itu pertanda perekonomian yang menyentuh rakyat kecil semakin menggeliat. Bangunlah masa depan Sumbar dengan mengundang orang datang berkunjung ke daerah ini," tutur SBY.

Ia menyebutkan pula, keinginan untuk datang ke Bukittinggi sudah sejak lama. "Sejak masih menjabat Pangdam Sriwijaya kerinduan itu. Namun, hari ini baru kesampaian, dan saya betul-betul menikmatinya. Bahkan, sampai empat hari, dan saya juga dapat bertemu dengan masyarakatnya yang ramah dan taat beragama di masjid dan di pasar," imbuh SBY.

Dalam perspektif lain, Presiden juga memahami spirit otonomi yang kini mekar di provinsi, kabupaten dan kota. Terhadap daerah yang memiliki kreativitas, inovasi untuk bekerjasama dengan luar negeri peluang dibuka seluas-luasnya. Seandainya ada pihak-pihak yang mempersulit, misalnya jajaran kabinet, beri tahu presiden, atau paling tidak kirim tembusan.

Saya akan disposisi ke menteri yang bersangkutan agar dibantu dan dituntaskan. Begitupun terhadap aturan yang menghambat di pusat, kita akan segera ubah. Pokoknya, demi kepentingan rakyat, peraturan apapun bisa diubah, bahkan diganti," janji Presiden SBY.

Beberapa penekanan lain dalam kepemimpinannya agar Indonesia selamat, SBY menyebut bahwa daya saing harus tumbuh di negeri ini. Untuk itu, pertama, diperlukan pendidikan yang tepat dan benar. Kedua, membangun tata pemerintahan yang bersih. Keduanya, merupakan kebutuhan kembar. Selanjutnya digarisbawahi pula, bahwa lingkaran pembangunan yang baik, efisien, responsif dan bertanggung jawab.

Menyangkut korupsi, secara tegas SBY menyatakan tidak bisa main-main. Karena korupsi merupakan penghancur semua dimensi kemanusiaan. Dalam pengumuman Transparansi Internasional akhir tahun 2005, dari survei yang dilakukan pada 64 negara, tercatat 6 negara yang berkurang kejahatan korupsi, satu di antaranya Indonesia. Ini jelas sesuatu yang membanggakan dikaitkan dengan perkembangan corruption index.

"Setiap tahun tercatat 65 pejabat negara yang kita keluarkan izin karena terlibat korupsi, termasuk sejumlah anggota DPRD. Bagi saya yang salah harus menerima sanksi, yang sudah terbukti harus menerima hukuman, namun yang tidak bersalah wajib direhabilitasi nama baiknya. Ini, menurut saya yang adil," tegas SBY yang didampingi jubiir kepresidenan Andi Mallarangeng dan staf khusus, Kurdi.

(Sumber : Harian Padang Ekspres, tgl. 14 Januari 2006)

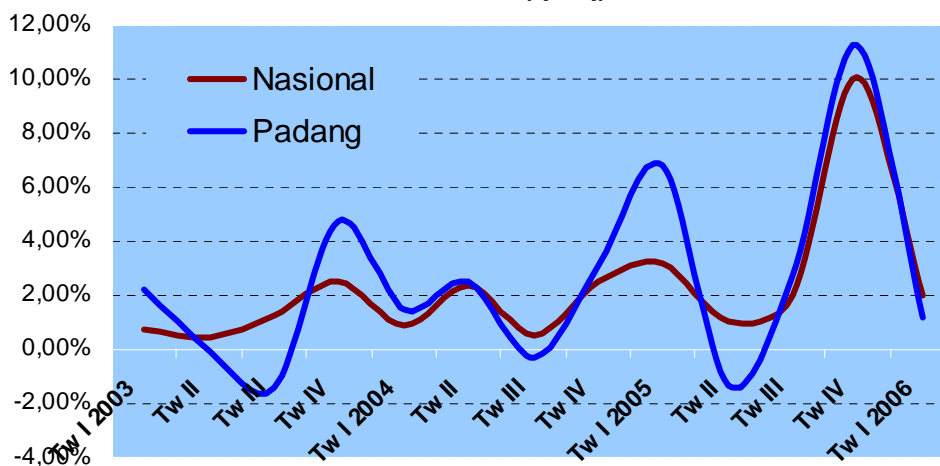
BAB 2

INFLASI

2.1. Umum

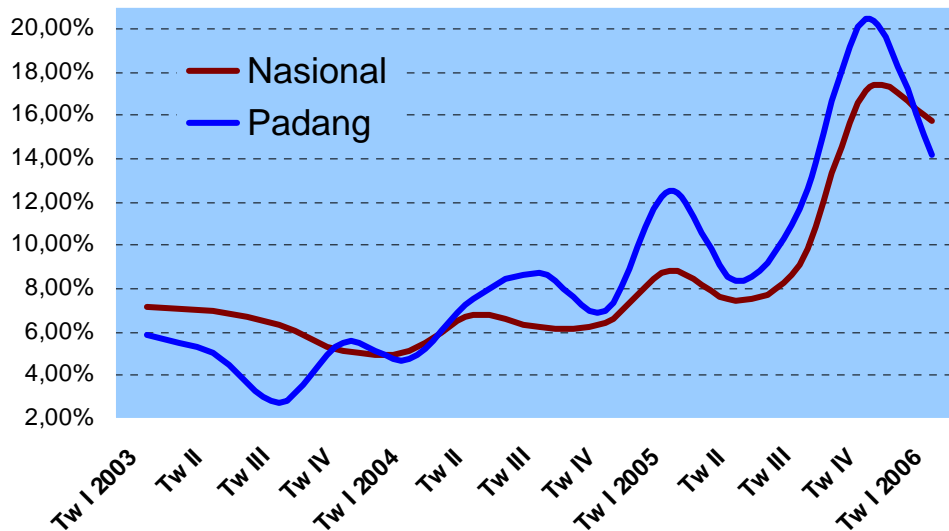
Tingginya inflasi yang dialami kota Padang pada triwulan IV-2005, akibat kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), terkoreksi di triwulan I-2006 hingga mencapai 1,17% ($q-t-q$). Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 11,25% ($q-t-q$). Begitu pula apabila dibandingkan inflasi nasional triwulan I-2006 yang tercatat sebesar 1,98% ($q-t-q$), inflasi kota Padang juga masih lebih rendah. Hingga Maret 2005, laju inflasi kota Padang mencapai 1,17% ($y-t-d$), lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,98% ($y-t-d$) (Grafik 2.1).

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional ($q-t-q$)



Sementara itu, perkembangan harga secara tahunan di kota Padang, pada triwulan I-2006 mengalami inflasi sebesar 14,13% ($y-o-y$). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,47% ($y-o-y$). Dibandingkan inflasi tahunan nasional triwulan I-2006 yang tercatat sebesar 15,74% ($y-o-y$), inflasi tahunan kota Padang masih lebih rendah. Apabila diperhatikan, sejak triwulan II-2004, baru di triwulan laporan inflasi tahunan kota Padang berada dibawah inflasi tahunan nasional (Grafik 2.2).

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (y-o-y)



Faktor utama lonjakan inflasi yang terjadi di kota Padang didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok makanan jadi, yang mengalami inflasi sebesar 5,43% pada triwulan I-2006. Selain itu, kelompok kesehatan yang pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 2,30%, di triwulan laporan kembali mengalami tekanan hingga mencapai 5,52%. Selanjutnya, kelompok perumahan juga ikut memberikan tekanan yang cukup berarti terhadap pergerakan indeks secara umum.

2.2. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota di Provinsi Tetangga

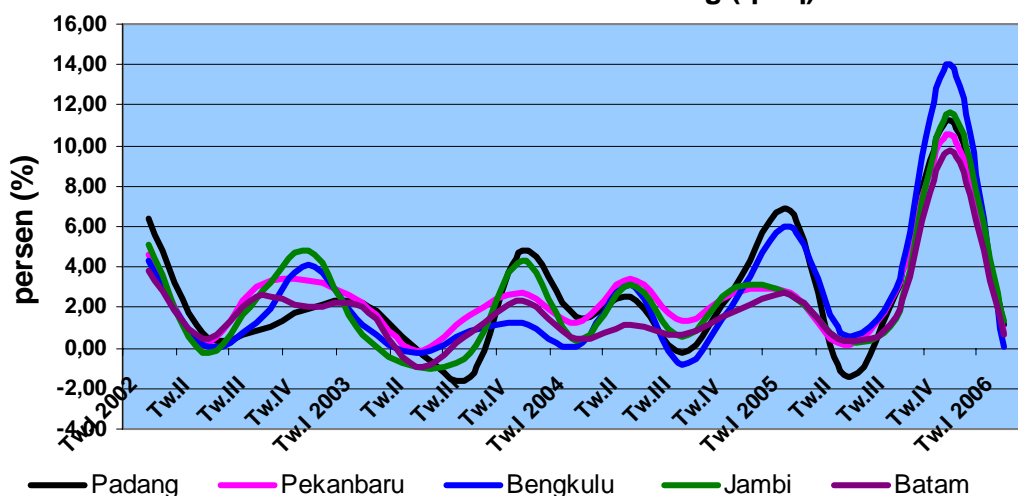
Setelah mengalami inflasi yang cukup tinggi di triwulan IV-2005, Kota Padang kembali mengalami inflasi pada periode triwulan I-2006, walaupun dengan tekanan yang relatif lebih rendah. Di triwulan I-2006 ini kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,17%, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2005 yang mengalami inflasi sebesar 11,25%. Dalam periode triwulan I-2006, kota Padang mengalami deflasi pada bulan Januari 2006 sebesar -0,91%. Sedangkan pada bulan Februari dan Maret 2006 masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,02% dan 1,07%. Pergerakan inflasi kota Padang tersebut, sangat dipengaruhi oleh pergerakan indeks pada kelompok barang yang diatur pemerintah seperti bahan bakar minyak (BBM).

Dibandingkan dengan inflasi nasional, pergerakan inflasi yang terjadi di kota Padang searah dengan pergerakan inflasi nasional yang diukur di 45 kota di

Indonesia, hanya saja inflasi kota Padang bergerak lebih fluktuatif dibandingkan inflasi nasional. Pada triwulan I-2006 inflasi nasional sebesar 1,98% ($q-t-q$) atau lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 10,08% ($q-t-q$). Seperti halnya di daerah, tekanan inflasi nasional pada triwulan I-2006 terutama juga dikarenakan inflasi yang terjadi pada kelompok makanan jadi.

Dibandingkan dengan kota-kota di provinsi tetangga seperti Pekanbaru, Bengkulu, Bengkulu, Jambi dan Batam, bila dilihat dari arah pergerakannya, perkembangan inflasi kota Padang memiliki arah pergerakan yang sama dengan inflasi pada kota-kota tersebut. Pada periode laporan, umumnya kota-kota di provinsi tetangga secara triwulanan ($q-t-q$) juga mengalami penurunan angka inflasi, diantaranya Pekanbaru dari 10,59% pada triwulan IV-2005 menjadi 0,73% pada triwulan I-2006, Batam dari 9,72% pada triwulan IV-2005 menjadi 0,66% pada triwulan I-2006, kemudian Bengkulu dari 14,06% pada triwulan IV-2005 menjadi 0,10% pada triwulan I-2006, dan Jambi dari 11,60% pada triwulan IV-2005 menjadi 1,38% pada triwulan I-2006. Peningkatan angka inflasi pada kota-kota tersebut masih disebabkan meningkatnya harga BBM (Grafik 2.3).

Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi KBI Padang & KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang ($q-t-q$)



Dilihat dari inflasi bulanan ($m-t-m$), pada bulan Januari 2006 inflasi tertinggi terjadi di kota Batam sebesar 1,32% sedangkan yang terendah di Padang yang mengalami deflasi sebesar -0,91%. Pada bulan Februari 2006, inflasi tertinggi terjadi di kota Padang sebesar 1,02% dan terendah di kota Bengkulu sebesar -0,70%. Di bulan Maret 2006, inflasi tertinggi terjadi di kota Padang sebesar 1,07% dan terendah di kota Batam sebesar -0,75% (Tabel 2.1).

Tabel. 2.1 Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (m-t-m, %)

Periode	Nasional	Kota				
		Padang	Pekanbaru	Bengkulu	Jambi	Batam
2005						
Jan	1,43	2,37	1,34	3,62	2,49	1,64
Feb	-0,17	-0,01	-0,02	-0,42	-1,38	-0,68
Mar	1,91	4,33	1,41	2,70	1,5	1,69
Apr	0,34	-0,14	0,50	-0,16	0,10	0,17
Mei	0,21	-0,85	-0,75	-0,41	0,05	-0,23
Jun	0,50	-0,33	0,44	1,21	0,20	0,45
Jul	0,78	1,12	1,37	1,47	1,53	0,64
Agt	0,55	0,41	1,15	0,93	-0,27	0,86
Sept	0,69	1,20	0,32	0,51	0,15	0,02
Okt	8,70	10,74	8,73	12,50	10,47	7,95
Nov	1,31	2,11	2,47	2,24	1,74	1,95
Des	-0,04	-1,62	-0,74	-0,85	-0,70	-0,30
2006						
Jan	1,36	-0,91	0,56	1,30	0,92	1,32
Feb	0,58	1,02	0,29	-0,70	0,11	0,10
Mar	0,03	1,07	-0,11	-0,50	0,34	-0,75
Akumulasi 3 bln	1,97	1,18	0,74	0,10	1,37	0,67
<i>y-t-d (Mar'06)</i>	1,98	1,17	0,73	0,10	1,38	0,66

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Dari pergerakan angka inflasi tersebut, laju inflasi s.d Maret 2006 (*y-t-d*) terbesar terjadi di kota Jambi dengan laju inflasi sebesar 1,38%, disusul kota Padang sebesar 1,17%, dan berturut-turut kota Pekanbaru sebesar 0,73%, kota Batam sebesar 0,66% dan kota Bengkulu dengan laju inflasi sebesar 0,10%. Sementara laju inflasi nasional sampai dengan Maret 2006 sebesar 1,98%.

2.3. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa

Dilihat dari kelompok Barang dan Jasa, semua kelompok mengalami inflasi pada triwulan I-2006, kecuali kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 5,52% (*q-t-q*) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,16%, disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 5,43% (sumb. inflasi 0,88%). Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok perumahan sebesar 2,29% (sumb. inflasi 0,44%), kelompok sandang sebesar 0,55% (sumb. inflasi 0,04%), kelompok transportasi sebesar 0,48% (sumb. inflasi 0,08%), dan kelompok pendidikan sebesar 0,11% (sumb. inflasi 0,01%). Sementara itu, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar -1,34% dengan sumbangan deflasi sebesar -0,43% (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Padang Menurut Kel. Barang (q-t-q,%)

Kelompok Barang & Jasa	2005						2006	
	Tw. II		Tw. III		Tw. IV		Tw. I	
	Perubhn.	Sumbgn.	Perubhn.	Sumbgn.	Perubhn.	Sumbgn.	Perubhn.	Sumbgn.
UMUM / TOTAL	-1,32	-1,32	2,75	2,75	11,25	11,25	1,17	1,17
Bahan Makanan	-5,45	-1,79	5,75	1,81	10,43	3,37	-1,34	-0,43
Makanan Jadi	1,68	0,28	2,61	0,45	5,72	0,98	5,43	0,88
Perumahan	0,07	0,01	0,45	0,09	8,22	1,62	2,29	0,44
Sandang	0,47	0,03	3,62	0,27	4,23	0,32	0,55	0,04
Kesehatan	1,80	0,06	0,92	0,03	2,30	0,07	5,52	0,16
Pendidikan	-0,01	0,00	0,37	0,02	8,25	0,48	0,11	0,01
Transportasi & Komunikasi	0,59	0,08	0,58	0,09	30,61	4,41	0,48	0,08

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi yang cukup tinggi pada triwulan IV-2005, pada triwulan I-2006 terkoreksi hingga deflasi sebesar -1,34% (q-t-q). Deflasi tersebut terutama disebabkan oleh deflasi pada subkelompok bumbu-bumbuan sebesar -21,60%, disusul kemudian deflasi pada subkelompok ikan segar sebesar -14,08%, subkelompok ikan diawetkan (-9,28%), subkelompok sayur-sayuran (-2,64%), subkelompok daging & hasil-hasilnya (-2,14%), subkelompok telur, susu & hasil-hasilnya (-2,10%), subkelompok lemak & minyak (-0,18%), dan subkelompok bahan makanan lainnya (-0,02%). Sementara itu, subkelompok lainnya mengalami inflasi, seperti subkelompok padi-padian (18,84%), subkelompok buah-buahan (1,95%), dan subkelompok kacang-kacangan sebesar 0,68% (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Bahan Makanan	12,70	-5,45	5,75	10,43	-1,34
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	36,02	-12,71	1,59	4,86	18,84
Daging dan Hasil-hasilnya	-1,39	-0,47	0,48	7,93	-2,14
Ikan Segar	18,59	-2,91	10,28	0,28	-14,08
Ikan Diawetkan	1,81	-2,25	4,33	14,78	-9,28
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	-2,71	2,45	1,77	5,27	-2,10
Sayur-sayuran	10,31	-19,45	6,84	21,05	-2,64
Kacang-kacangan	1,40	-0,78	4,27	7,97	0,68
Buah-buahan	0,02	3,65	-4,22	16,26	1,95
Bumbu-bumbuan	1,55	1,46	27,33	39,94	-21,60
Lemak & Minyak	4,94	4,41	5,62	-2,38	-0,18
Bahan makanan lainnya	0,18	-2,98	1,36	0,35	-0,02

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Beberapa harga komoditi yang masuk dalam kategori bumbu-bumbuan, seperti cabe merah dan bawang merah, mengalami penurunan harga setelah terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi di triwulan IV-2005. Penurunan tersebut, selain karena permintaan yang kembali normal juga karena *supply* yang cukup di pasaran. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap komoditi ikan

tampaknya belum mengalami peningkatan akibat isu formalin yang pernah merebak di Sumatera Barat, sehingga harga ikan mengalami penurunan. Demikian pula dengan permintaan daging dan telur ayam yang mengalami penurunan sejak ditemukannya kasus flu burung di Sumatera Barat.

Pada subkelompok padi-padian, komoditi beras mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi pada triwulan laporan. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari berkurangnya pasokan beras di pasaran Sumatera Barat, terutama kota Padang, akibat cuaca yang kurang baik dan banyaknya pembeli beras dari luar provinsi Sumatera Barat, seperti Pekanbaru dan Jakarta, yang membeli beras dari Sumatera Barat. Hal tersebut diperparah lagi dengan tidak adanya jatah beras impor dari Badan Urusan Logistik untuk wilayah Sumatera Barat.

Pada **kelompok makanan jadi**, mengalami inflasi sebesar 5,43% (q-t-q) di triwulan I-2006. Inflasi tersebut disumbang dari inflasi yang terjadi pada semua subkelompoknya, dengan inflasi tertinggi pada subkelompok tembakau & minuman beralkohol sebesar 14,18%, selanjutnya sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 4,09%, dan subkelompok makanan jadi sebesar 1,87% (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	4,12%	1,68	2,61	5,72	5,43
Makanan Jadi	6,92%	3,35	0,88	10,20	1,87
Minuman yang Tidak Beralkohol	0,97%	-5,73	14,03	0,22	4,09
Tembakau & Minuman Beralkohol	0,69%	2,66	-0,01	0,00	14,18

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Keluarnya pernyataan pemerintah di bulan Februari 2006 yang akan menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 10% per tanggal 1 April 2006, telah direspon pasar dengan menaikkan harga komoditi rokok selama triwulan laporan. Bahkan peningkatan harga rokok putih di pasaran telah mengalami peningkatan sebesar 20%, atau dua kali lebih tinggi dari rencana kenaikan HJE. Selanjutnya, rokok kretek dan rokok kretek filter mengalami peningkatan harga masing-masing sebesar 14,21% dan 11,90%. Sementara itu, kelangkaan gula pasir di pasar Sumatera Barat telah memicu inflasi subkelompok minuman tidak beralkohol. Harga gula pasir yang biasanya dijual Rp6.000/kg telah meningkat menjadi 6.500/kg. Sedangkan minuman ringan mengalami kenaikan harga seiring dengan meningkatnya biaya transportasi/angkut dari pabrik ke pasar di Sumatera Barat.

Di triwulan I-2006, **kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar**, mengalami inflasi sebesar 2,29% atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 8,22%. Turunnya angka inflasi tersebut terutama akibat deflasi pada subkelompok perlengkapan rumah tangga sebesar -0,28%, dan subkelompok penyelenggaraan rumah tangga sebesar -0,05%. Sementara itu, subkelompok biaya tempat tinggal mengalami inflasi sebesar 4,87%, dan subkelompok bahan bakar, penerangan & air tidak mengalami perubahan harga (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	1,12	0,07	0,45	8,22	2,29
Biaya Tempat Tinggal	0,87	-0,47	0,43	1,74	4,87
Bahan Bakar, Penerangan & Air	1,79	0,00	0,25	19,15	0,00
Perlengkapan Rumah Tangga	0,94	1,79	1,57	7,96	-0,28
Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,30	1,71	0,00	5,85	-0,05

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Penurunan angka inflasi di triwulan laporan dikarenakan faktor stabilnya harga bahan bakar rumah tangga yang berada pada subkelompok bahan bakar, penerangan & air, seperti gas elpiji dan minyak tanah, setelah mengalami peningkatan pada triwulan IV-2005. Sementara itu, inflasi pada subkelompok biaya tempat tinggal berasal dari kenaikan biaya/tarif tukang bukan mandor sebagai bentuk penyesuaian upah secara regional menyusul telah ditetapkannya upah minimum provinsi Sumatera Barat tahun 2006 sebesar Rp650.000/bulan atau mengalami peningkatan sebesar 20,47% dibandingkan UMP tahun 2005 sebesar Rp540.000/bulan.

Setelah mengalami inflasi tertinggi pada triwulan IV-2005, **kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan** pada triwulan I-2006 terkoreksi menjadi sebesar 0,48%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,61%. Inflasi pada triwulan laporan terutama disumbang oleh inflasi yang terjadi pada subkelompok sarana & penunjang transportasi sebesar 6,99%, disusul kemudian oleh subkelompok jasa keuangan sebesar 4,46%, dan subkelompok transportasi sebesar 0,11%. Sementara itu, subkelompok komunikasi & pengiriman tidak mengalami perubahan harga di triwulan laporan (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Transportasi, Komunkasi & Jasa Keuangan	13,50	0,59	0,58	30,61	0,48
Transportasi	19,67	0,00	0,75	42,24	0,11
Komunikasi & Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
Sarana & Penunjang Transportasi	0,43	11,75	0,80	2,34	6,99
Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	1,19	4,46

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Penyesuaian tarif yang telah dilakukan pada jasa angkutan kendaraan, baik dalam kota maupun antar kota, yang masuk dalam subkelompok transportasi pada triwulan IV-2005, relatif tidak mengalami perubahan di triwulan I-2006. Sementara itu, tarif pemeliharaan/service kendaraan dan perbaikan ringan kendaraan, yang berada pada subkelompok sarana & penunjang transportasi, mengalami kenaikan harga sebagai imbas tak langsung dari meningkatnya harga barang & jasa.

Kelompok kesehatan di triwulan I-2006 mengalami inflasi sebesar 5,52%. Inflasi yang terjadi tersebut disumbang oleh subkelompok jasa kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 11,45%, subkelompok perawatan jasmani & kosmetik sebesar 4,05% dan subkelompok obat-obatan sebesar 2,37%. Sementara itu, dan subkelompok jasa perawatan & jasmani tidak mengalami perubahan harga dari triwulan sebelumnya. (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Kesehatan	0,08	1,80	0,92	2,30	5,52
Jasa Kesehatan	0,00	0,00	5,61	0,00	11,45
Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	1,55	2,37
Jasa Perawatan & Jasmani	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
Perawatan Jasmani & Kosmetik	0,13	1,56	-0,82	3,74	4,05

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Upah minimum provinsi yang naik dari Rp540.000/bulan menjadi Rp650.000/bulan untuk tahun 2006, dan relatif masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan memberikan dampak terhadap biaya operasional rumah sakit, baik tenaga kerja maupun alat medis sehingga memberi tekanan terhadap subkelompok jasa kesehatan. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya transportasi/angkut dari pabrik ke pasar di Sumatera Barat, menyebabkan harga beberapa barang kosmetik, seperti bedak, pelembab, minyak rambut dan pembersih/penyegar, mengalami peningkatan harga.

Pada triwulan I-2006 **kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga** mengalami inflasi sebesar 0,11%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

mencapai 8,25%. Inflasi yang terjadi disumbang dari inflasi pada subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan sebesar 1,70%, disusul kemudian subkelompok olahraga sebesar 0,66%. Sementara itu, subkelompok kursus pelatihan mengalami deflasi sebesar -2,52%, sedangkan subkelompok jasa pendidikan dan subkelompok rekreasi tidak mengalami perubahan harga pada triwulan laporan (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,32	-0,01	0,37	8,25	0,11
Jasa Pendidikan	0,00	0,00	0,77	8,85	0,00
Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,52
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	1,46	0,00	-1,64	8,87	1,70
Rekreasi	0,81	-0,06	0,38	6,79	0,00
Olahraga	0,00	0,00	0,00	3,72	0,66

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Turunnya angka inflasi pada kelompok pendidikan lebih disebabkan karena telah berjalan normalnya kegiatan pendidikan, setelah pada triwulan III dan IV biaya tahun ajaran baru dibayarkan. Angka inflasi pada kelompok ini berasal dari subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan, seperti text book dan pulpen/bollpoint, dan subkelompok olahraga dengan kenaikan pada harga sepatu olahraga pria. Kenaikan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari naiknya biaya transportasi/angkut barang.

Pada triwulan I-2006 **kelompok sandang** mengalami inflasi sebesar 0,55% atau lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan IV-2005 yang tercatat sebesar 4,23%. Inflasi yang terjadi pada kelompok sandang akibat dari melonjaknya harga pada subkelompok barang pribadi & sandang lainnya yang mengalami inflasi sebesar 1,57%, disusul kemudian subkelompok sandang anak-anak sebesar 0,79%, dan subkelompok sandang laki-laki sebesar 0,77%. Sementara itu, subkelompok sandang wanita mengalami deflasi sebesar -0,83% (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005				2006
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Sandang	0,90	0,47	3,62	4,23	0,55
Sandang Laki-laki	0,05	1,13	1,02	1,23	0,77
Sandang Wanita	2,62	0,00	0,52	2,36	-0,83
Sandang Anak-anak	0,93	0,48	2,44	1,85	0,79
Barang Pribadi, Sandang lainnya	-0,21	0,41	9,63	9,45	1,57

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Masih tingginya permintaan emas di pasar internasional mengakibatkan harga emas dalam negeri terus berada pada level yang cukup tinggi. Selain itu,

relatif masih lemahnya nilai tukar rupiah ikut menyebabkan harga emas dalam negeri melambung. Di bulan Januari 2006, harga emas bisa mencapai Rp410.000/emas untuk 24 karat dari harga sebelumnya yang berkisar pada Rp380.000-400.000/emas. Kondisi ini memberi tekanan terhadap inflasi pada subkelompok barang pribadi & sandang lainnya.

2.4. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar

Dilihat secara lebih spesifik, komoditi-komoditi yang merupakan penyumbang inflasi terbesar (total sumbangan sebesar 3,29%) pada triwulan I-2006 (q-t-q), antara lain adalah : beras dengan sumbangan inflasi sebesar 1,48%, tukang bukan mandor (0,45%), rokok kretek filter (0,25%), rokok kretek (0,19%), ketupat/lontong sayur (0,16%), rokok putih (0,16%), tarif rumah sakit (0,09%), daging sapi (0,07%), kentang (0,07%), bawang putih (0,07%), pisang (0,04%), gula pasir (0,04%), tuna (0,04%), wortel (0,03%), pemeliharaan/service (0,03%), emas perhiasan (0,03%), kopi bubuk (0,03%), pelembab (0,02%), bedak (0,02%), dan minuman ringan sebesar 0,02% (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw IV/05		Komoditi	Tw I/06	
		Inflasi	Sumb.		Inflasi	Sumb.
1	Angkutan Dalam Kota	51,92%	2,44%	Beras	20,23%	1,48%
2	Bensin	72,65%	1,54%	Tukang Bukan Mandor	42,86%	0,45%
3	Cabe Merah	61,54%	1,31%	Rokok Kretek Filter	11,90%	0,25%
4	Minyak Tanah	108,00%	1,04%	Rokok Kretek	14,21%	0,19%
5	Nasi	16,67%	0,41%	Ketupat/Lontong Sayur	12,50%	0,16%
6	Beras	5,01%	0,39%	Rokok Putih	20,89%	0,16%
7	Angkutan Antar kota	42,06%	0,27%	Tarif Rumah Sakit	24,04%	0,09%
8	SLTP	57,33%	0,20%	Daging Sapi	4,50%	0,07%
9	Emas Perhiasan	10,46%	0,19%	Kentang	20,38%	0,07%
10	Jeruk	33,34%	0,18%	Bawang Putih	35,81%	0,07%
11	Bayam	56,24%	0,15%	Pisang	8,33%	0,04%
12	Tomat Sayur	66,67%	0,15%	Gula Pasir	3,99%	0,04%
13	SLTA	28,70%	0,15%	Tuna	13,54%	0,04%
14	Roti Tawar	45,16%	0,14%	Wortel	59,30%	0,03%
15	Soto	40,00%	0,14%	Pemeliharaan/Service	16,67%	0,03%
16	Gas Elpiji	21,67%	0,14%	Emas Perhiasan	1,55%	0,03%
17	Kangkung	37,90%	0,13%	Kopi Bubuk	9,09%	0,03%
18	Solar	104,77%	0,12%	Pelembab	22,22%	0,02%
19	Daging Ayam Ras	8,52%	0,11%	Bedak	8,91%	0,02%
20	Bawang Merah	14,27%	0,11%	Minuman Ringan	12,50%	0,02%
	Total Sumbangan Komoditi lain		9,31%	Total Sumbangan Komoditi lain		3,29%
	Inflasi	11,25%	1,94%	Inflasi	1,17%	-2,12%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Selain terdapat komoditi/jasa yang mengalami inflasi, pada triwulan I-2006 terdapat pula beberapa komoditi/jasa yang mengalami deflasi. Komoditi-komoditi yang mengalami deflasi terbesar, dengan total sumbangan sebesar -2,28%, diantaranya adalah cabe merah dengan sumbangan deflasi sebesar -0,98%, tongkol (-0,27%), daging ayam ras (-0,17%), kembang/gembung (-0,16%), bawang merah (-0,11%), telur ayam ras (-0,09%), aso-aso (-0,08%), kerapu (-0,07%), cumi-cumi (-0,06%), bayam (-0,05%), cabe hijau (-0,05), baju muslim (-0,04%), ikan selar (-0,03%), kol putih (-0,03%), ikan asin belah (-0,03%), teri (-0,03%) dan udang basah deflasi sebesar -0,03% (Tabel 2.11).

Tabel 2.11 Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw IV/05		Komoditi	Tw I/06	
		Deflasi	Sumb.		Deflasi	Sumb.
1	Minyak Goreng	-8,18%	-0,13%	Cabe Merah	-31,79%	-0,98%
2	Kentang	-22,86%	-0,11%	Tongkol	-16,52%	-0,27%
3	Kakap Merah	-26,76%	-0,08%	Daging Ayam Ras	-13,72%	-0,17%
4	Tuna	-18,90%	-0,07%	Kembang/Gembung	-31,37%	-0,16%
5	Tongkol	-3,54%	-0,07%	Bawang Merah	-14,09%	-0,11%
6	Gula Pasir	-2,72%	-0,03%	Telur Ayam Ras	-9,75%	-0,09%
7	Jengkol	-11,69%	-0,02%	Aso-aso	-22,67%	-0,08%
8	Ketela Rambat	-21,98%	-0,02%	Kerapu	-29,58%	-0,07%
9	Wortel	-20,42%	-0,02%	Cumi-cumi	-28,17%	-0,06%
10	Baju Muslim	-2,45%	-0,01%	Bayam	-12,99%	-0,05%
11	Ketimun	-7,14%	-0,01%	Cabe Hijau	-38,32%	-0,05%
12	Rok Luar Model Biasa	-7,69%	-0,01%	Baju Muslim	-8,52%	-0,04%
13	-	-	-	Selar	-20,73%	-0,03%
14	-	-	-	Kol Putih	-20,00%	-0,03%
15	-	-	-	Ikan Asin Belah	-18,66%	-0,03%
16	-	-	-	Teri	-9,75%	-0,03%
17	-	-	-	Udang Basah	-9,67%	-0,03%
	Total Sumbangan Komoditi lain Inflasi		-0,58% 11,83%	Total Sumbangan Komoditi lain Inflasi		-2,28% 3,45%
		11,25%			1,17%	

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

2.5. Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah

Berdasarkan perkembangan inflasi Sumatera Barat di triwulan I-2006, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah diantaranya :

- Sehubungan dengan curah hujan yang cukup tinggi pada akhir-akhir ini dan mengingat struktur tanah di Sumatera Barat yang berbukit, sehingga rawan terjadi bencana longsor yang dapat memutuskan sarana jalan penghubung Sumatera Barat dengan provinsi tetangga. Pemerintah daerah dan instansi

terkait perlu memberikan perhatian yang serius dan cepat apabila terjadi bencana longsor, sehingga tidak mengganggu kelancaran mobilitas barang.

- Mengingat harga beras di triwulan I-2006 selalu menunjukkan trend yang meningkat, upaya-upaya stabilisasi harga beras di pasar perlu dilakukan di saat yang tepat. Selain itu, perlu dipastikan agar distribusi pupuk dapat sampai ke petani dengan jumlah yang memadai, tanpa distorsi ditingkat penyalur/distributor.
- Rencana kenaikan gas elpiji oleh Pertamina, dan wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik oleh PT. PLN, biasanya direspon lebih cepat oleh masyarakat dan dapat memicu kenaikan harga barang di pasar mendahului keputusan jadi atau tidaknya kenaikan tersebut. Oleh karena itu, pihak yang berkompeten perlu memberikan penjelasan dan informasi yang benar guna mengurangi dampak inflasioner isu tersebut.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN LAJU INFLASI DAERAH

Meskipun Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah termasuk laju inflasi, pada kenyataannya laju inflasi tidak dapat sepenuhnya di bawah kendali BI. Inflasi pada sisi permintaan (*demand-pull inflation*) yang dikaitkan dengan ketersediaan uang beredar di masyarakat dapat dipengaruhi melalui kebijakan moneter BI. Namun ditinjau dari sisi penawaran, pergerakan inflasi sangat dipengaruhi oleh sisi produksi dan distribusi. Peningkatan biaya-biaya produksi yang membebani produsen (*cost-push inflation*) pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Selain itu, persoalan pasokan bahan makanan terutama bahan makanan pokok sangat tergantung kepada keberhasilan panen serta pengaruh cuaca. Selanjutnya gangguan-gangguan pada distribusi barang juga menjadi penyumbang kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sumber inflasi musiman yang bersifat persisten dikaitkan dengan saat bulan puasa dan hari raya idul fitri.

Mengingat keterbatasan BI di sisi penawaran, Pemerintah Daerah beserta jajarannya mempunyai peranan yang penting serta strategis dalam turut mengendalikan laju inflasi Padang. Dikatakan penting karena Pemda mempunyai kapasitas untuk mengendalikan inflasi di daerah antara lain dengan menghapuskan atau mengurangi jenis-jenis pungutan baik yang legal maupun ilegal yang memberatkan biaya produksi barang/jasa. Dengan biaya-biaya produksi/distribusi yang lebih rendah maka harga produk lokal menjadi lebih murah sehingga menjadi lebih kompetitif secara regional maupun internasional. Sementara itu, peran strategis Pemda dalam mengendalikan laju inflasi akan tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik. Seperti diketahui bahwa laju inflasi berdampak menggerogoti nilai uang yang dipegang masyarakat sehingga inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat menjadi turun dan kesejahteraannya menjadi berkurang.

Memperhatikan perkembangan inflasi kota Padang yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional, Gubernur Sumatera Barat melalui surat yang

ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat serta Kepala Badan/Dinas bernomor 510/298/Perek-2006 tanggal 21 Februari 2006 telah mengeluarkan arahan dalam rangka pengendalian inflasi daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku, seperti Perda tentang retribusi agar tidak dijadikan celah untuk melakukan pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum tertentu;
- Memberantas segala macam bentuk pungli yang sering dialami oleh kendaraan angkutan umum
- Melakukan operasi pasar pada waktu yang tepat terutama barang kebutuhan pokok tertentu yang bisa menyumbang inflasi yang tinggi seperti beras, gula dan lain-lain;
- Menjaga dan memperbaiki infrastruktur supaya tetap baik, sehingga arus barang ke pasar dapat berjalan lancar agar tidak memperlambat pemenuhan persediaan barang-barang di pasar;
- Menjaga agar barang terutama kebutuhan pokok tidak langka di pasaran sebagaimana terjadi pada BBM yang terpengaruh karena adanya isu kenaikan harga BBM.

BAB 3

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

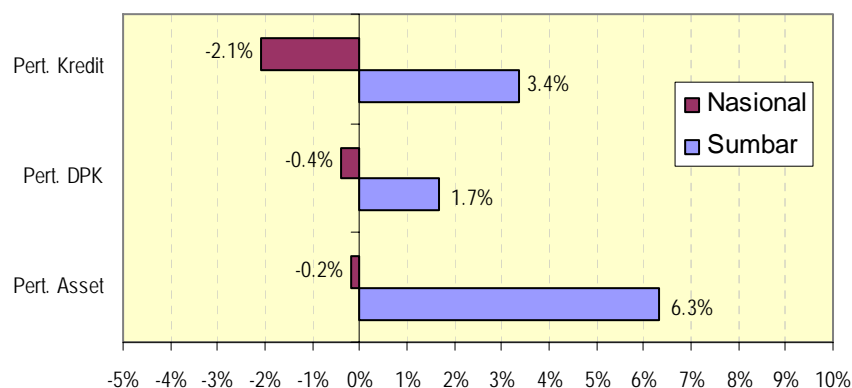
Kinerja perbankan di Sumbar pada triwulan I-2006 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit mengalami pertumbuhan yang positif. Stabilitas sistem keuangan regional Sumbar selama triwulan laporan secara umum relatif terjaga. Hal ini terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang cukup terkendali, sementara perbankan daerah mampu membukukan kinerja yang positif walupun mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat.

Perkembangan lalu lintas sistem pembayaran regional secara umum memperlihatkan penurunan kegiatan transaksi pembayaran, baik tunai maupun non-tunai.

3.1. Perkembangan Perbankan

Indikator-indikator kinerja perbankan menunjukkan perbaikan selama triwulan laporan, seperti terlihat dari meningkatnya total asset, dana yang dihimpun serta kredit yang disalurkan baik oleh bank umum maupun BPR.

Grafik 3.1. Perbandingan Kinerja Perbankan Sumbar dan Nasional Triwulan I - 2006



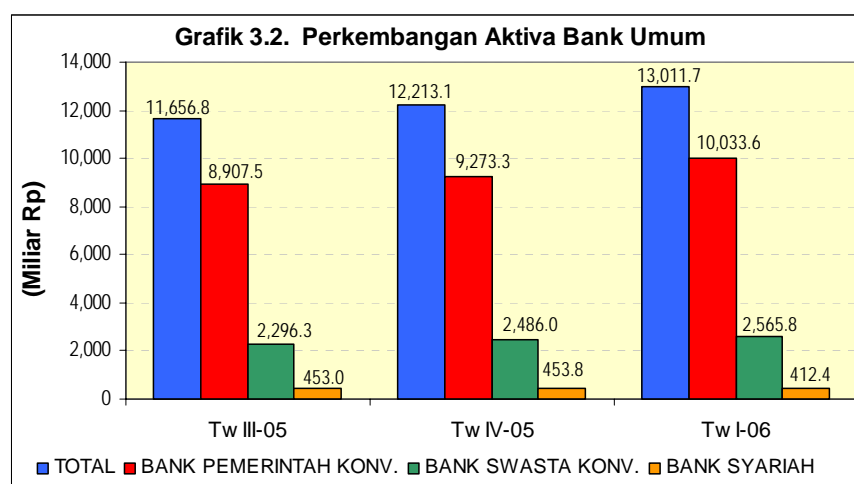
Apabila dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional (grafik 3.1), kinerja perbankan Sumbar (bank umum dan BPR) di triwulan I-2006 relatif lebih baik, terlihat dari pertumbuhan positif yang dialami perbankan Sumbar baik untuk asset (6,3%), DPK (1,7%) ataupun kredit (3,4%). Sementara kinerja

perbankan nasional pada triwulan I-2006 (s.d bulan Feruari 2006) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2005, tercermin dari penurunan asset (-0,2%), DPK (-0,4%) dan kredit (-2,1%). Selain itu, LDR perbankan Sumbar (bank umum dan BPR) telah mencapai 108%, jauh lebih tinggi dibanding LDR nasional sekitar 63,6%.

3.1.1. Perkembangan Bank Umum

3.1.1.1. Total Asset

Total asset bank umum di Provinsi Sumbar pada triwulan I-2006 tercatat sebesar Rp13.012 miliar (Grafik 3.2), naik sebesar Rp799 miliar (6,54%) dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Peningkatan asset terjadi pada kelompok bank konvensional baik pemerintah maupun swasta. Total asset bank pemerintah konvensional meningkat sebesar Rp760,3 miliar (8,20%) menjadi Rp10.033,6 miliar sedangkan total asset bank swasta konvensional meningkat Rp79,8 miliar (3,21%) menjadi Rp2.565,8 miliar. Sedangkan kelompok bank syariah mengalami penurunan asset sebesar Rp41,5 miliar (-9,13%) menjadi Rp412,4 miliar. Dengan demikian, total asset bank pemerintah konvensional merupakan yang terbesar dengan pangsa mencapai 77,11% terhadap total asset bank umum, diikuti dengan total asset kelompok bank swasta konvensional dengan pangsa 19,72% dan total asset bank syariah dengan pangsa 3,17%.



Dilihat dari komposisi aktiva produktifnya (tabel 3.1), bank umum di Sumbar menempatkan portofolio terbesarnya pada kredit yang diberikan (84,02%), selanjutnya dalam bentuk penempatan pada BI (10,67%) dan penempatan pada bank lain (4,53%). Pangsa kredit di dalam aktiva produktif

sedikit turun, dari 88,52% pada tahun triwulan IV-2005 menjadi 84,02% pada triwulan laporan. Sementara itu nilai penempatan pada BI meningkat tajam sebesar 77,01%. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penempatan pada SBI yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, yaitu dari Rp410 miliar pada triwulan IV-2005 menjadi Rp816 miliar pada triwulan laporan.

Tabel 3.1. Komposisi Aktiva Produktif Bank Umum

Keterangan	Nominal (jutaan rupiah)			Komposisi			Pertumbuhan	
	T. III-05	T. IV-05	T. I-06	T. III-05	T. IV-05	T. I-06	T. IV-05	T. I-06
Penempatan pada BI	667,943	563,882	998,118	7.23%	6.51%	10.67%	-15.58%	77.01%
Giro	155,129	153,321	181,284	1.68%	1.77%	1.94%	-1.17%	18.24%
SBI	512,309	410,056	816,229	5.54%	4.74%	8.73%	-19.96%	99.05%
Lainnya	505	505	605	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	19.80%
Penempatan pada Bank lain	330,332	359,586	423,157	3.57%	4.15%	4.53%	8.86%	17.68%
Surat Berharga	28,130	22,807	22,807	0.30%	0.26%	0.24%	-18.92%	0.00%
Kredit Yang Diberikan	7,500,342	7,663,351	7,856,455	81.17%	88.52%	84.02%	2.17%	2.52%
Garansi yang diberikan	45,574	47,854	50,253	0.49%	0.55%	0.54%	5.00%	5.01%
TOTAL	9,240,264	8,656,921	9,350,790	100.00%	100.00%	100.00%	-6.31%	8.02%

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU/LBUS)

3.1.1.2. Penghimpunan Dana

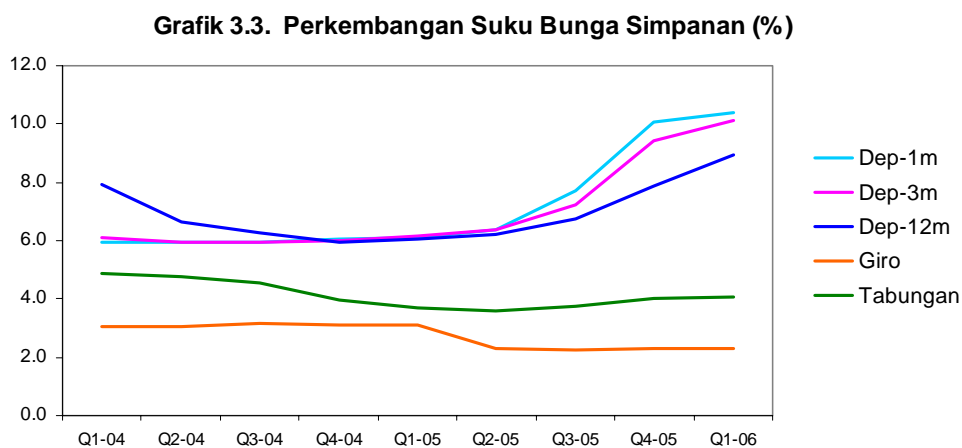
Dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar pada triwulan I-2006 mencapai Rp9.112,7 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp156,4 miliar (1,75%) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya (Tabel 3.2). Menurut kelompok bank, peningkatan DPK dialami oleh kelompok bank pemerintah sebesar 3,74%, sedangkan bank swasta mengalami penurunan sebesar 4,57%.

Tabel 3.2. Perkembangan Dana Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis

Keterangan	Posisi (Miliar Rp)					Pangsa (%)		Pertumb. (% q-t-q)	
	Tw.I-05	Tw.II-05	Tw.III-05	Tw.IV-05	Tw.I-06	Tw.IV-05	Tw.I-06	Tw.IV-05	Tw.I-06
Dana Pihak Ketiga	7,703.0	8,027.5	8,248.9	8,956.3	9,112.7	100.00	100.00	8.58	1.75
Giro	1,823.7	2,068.3	2,060.7	2,265.0	2,582.2	25.29	28.34	9.91	14.01
Deposito	2,274.9	2,396.0	2,654.3	2,785.1	3,114.6	31.10	34.18	4.93	11.83
Tabungan	3,604.5	3,563.1	3,533.9	3,906.1	3,415.9	43.61	37.49	10.53	-12.55
I. Bank Pemerintah	5,940.1	6,225.0	6,193.6	6,808.2	7,062.8	100.00	100.00	9.92	3.74
Giro	1,573.8	1,836.6	1,790.7	1,987.8	2,326.4	29.20	32.94	11.01	17.03
Deposito	1,514.3	1,579.8	1,593.6	1,659.9	2,021.8	24.38	28.63	4.16	21.81
Tabungan	2,852.0	2,808.5	2,809.3	3,160.5	2,714.6	46.42	38.44	12.50	-14.11
II. Bank Swasta	1,762.9	1,802.6	2,055.3	2,148.0	2,049.9	100.00	100.00	4.51	-4.57
Giro	249.8	231.7	270.1	277.1	255.8	12.90	12.48	2.62	-7.68
Deposito	760.5	816.2	1,060.6	1,125.2	1,092.7	52.38	53.31	6.09	-2.89
Tabungan	752.5	754.6	724.6	745.7	701.4	34.71	34.21	2.91	-5.94

Sumber: Buku Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah (SEKD) Sumbar

Menurut jenis simpanan, posisi giro dan deposito di triwulan laporan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 14,01% dan 11,83% dibandingkan dengan triwulan IV-2005. Sementara itu tabungan mengalami penurunan sebesar 12,55%. Peningkatan deposito bersamaan dengan penurunan tabungan mengindikasikan terjadinya pengalihan simpanan (*shifting*) dari jenis simpanan yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih rendah (tabungan) kepada yang lebih tinggi (deposito) sehubungan dengan tren semakin melebarnya *spread* antara deposito dengan tabungan selama periode triwulan I-2006 (Grafik 3.3).



Dilihat dari struktur jangka waktunya (tabel 3.3), simpanan deposito yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar sebagian besar merupakan simpanan jangka pendek. Pangsa deposito berjangka waktu 1 bulan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 64,47% dari total deposito. Selain pangasanya terbesar, posisi deposito 1 bulan pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 13,16% dibandingkan dengan posisi triwulan IV-2005. Pada periode yang sama, semua jenis deposito dengan jangka waktu lebih panjang (3, 6 dan 12 bulan) juga mengalami peningkatan posisi dengan peningkatan tertinggi dialami oleh deposito berjangka waktu 12 bulan (58,85%).

Berdasarkan kelompok banknya, struktur jangka waktu deposito baik di bank pemerintah maupun di bank swasta didominasi oleh deposito 1 bulan, dengan pangsa masing-masing sebesar 74,32% dan 46,26%. Meskipun didominasi oleh deposito 1 bulan, deposito yang berjangka waktu lebih panjang menunjukkan tren meningkat selama triwulan laporan. Apabila tren ini dapat

berlanjut maka dapat mengurangi risiko likuiditas yang dihadapi perbankan daerah.

Tabel 3.3. Struktur Deposito Bank Umum Menurut Jangka Waktu

Keterangan	Nominal (miliaran rupiah)			Pangsa			Pertumbuhan	
	T. III-05	T. IV-05	T. I-06	T. III-05	T. IV-05	T. I-06	T. IV-05	T. I-06
BANK PEMERINTAH								
1 bulan	1,169.65	1,100.81	1,502.63	73.40%	66.32%	74.32%	-5.89%	36.50%
3 bulan	175.62	192.77	189.57	11.02%	11.61%	9.38%	9.76%	-1.66%
6 bulan	74.39	98.45	100.00	4.67%	5.93%	4.95%	32.34%	1.58%
12 bulan	93.87	78.46	140.04	5.89%	4.73%	6.93%	-16.41%	78.48%
lainnya	80.11	189.41	89.61	5.03%	11.41%	4.43%	136.42%	-52.69%
BANK SWASTA								
1 bulan	622.70	673.73	505.45	58.71%	59.87%	46.26%	8.19%	-24.98%
3 bulan	170.97	170.14	281.70	16.12%	15.12%	25.78%	-0.49%	65.57%
6 bulan	21.38	21.02	54.09	2.02%	1.87%	4.95%	-1.68%	157.38%
12 bulan	30.36	24.68	23.81	2.86%	2.19%	2.18%	-18.70%	-3.54%
lainnya	215.21	235.68	227.66	20.29%	20.94%	20.83%	9.51%	-3.40%
TOTAL								
1 bulan	1,792.35	1,774.54	2,008.08	67.53%	63.71%	64.47%	-0.99%	13.16%
3 bulan	346.59	362.91	471.27	13.06%	13.03%	15.13%	4.71%	29.86%
6 bulan	95.77	119.46	154.09	3.61%	4.29%	4.95%	24.75%	28.99%
12 bulan	124.22	103.15	163.85	4.68%	3.70%	5.26%	-16.97%	58.85%
lainnya	295.33	425.08	317.27	11.13%	15.26%	10.19%	43.94%	-25.36%

Sumber: SEKD Sumbar

Berdasarkan kepemilikan dana simpanan di bank umum (tabel 3.4), nasabah perorangan merupakan pemilik DPK terbesar dengan pangsa 63,27%, diikuti oleh nasabah berkategori lainnya (19,27%) dan pemerintah (pangsa 5,51%). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan dana hanya dialami oleh nasabah kategori lainnya (153,73%), perusahaan asuransi (63,81%) dan nasabah bukan penduduk (23,28%). Sementara itu, penurunan dana tertinggi dialami oleh BUMN (-40,13%).

Tabel 3.4. Struktur Kepemilikan Dana Simpanan Bank Umum

Keterangan	Nominal (miliaran rupiah)			Komposisi			Pertumbuhan	
	T. III-05	T. IV-05	T. I-06	T. III-05	T. IV-05	T. I-06	T. IV-05	T. I-06
Pemerintah	428.7	677.3	502.0	5.20%	7.56%	5.51%	57.98%	-25.88%
Badan/Lembaga Pemerintah	85.5	109.2	81.1	1.04%	1.22%	0.89%	27.75%	-25.70%
Perusahaan Asuransi	77.7	73.7	120.8	0.94%	0.82%	1.33%	-5.13%	63.81%
Badan Usaha Milik Negara	171.1	307.9	184.3	2.07%	3.44%	2.02%	79.98%	-40.13%
Perusahaan Swasta	338.2	452.5	326.2	4.10%	5.05%	3.58%	33.80%	-27.93%
Yayasan dan Badan Sosial	286.4	284.3	281.5	3.47%	3.17%	3.09%	-0.73%	-0.99%
Koperasi	47.8	61.5	53.2	0.58%	0.69%	0.58%	28.77%	-13.54%
Perorangan	5,599.3	6,263.4	5,765.4	67.88%	69.93%	63.27%	11.86%	-7.95%
Lainnya	1,115.2	692.0	1,755.8	13.52%	7.73%	19.27%	-37.95%	153.73%
Bukan Penduduk	99.1	34.4	42.4	1.20%	0.38%	0.47%	-65.29%	23.28%
TOTAL	8,248.9	8,956.3	9,112.7	100.00%	100.00%	100.00%	8.58%	1.75%

Sumber: SEKD Sumbar

Dilihat dari sebaran DPK menurut kabupaten/kota (tabel 3.5), penghimpunan dana masyarakat masih terkonsentrasi di Kota Padang dengan

pangsa 57,4%, diikuti oleh Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan pangsa 11,1%. Sementara itu, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota Sawahlunto mencatat pangsa terendah dalam pengimpunan dana yaitu sebesar 4,4%.

Tabel 3.5. Sebaran DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpun Dana

Posisi dalam miliaran rupiah

Kabupaten/Kota	Triwulan III-2005		Triwulan IV-2005		Triwulan I-2006	
	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa
Kota Padang	5,027.9	61.0%	5,450.5	60.9%	5,229.1	57.4%
Kota Bukittinggi & Kab. Agam	935.6	11.3%	1,087.7	12.1%	1,010.6	11.1%
Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	386.6	4.7%	374.1	4.2%	448.8	4.9%
Kota Solok & Kab. Solok	426.7	5.2%	489.1	5.5%	529.8	5.8%
Kab. Tanah Datar & Kota Pd. Panjang	409.7	5.0%	406.9	4.5%	468.1	5.1%
Kab. Swi/Sijunjung & Kota Sawahlunto	292.6	3.5%	340.3	3.8%	396.8	4.4%
Kota Pariaman & Kab. Pd Pariaman	353.2	4.3%	332.8	3.7%	465.1	5.1%
Kab. Pasaman & Kab. Pesisir Selatan	416.6	5.1%	474.9	5.3%	564.4	6.2%
Total	8,248.9	100.0%	8,956.3	100.0%	9,112.7	100.0%

Sumber: SEKD Sumbar

3.1.1.3. Penyaluran Kredit

Nilai kredit yang disalurkan untuk proyek yang berlokasi di Sumbar hingga akhir triwulan laporan mencapai Rp9.830,9 miliar, meningkat Rp315,1 miliar (3,31%) dibandingkan posisi triwulan IV-2005 (Tabel 3.6.). Pertumbuhan tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 2,47%.

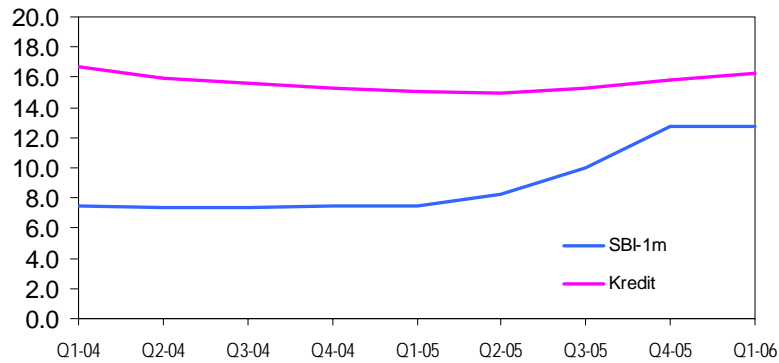
Tabel 3.6 Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek

Keterangan	Posisi (Miliar Rp)				Pangsa (%)		Pert. (% q-t-q)		
	Tw.I-05	Tw.II-05	Tw.III-05	Tw.IV-05	Tw.I-06	Tw.IV-05	Tw.I-06	Tw.IV-05	Tw.I-06
Kelompok Bank	8,776.0	9,124.4	9,286.1	9,515.8	9,830.9	100.00	100.00	2.47	3.31
Bank Pemerintah	6,857.2	7,152.4	7,227.7	7,383.2	7,631.4	77.59	77.63	2.15	3.36
Bank Swasta	1,918.9	1,972.0	2,058.4	2,132.6	2,199.5	22.41	22.37	3.60	3.14
Sektor Ekonomi	8,776.0	9,124.4	9,286.1	9,515.8	9,830.9	100.00	100.00	2.47	3.31
Pertanian	1,032.1	1,023.8	959.4	1,175.0	1,098.0	12.35	11.17	22.48	-6.55
Pertambangan & Penggalian	22.3	21.5	21.6	42.6	42.9	0.45	0.44	96.77	0.80
Perindustrian	1,146.2	1,216.2	1,142.7	993.8	1,210.6	10.44	12.31	-13.03	21.81
Listrik,Gas & Air	1,395.4	1,362.3	1,347.6	1,313.2	1,296.0	13.80	13.18	-2.55	-1.31
Konstruksi	81.3	104.6	105.6	120.3	120.1	1.26	1.22	13.92	-0.17
Perdag,Hotel& Restoran	1,723.3	1,895.4	1,998.0	2,084.4	2,167.1	21.90	22.04	4.32	3.97
Pengangktn & Komunikasi	168.3	163.6	143.5	133.0	134.7	1.40	1.37	-7.35	1.29
Jasa-jasa	268.4	237.6	293.2	320.4	346.4	3.37	3.52	9.26	8.10
Lain-lain	2,938.7	3,099.2	3,274.5	3,333.1	3,415.0	35.03	34.74	1.79	2.46
Jenis Penggunaan	8,776.0	9,124.4	9,286.1	9,515.8	9,830.9	100.00	100.00	2.47	3.31
Modal Kerja	2,792.8	3,103.4	3,176.6	3,403.1	3,638.3	35.76	37.01	7.13	6.91
Investasi	3,134.8	3,002.4	2,859.4	2,794.5	2,801.6	29.37	28.50	-2.27	0.25
Konsumsi	2,848.5	3,018.6	3,250.2	3,318.2	3,391.0	34.87	34.49	2.09	2.20

Sumber: SEKD Sumbar

Penyaluran kredit tetap mengalami peningkatan meskipun selama periode laporan suku bunga kredit sedikit naik, dari 15,82% pada akhir triwulan IV-2005 menjadi 16,28% pada akhir triwulan laporan (Grafik 3.4).

Grafik 3.4. Perkembangan Suku Bunga Kredit dan SBI-1 bulan: Q1-2004 s.d Q1-2006 (%)



Menurut kelompok bank, peningkatan kredit terjadi baik pada bank pemerintah maupun bank swasta, masing-masing sebesar 3,36% dan 3,14%. Berdasarkan sektor ekonomi (tidak termasuk sektor lain-lain yang bersifat konsumtif), alokasi kredit terbesar diberikan terutama kepada sektor perdagangan, hotel & restoran (22,04%), sektor listrik, gas & air (13,18%) dan sektor perindustrian (12,31%). Dilihat dari pertumbuhan kredit pada triwulan I-2006, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor perindustrian (21,81%), kemudian sektor jasa-jasa (8,1%) dan sektor perdagangan (3,97%). Sementara itu, tercatat tiga sektor yang mengalami penurunan kredit, tertinggi terjadi pada sektor pertanian (-6,55%), diikuti oleh sektor listrik, gas & air (-1,31%) dan sektor konstruksi (-0,17%).

Menurut jenis penggunaannya, alokasi kredit terbesar diperoleh kredit modal kerja (37,01%), diikuti kredit konsumsi (34,49%) dan kredit investasi (28,5%). Dalam hal pertumbuhannya, kredit modal kerja mencatat pertumbuhan tertinggi (6,91%) diikuti oleh kredit konsumsi (2,2%) dan kredit investasi (0,25%).

Sama halnya dengan penghimpunan dana, penyaluran kredit juga terkonsentrasi di Kota Padang dengan pangsa 44,5% (Tabel 3.7). Kota Solok dan Kabupaten Solok menempati peringkat kedua untuk pangsa kredit terbesar (19,1%). Sedangkan pangsa terkecil dialami oleh Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (4,1%).

Berdasarkan lokasi proyek, nisbah kredit terhadap DPK (LDR-Gross) di Sumbar secara umum telah mencapai 107,9% pada akhir periode laporan, lebih tinggi dibandingkan dengan nisbah LDR triwulan IV-2005 sebesar 106,2% (Tabel 3.7). Dengan pencapaian nisbah LDR di atas 100%, pembiayaan kredit untuk wilayah Sumbar telah melebihi sumber dana yang tersedia pada perbankan daerah. Defisit pembiayaan terbesar terjadi di kota Solok dan kabupaten Solok dengan nisbah LDR 343,2%. Di pihak lain, kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam mengalami surplus dana terbesar sehingga nisbah LDR-nya menjadi yang terendah (70,2%).

Tabel 3.7 Sebaran Kredit Bank Umum dan LDR Berdasarkan Lokasi Proyek

posisi dalam miliaran rupiah

Kabupaten/Kota	Triwulan III-2005		Triwulan IV-2005			Triwulan I-2006		
	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa	LDR	Posisi	Pangsa	LDR
Kota Padang	4,049.7	43.6%	4,052.4	42.6%	74.3%	4,230.6	44.5%	80.9%
Kota Bukittinggi & Kab. Agam	641.9	6.9%	649.7	6.8%	59.7%	709.9	7.5%	70.2%
Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	416.3	4.5%	435.0	4.6%	116.3%	450.2	4.7%	100.3%
Kota Solok & Kab. Solok	1,844.9	19.9%	1,827.7	19.2%	373.7%	1,818.1	19.1%	343.2%
Kab. Tanah Datar & Kota Pd. Panjang	350.6	3.8%	371.8	3.9%	91.4%	389.2	4.1%	83.1%
Kab. Swl/Sijunjung & Kota Sawahlunto	632.6	6.8%	643.0	6.8%	189.0%	671.6	7.1%	169.2%
Kota Pariaman & Kab. Pd Pariaman	339.7	3.7%	501.5	5.3%	150.7%	512.0	5.4%	110.1%
Kab. Pasaman & Kab. Pesisir Selatan	1,010.5	10.9%	1,034.7	10.9%	217.9%	1,049.3	11.0%	185.9%
Total	9,286.1	100.0%	9,515.8	100.0%	106.2%	9,830.9	103.3%	107.9%

Sumber: SEKD Sumbar

3.1.1.4. Perkembangan Kolektibilitas dan Profitabilitas.

Kualitas kredit yang disalurkan bank umum di Sumbar masih terjaga cukup baik meskipun persentase kredit bermasalah (berkategori kurang lancar, diragukan dan macet) meningkat, dari 3,73% di triwulan IV-2005 menjadi 4,0% di triwulan I-2006 (Tabel 3.8).

Tabel 3.8. Perkembangan Kolektibilitas Kredit/Pembiayaan Bank Umum

Keterangan	Posisi (miliaran rupiah)				
	Tw I-05	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06
Lancar	6,365.2	6,630.0	6,794.1	7,107.2	7,228.8
Dalam Perhatian Khusus	295.1	294.8	381.7	270.0	313.6
Kurang Lancar	63.5	74.6	65.6	39.1	38.0
Diragukan	43.7	79.9	83.7	29.2	40.7
Macet	124.3	88.8	175.4	217.8	235.4
Rasio NPLs	3.36%	3.39%	4.33%	3.73%	4.00%

Sumber: LBU/LBUS

Menurut jenis penggunaan kredit (Tabel 3.9), persentase NPLs tertinggi dialami oleh kredit investasi (8,25%), kemudian kredit modal kerja (5,01%). Sementara itu persentase NPLs untuk kredit konsumsi merupakan yang terkecil, yaitu sebesar 0,95%. Berdasarkan sektor ekonomi (Tabel 3.9), persentase NPLs tertinggi terjadi pada sektor pertambangan (27,47%), diikuti oleh sektor pertanian (10,41%) dan sektor konstruksi (8,46%).

Tabel 3.9. Sebaran NPLs Bank Umum per Penggunaan dan Sektoral

nominal dalam jutaan rupiah

Keterangan	Trw IV-2005		Trw I-2006		Pert. nominal
	Nominal	Rasio	Nominal	Rasio	
Jenis Penggunaan					
- Modal Kerja	159,700	4.96%	166,786	5.01%	4.4%
- Investasi	105,267	7.45%	117,757	8.25%	11.9%
- Konsumsi	21,206	0.70%	29,546	0.95%	39.3%
Sektor Ekonomi					
- Pertanian	84,847	8.28%	85,220	10.41%	0.4%
- Pertambangan	9,590	26.16%	9,529	27.47%	-0.6%
- Industri	56,621	6.31%	53,030	4.74%	-6.3%
- Listrik, Air & Gas	-	-	-	-	-
- Konstruksi	6,213	5.62%	9,332	8.46%	50.2%
- Perdagangan	97,092	4.70%	111,094	5.16%	14.4%
- Angkutan	4,343	2.36%	6,858	3.85%	57.9%
- Jasa-jasa	5,291	1.84%	8,399	2.66%	58.7%
- Lainnya (konsumtif)	22,176	0.73%	30,627	0.98%	38.1%

Sumber: LBU/LBUS

Sementara itu dalam hal profitabilitas (tabel 3.10), bank umum di Sumbar pada triwulan I-2006 membukukan marjin bunga bersih (NIM) sebesar 2,28%, sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian NIM triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,69%.

Tabel 3.10. Perkembangan Profitabilitas Bank Umum

Keterangan	Posisi (miliaran rupiah)				
	Tw I-05	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06
Pendapatan Bunga	305.38	560.8	861.3	1,145.1	348.3
Beban Bunga	119.77	234.9	357.1	476.0	169.2
Rerata aktiva prod.	6,904.0	7,429.7	7,576.0	7,659.8	7,857.3
Aktiva Prod.	6,906.41	7,719.6	8,049.9	8,147.2	8,808.3
NIM	2.69%	4.39%	6.65%	8.74%	2.28%

Sumber: LBU/LBUS

3.1.1.5. Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan bank umum Sumbar pada triwulan I-2006 mencapai Rp5.779 miliar atau meningkat Rp170.8 miliar (3,05%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 3.11). Peningkatan kredit UMKM tertinggi terjadi pada kredit berskala menengah (5,44%), kemudian kredit berskala mikro (3,11%) dan kecil (1,41%).

Tabel 3.11. Distribusi Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Baki Debet

Keterangan	Posisi (miliar Rp)					Pangsa (%)		Pertumb. (%)	
	TwI-05	TwII-05	TwIII-05	TwIV-05	TwI-06	TwIV-05	TwI-06	TwIV-05	TwI-06
Mikro (s.d Rp50 jt)	2,789.3	2,815.3	3,002.6	3,068.5	3,163.8	40.04	40.27	2.19	3.11
Kecil (Rp50 - Rp500 jt)	1,326.7	1,518.7	1,529.6	1,556.4	1,578.4	20.31	20.09	1.75	1.41
Menengah (Rp500 jt - Rp5 M)	896.8	935.8	923.2	983.4	1,036.9	12.83	13.20	6.52	5.44
Total UMKM	5,012.8	5,269.9	5,352.9	5,608.2	5,779.0	73.18	73.56	4.77	3.05
Besar (>Rp5 M)	1,879.1	1,898.1	2,044.9	2,055.1	2,077.4	26.82	26.44	0.50	1.08

Sumber: LBU/LBUS

Pangsa UMKM bank umum di Sumbar mencapai 73,56% dari total kredit, sedikit lebih tinggi dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 73,18%. Berdasarkan kelompok baki debetnya, alokasi kredit terbesar disalurkan untuk usaha mikro dengan pangsa 40,27%. Sedangkan untuk kredit berskala besar (korporat) dialokasikan sebesar 26,44%.

Tabel 3.12. Sebaran Kredit dan NPLs UMKM Bank Umum menurut Sektor Ekonomi

Keterangan	Kredit UMKM		NPLs	
	Jumlah (Rp M)	Pangsa	Jumlah (Rp M)	Pangsa
Pertanian	309.44	5.35%	46.86	15.14%
Pertambangan	13.27	0.23%	9.53	71.80%
Industri	84.15	1.46%	5.61	6.67%
Listrik, Air & Gas	0.34	0.01%	-	-
Konstruksi	94.65	1.64%	9.33	9.86%
Perdagangan	1,715.18	29.68%	94.95	5.54%
Angkutan	171.83	2.97%	6.86	3.99%
Jasa-jasa	263.83	4.57%	8.40	3.18%
Lainnya (konsumtif)	3,126.36	54.10%	30.63	0.98%
TOTAL	5,779.05	100.00%	212.16	3.67%

Sumber: LBU/LBUS

Secara sektoral (Tabel 3.12), lebih dari setengah kredit UMKM masuk dalam sektor lainnya yang menampung penggunaan konsumtif (54,1%). Kemudian sisanya, sekitar dua pertiga dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,68%), dan sepertiganya lagi dibagi untuk tujuh sektor lainnya, mulai dari yang tertinggi

untuk sektor pertanian (5,35%) hingga yang terkecil untuk sektor listrik, air & gas (0,01%).

Kolektibilitas kredit UMKM masih tergolong rendah seperti terlihat dari rasio NPLs pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar 3,67% (tabel 3.12). Berdasarkan sektor ekonomi non konsumtif, persentase NPLs tertinggi dialami oleh sektor pertambangan (71,8%) sedangkan persentase terendah dialami oleh sektor jasa-jasa (3,18%).

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM di Sumatera Barat, Bank Indonesia Padang di tahun 2006 telah memprogramkan serangkaian kegiatan yang bersifat bantuan teknis dan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya mendorong penyaluran dan atau peningkatan kredit kepada UMKM. Selama triwulan I-2006, KBI Padang telah berpartisipasi dalam "Seminar Peluang dan Tantangan Bisnis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 2006" yang diselenggarakan di Bukittinggi pada tanggal 23 Januari 2006. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2006, BI Padang menggelar "Forum Komunikasi Lintas Pelaku dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi UMKM" di Muaro Sijunjung (selengkapnya lihat Boks).

3.1.2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sama halnya dengan bank umum, indikator-indikator kinerja BPR pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2005, seperti ditunjukkan oleh peningkatan asset, DPK dan kredit.

Total asset BPR di Sumbar pada triwulan I-2006 (s.d bulan Februari) mengalami peningkatan sebesar 0,13%, menjadi Rp430,86 miliar (Tabel 3.13). Pada periode yang sama, posisi penghimpunan dana BPR tercatat sebesar Rp283,52 miliar atau naik 0,1% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Seperti halnya bank umum, terdapat peningkatan deposito sebesar 0,69% yang disertai dengan penurunan tabungan sebesar 0,38%.

Sejalan dengan peningkatan DPK, kredit yang disalurkan BPR juga mengalami peningkatan sebesar 5,0%, menjadi Rp313,85 miliar di triwulan I-2006. Menurut lapangan usaha, peningkatan kredit dialami oleh hampir semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor perindustrian (20,31%), diikuti oleh sektor pertanian (6,43%) dan sektor perdagangan (5,65%).

Menurut jenis penggunaan, pertumbuhan kredit tertinggi dialami kredit investasi (5,93%), diikuti oleh kredit modal kerja (5,22%) dan kredit konsumsi (3,91%).

Tabel 3.13 Indikator Perkembangan BPR

(posisi dalam miliar rupiah)

Keterangan	2005				2006	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I *)	Pert.
Total Asset	362.87	377.82	390.86	430.29	430.86	0.13%
Penghimpunan Dana	254.14	262.76	264.26	283.25	283.52	0.10%
- Tabungan	137.17	143.54	142.03	157.32	156.72	-0.38%
- Deposito	116.97	119.22	122.23	125.93	126.80	0.69%
Penyaluran Kredit/Pembiayaan	268.47	286.50	303.41	298.91	313.85	5.00%
- Menurut Sektor Ekonomi						
Pertanian	29.15	29.94	31.78	31.79	33.83	6.43%
Perindustrian	7.29	7.80	7.75	7.30	8.79	20.31%
Perdag,Hotel& Restoran	125.10	134.12	143.93	142.81	150.88	5.65%
Jasa-jasa	44.82	45.43	47.57	44.25	44.64	0.88%
Lain-lain	62.11	69.21	72.38	72.76	75.71	4.06%
- Menurut Penggunaan						
Modal Kerja	180.67	193.39	207.51	204.43	215.10	5.22%
Investasi	34.37	30.41	30.27	28.67	30.36	5.93%
Konsumsi	53.43	62.70	65.63	65.82	68.39	3.91%
LDR	105.64%	109.03%	114.82%	105.53%	110.70%	
NPLs	9.03%	9.22%	9.46%	9.23%	9.52%	

Sumber: Laporan Bulanan BPR/BPRS

*) s.d bulan Februari 2006

Dengan laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK maka LDR BPR di Sumbar meningkat, dari 105,53% pada triwulan IV-2005 menjadi 110,70% pada triwulan I-2006. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi BPR telah berjalan dengan baik. Namun, peningkatan kredit tersebut disertai dengan penurunan kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah (NPLs) BPR secara umum mengalami sedikit peningkatan, yakni dari 9,23% menjadi 9,52%.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang diharapkan berperan banyak dalam pengembangan UMKM, kinerja BPR mendapat perhatian serius oleh Bank Indonesia Padang. Oleh karena itu pada tanggal 14 Maret 2006, Bank Indonesia Padang menyelenggarakan Coffee Morning BPR se-Sumbar dengan dua agenda utama, yaitu: 1) evaluasi kinerja BPR tahun 2005; dan 2) Perkembangan Lembaga APEX (selengkapnya lihat Boks).

3.2. Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah

Asesmen keuangan daerah dimaksudkan untuk mengkaji potensi sumber-sumber risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di daerah. Secara umum pada triwulan laporan, risiko-risiko yang dialami oleh sektor korporasi dan rumah tangga tidak menunjukkan perkembangan yang membahayakan. Sementara perbankan daerah mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat namun tetap mampu membukukan kinerja yang positif. Prospek keuangan daerah pada triwulan II-2006 diperkirakan tetap stabil didukung oleh penundaan kenaikan tarif dasar listrik dan tingkat bunga kredit yang dirasakan masih kondusif.

3.2.1. Asesmen Korporasi dan Rumah Tangga

Melewati situasi yang berat di triwulan IV-2005 akibat kenaikan biaya-biaya produksi sehubungan dengan peningkatan tajam harga BBM, kredit untuk sektor bisnis seperti ditunjukkan oleh kredit modal kerja dan kredit investasi masih tumbuh positif. Sejalan dengan itu, hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) menunjukkan situasi bisnis dan kondisi keuangan selama triwulan I-2006 relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV-2005. Dari sisi rumah tangga, penurunan daya beli masyarakat tercermin dari pertumbuhan kredit konsumsi yang relatif rendah. Kondisi ini didukung pula oleh hasil survei konsumen yang menunjukkan keyakinan dan ekspektasi konsumen pada triwulan I-2006 masih negatif (pesimis), akan tetapi relatif membaik dibandingkan triwulan IV-2005.

3.2.1.1. Risiko Kredit Korporasi

Kredit Investasi dan kredit modal kerja yang proyeknya berlokasi di Sumbar pada triwulan I-2006 tumbuh sebesar 0,25% dan 6,91%. Meskipun pertumbuhan kredit investasi hampir tidak signifikan tapi lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan kredit (-2,27). Sementara itu kredit modal kerja tumbuh hampir sama dengan triwulan sebelumnya (7,13%). Secara sektoral (tidak termasuk sektor lain-lain yang menampung kredit konsumtif dengan pangsa 34,74%), alokasi kredit terkonsentrasi pada empat sektor yaitu sektor perdagangan (22,04%), sektor listrik (13,18%), sektor industri (12,31%) dan sektor pertanian (11,17%).

Diantara tiga sektor dominan tersebut (kecuali untuk sektor listrik yang kreditnya disalurkan oleh bank yang berkantor di luar Sumbar), risiko terbesar berdasarkan rasio NPLs berada pada sektor pertanian dengan rasio NPLs 10,41%. Rasio NPLs sektor pertanian pada triwulan I-2006 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,28%. Sementara itu rasio NPLs pada sektor industri dan sektor perdagangan relatif terjaga masing-masing sebesar 4,74% dan 5,16%. Rasio NPLs pada sektor perindustrian menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,31%. Sebaliknya sektor perdagangan mengalami peningkatan rasio NPLs yang tercatat sebesar 4,70% pada triwulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), situasi bisnis selama triwulan I-2006 masih dirasakan positif oleh responden demikian pula halnya dengan kondisi keuangan. Bahkan angka saldo bersih tertimbang kegiatan usaha dan kondisi keuangan selama triwulan I-2006 masing-masing 8,87 dan 28,27, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2005 yang masing-masing sebesar 2,32 dan 16,59.

3.2.1.2. Risiko Kredit Rumah Tangga

Kredit konsumsi hanya tumbuh 2,20% sepanjang triwulan I-2006, relatif sama dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,09%. Pangsa kredit konsumsi mencapai 34,49% dari total kredit, sedikit masih lebih rendah dibandingkan dengan pangsa kredit modal kerja sebesar 37,01%. Dalam hal kolektibilitasnya, rasio NPLs kredit konsumsi tergolong rendah yaitu 0,95%. Berdasarkan hasil survei konsumen di tiga kota di Sumbar, sebagian besar responden di triwulan I-2006 belum akan melakukan pembelian barang tahan lama. Sementara itu indeks ekspektasi konsumen masih dibayangi rasa pesimis meskipun cenderung membaik, dari 91,83 di bulan Januari 2006 menjadi 96,83 di bulan Maret 2006. Demikian pula halnya dengan indeks keyakinan konsumen mengalami peningkatan dari 75,08 di bulan Januari 2006 menjadi 80,58 di bulan Maret 2006.

3.2.2. Asesmen Perbankan

Kondisi sektor perbankan Sumbar selama triwulan I-2006 menunjukkan masih cukup terjaganya stabilitas perbankan daerah di tengah tekanan laju inflasi yang tinggi serta tren suku bunga yang meningkat. Hal tersebut tercermin dari kemampuan perbankan daerah untuk membukukan kinerja yang positif walaupun mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat.

3.2.2.1. Risiko Kredit

Portofolio aktiva produktif bank umum di Sumbar terkonsentrasi pada kredit dengan alokasi sebesar 84,02%. Selanjutnya penempatan pada BI sebesar 10,67%. Penanaman pada SBI pada triwulan I-2006 mencatat peningkatan sebesar 99,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dalam hal kolektibilitas, rasio NPLs bank umum di Sumbar cenderung meningkat dari 3,73% di triwulan IV-2005 menjadi 4,0% di triwulan I-2006. Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPLs tertinggi dialami oleh kredit investasi sebesar 8,25%. Rasio tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,45%. Sedangkan NPLs kredit konsumsi relatif kecil yaitu sebesar 0,95%.

Persentase kredit UMKM di Sumbar mencapai 73,56% dari total kredit. Sekitar 54,1% kredit UMKM tergolong untuk kegiatan konsumtif. Sedangkan sisanya, terutama dialokasikan pada sektor perdagangan (29,68%). Rasio NPLs kredit UMKM relatif terkendali sebesar 3,67%. Secara sektoral, rasio NPLs UMKM tertinggi terjadi pada sektor pertambangan (71,80%) dan sektor pertanian (15,14%). Sementara itu, rasio NPLs untuk kredit perdagangan relatif kondusif, yaitu sebesar 5,54%.

Dengan kecenderungan suku bunga rata-rata kredit yang sedikit naik, dari 15,82% pada akhir triwulan IV-2005 menjadi 16,28% pada akhir triwulan laporan, kredit yang disalurkan di Sumbar masih tumbuh positif sebesar 3,31%.

3.2.2.2. Risiko Likuiditas

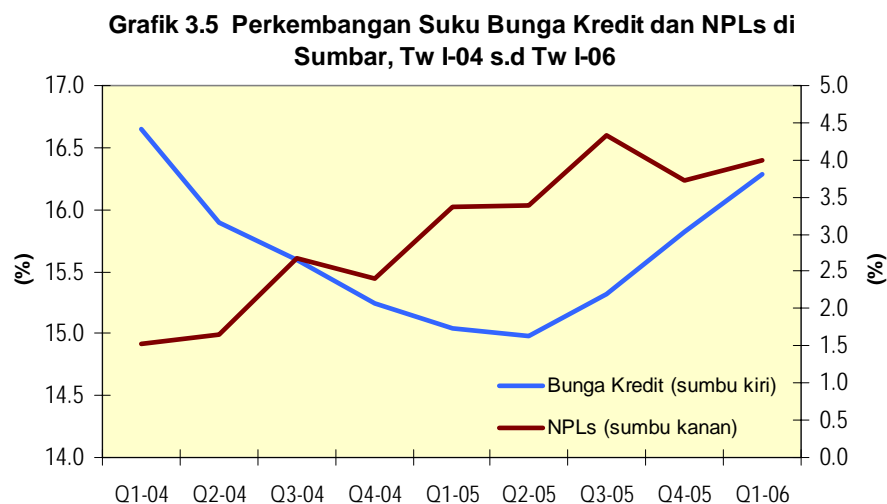
Struktur DPK bank umum di Sumbar menurut jenis simpanan menunjukkan tabungan memiliki pangsa terbesar (37,49%), kemudian deposito (34,18%) dan giro (28,34%). Dengan demikian struktur jenis simpanan bank umum di Sumbar bersifat lebih likuid. Meskipun demikian, perkembangan di triwulan laporan mengindikasikan adanya pengalihan (*shifting*) jenis simpanan dari tabungan

kepada deposito, tercermin dari terjadinya pertumbuhan deposito sebesar 11,83% di tengah penurunan tabungan sebesar 12,55%.

Dalam hal kepemilikan, 63,27% simpanan merupakan milik perorangan. Sementara itu pangsa nasabah perusahaan swasta dan BUMN hanya sebesar 3,58% dan 2,02% sedangkan pangsa pemerintah sebesar 5,51%. Menurut jangka waktunya, simpanan berjangka pada bank umum di Sumbar terkonsentrasi pada jenis deposito 1 bulan (64,47%). Dengan struktur simpanan tersebut, bank umum di Sumbar menghadapi risiko likuiditas yang relatif tinggi. Sementara itu, nisbah LDR Sumbar telah melebihi 100% yaitu mencapai 107,9% yang mencerminkan Sumbar telah memperoleh pembiayaan kredit yang berasal dari luar wilayahnya.

3.2.2.3. Risiko Pasar

Berdasarkan analisis grafis untuk melihat hubungan antara suku bunga kredit dengan rasio NPLs dalam periode triwulan I-2004 s.d triwulan I-2006 (Grafik 3.5), tidak terlihat adanya peningkatan NPLs sebagai akibat peningkatan suku bunga kredit. Bahkan sebaliknya pada periode triwulan I-2004 s.d triwulan II-2005, penurunan suku bunga kredit diikuti dengan peningkatan rasio NPLs. Sedangkan pada triwulan III-2005 dan triwulan I-2006, rasio NPLs dan suku bunga kredit sama-sama bergerak naik. Dengan demikian secara kasar dapat dikatakan bahwa risiko kredit berdasarkan NPLs tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga kredit.



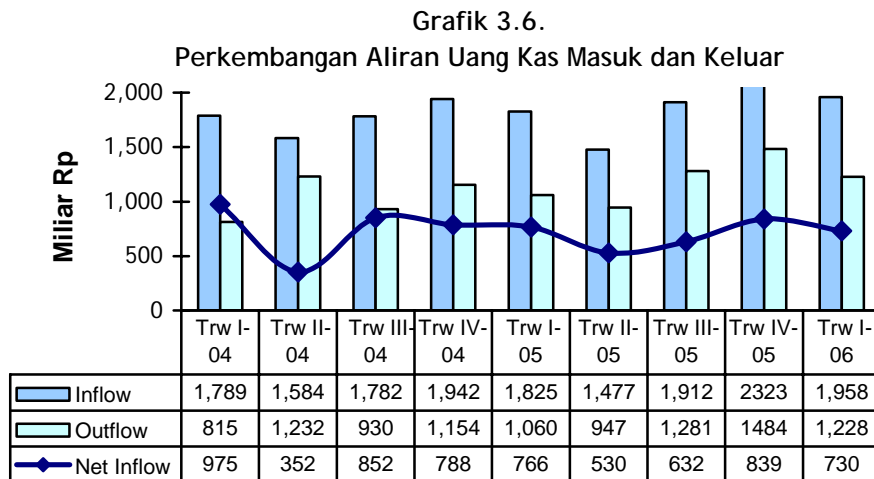
3.3. Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan memperlihatkan terjadinya penurunan transaksi baik untuk transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. Penurunan tersebut merupakan pola musiman sebagai penyesuaian atas tingginya transaksi pada triwulan IV-2005 terkait dengan bulan puasa dan perayaan hari-hari besar keagamaan.

3.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.

3.3.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

Selama triwulan I-2006, kegiatan transaksi tunai melalui Bank Indonesia Padang baik untuk aliran uang kas masuk (inflow) maupun kas keluar (outflow) mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 3.6). Aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (inflow) turun sebesar Rp365 miliar menjadi Rp1.958 miliar. Sementara itu, aliran uang kas keluar dari Bank Indonesia Padang (outflow) tercatat sebesar Rp 1.228 miliar atau terjadi penurunan sebesar Rp256 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Dengan demikian, terjadi aliran uang kas masuk bersih (net inflow) sebesar Rp730 miliar pada triwulan laporan, turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp839 miliar.

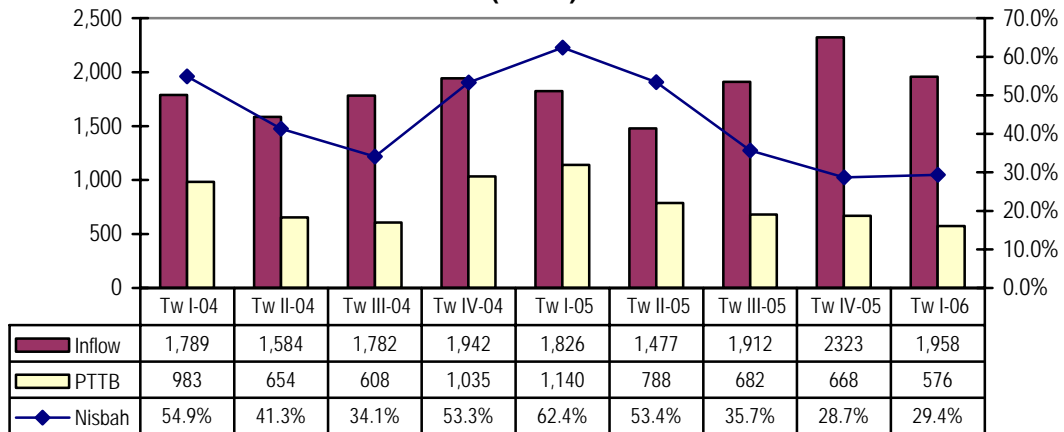


3.3.1.2. Pemusnahan Uang Tidak layak Edar (PTTB)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan terhadap uang yang sudah lusuh/rusak karena tidak layak lagi untuk diedarkan. Jumlah uang tidak

layak edar yang dimusnahkan selama triwulan laporan mencapai Rp576 miliar, sedikit lebih banyak dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp668 miliar (Grafik 3.7).

Grafik 3.7. Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)



Nisbah antara jumlah uang yang dimusnahkan dengan jumlah aliran uang masuk (inflow) pada Triwulan IV-2005 adalah sebesar 29,4% atau sedikit lebih tinggi dibandingkan nisbah triwulan IV-2005 sebesar 28,7%.

3.3.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu

Penemuan uang palsu yang dilaporkan masyarakat kepada BI Padang masih tergolong sangat kecil. Persentase nilai temuan uang palsu terhadap nilai uang kartal masuk (inflow) selama triwulan I-2006 sebesar 0,00025%, hampir sama dengan persentase temuan triwulan sebelumnya sebesar 0,0002%.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut mengurangi peredaran uang palsu serta untuk menerima masukan-masukan bagi perbaikan pelayanan pengedaran uang, Bank Indonesia Padang pada tanggal 18 Maret 2006 telah melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat di kota Payakumbuh.

3.3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai.

3.3.2.1 Perkembangan Kliring Lokal

Transaksi menggunakan kliring lokal wilayah KBI Padang dalam triwulan laporan mengalami penurunan baik volume maupun nominalnya. Volume kliring

turun 4,7% menjadi 158,8 ribu lembar dengan nilai transaksi yang juga menurun 12,6% menjadi Rp3.135,6 miliar (Tabel 3.14). Bila dilihat secara rata-rata harian, warkat kliring yang berhasil diproses pada triwulan I-2006 tercatat sebanyak 2.561 lembar warkat per hari dengan rata-rata nilai transaksi per harinya mencapai Rp50,6 miliar.

Tabel 3.14 Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Keterangan	2005				2006	
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Pert.
Perputaran Kliring						
- Volume (lembar)	160,438	161,213	176,707	166,567	158,752	-4.7%
- Nominal (miliar rp)	3,131.9	3,174.4	3,533.4	3,586.5	3,135.6	-12.6%
Rata-rata Harian Perputaran Kliring						
- Volume (lembar)	2,719	2,600	2,761	2,776	2,561	-7.8%
- Nominal (miliar rp)	53.1	51.2	55.2	59.8	50.6	-15.4%
Penolakan Cek/BG Kosong						
- Volume (lembar)	1,347	2,052	1,916	1,651	1,408	-14.7%
- Nominal (miliar rp)	16.4	27.7	24.4	26.4	21.3	-19.2%

Sementara itu penolakan cek/BG yang kosong selama triwulan laporan juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Warkat Cek/BG kosong turun sebanyak 14,7%, dari 1.651 lembar menjadi 1.408 lembar. Sementara nilai transaksi Cek/BG kosong tersebut mengalami penurunan 19,2%, dari Rp26.4 miliar menjadi Rp21.3 miliar.

3.3.2.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Perkembangan transaksi menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang pada triwulan I-2006 menunjukkan penurunan volume dan nilai transaksi masuk (in-flow), sementara untuk transaksi keluar (out-flow) hanya volumenya yang menurun sedangkan nilai transfernya meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Untuk transfer masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, nilai transaksi turun sebesar 10,15% menjadi Rp7.797,5 miliar dengan penurunan volume tranfer 11,74% menjadi 4.954 transaksi. Sementara untuk transfer keluar dari Sumbar, nilai transaksi meningkat sebesar 15,28% menjadi Rp10.369 miliar namun terjadi penurunan volume transaksi sebesar 9,18% menjadi 7.159 transaksi.

Tabel 3.15 Perkembangan Transaksi BI-RTGS Wilayah KBI Padang

Uraian	2005				2006	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Pert.
Transaksi Masuk (inflow) :						
- Volume (transaksi)	4,134	4,708	5,355	5,613	4,954	-11.74%
- Nominal (miliar Rp)	6,344.2	7,034.3	9,419.8	8,678.8	7,797.5	-10.15%
Transaksi Keluar (outflow)						
- Volume (transaksi)	6,803	6,991	7,493	7,883	7,159	-9.18%
- Nominal (miliar Rp)	6,482.7	7,520.0	7,692.0	8,995.0	10,369.3	15.28%

PERTEMUAN TAHUNAN PERBANKAN 2006 BANK INDONESIA PADANG DENGAN MITRA STRATEGIS

PENDAHULUAN

Pertemuan Tahunan Perbankan 2006 pada tanggal 27 Januari 2006, diawali dengan pembacaan Pidato Gubernur Bank Indonesia (GBI), Bp. Burhanuddin Abdullah, oleh Pemimpin Bank Indonesia Padang (PBI), Bp. C.Y. Boestal, serta sambutan dan pemaparan dari beberapa undangan. Selain buku Pidato Gubernur Bank Indonesia, KBI Padang juga berkesempatan menyampaikan *supplement* berupa buku Ringkasan Eksekutif Perkembangan Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2005. *Supplement* tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada undangan mengenai kondisi ekonomi Sumatera Barat. Acara selengkapnya, secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. PEMBACAAN PIDATO GUBERNUR BANK INDONESIA



PBI Padang, Bp. C.Y Boestal saat membacakan Pidato Gubernur Bank Indonesia

Pada kesempatan pertama, Pemimpin Bank Indonesia Padang membacakan Pidato Gubernur Bank Indonesia dengan tema "Mengelola Industri Perbankan Dalam Dinamika Baru Perekonomian Indonesia" (lihat boks Cuplikan Pidato Sambutan Gubernur BI pada acara Pertemuan Tahunan Perbankan 2006).

A. SAMBUTAN KADIN PROV. SUMATERA BARAT

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kadin Provinsi Sumatera Barat, yang mewakili dunia usaha, antara lain :

- Kadin Sumatera Barat terdiri dari 15 bidang, termasuk diantaranya adalah Bidang Reformasi Keuangan dan Perbankan. Reformasi disini adalah guna mengajak perbankan untuk bisa sama-sama membiayai dunia usaha di Sumatera Barat.
- Sebagaimana informasi dari Pemimpin Bank Indonesia Padang, LDR di Sumatera Barat lebih dari 100% yang berarti terjadi kekurangan dana pada perbankan di Sumatera Barat. Namun demikian masih ditemui kendala pada beberapa sektor usaha.

- Masalah yang sering muncul adalah calon debitur belum memiliki catatan keuangan yang memadai sehingga belum dapat disetujui kreditnya walaupun sebenarnya usahanya cukup prospektif. Belum lagi masalah klasik yaitu jaminan yang juga menjadi alasan bagi perbankan untuk menolak permohonan kredit dunia usaha.
- Kami berharap dapat dilakukan pertemuan lanjutan antara Perbankan dengan Dunia Usaha guna membahas permasalahan yang ada khususnya masalah yang terkait dengan pengajuan kredit.
- Ke depan, Kadin juga berharap agar terjalin kerjasama yang baik antara perbankan dengan dunia usaha di Sumatera Barat sehingga perekonomian Sumatera Barat, khususnya dunia usaha, dapat berkembang dengan baik.

B. PRESENTASI RENCANA PENELITIAN EKONOMI TAHUN 2006 OLEH FE UNIV. ANDALAS

- Di tahun 2006, BI memfasilitasi pembentukan Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD) dengan tujuan untuk mendorong lembaga perbankan sebagai motor penggerak perekonomian daerah dalam kerangka otonomi daerah menghadapi era globalisasi.
- Para peneliti LRPD berasal dari akademisi di daerah yang merupakan cikal bakal lembaga riset yang pembiayaannya berasal dari perbankan sebagai user hasil penelitian.
- Untuk tahun 2006, setelah melakukan diskusi dengan perbankan di Sumatera Barat, LRPD memperoleh 3 judul penelitian yang telah diajukan ke DPNP BI Jakarta, yaitu : (1) Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Konvensional VS Bank Syariah; (2) Studi Prospek dan Peningkatan Peran BPR dalam Pengembangan UMKM di Sumatera Barat; (3) Optimalisasi Peran BPR dalam Menggerakkan Ekonomi Rakyat Sumatera Barat.
- Tujuan dari penelitian (1) yaitu : identifikasi dan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan antara bank konvensional dan/atau bank syariah di Sumatera Barat; untuk mengetahui implikasi dasar pemilihan (preferensi) lembaga perbankan oleh konsumen (konvensional versus syariah).
- Tujuan dari penelitian (2) yaitu : peranan dan prospek BPR dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM; strategi pengembangan BPR dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan UMKM di daerah

- Tujuan dari penelitian (3) yaitu : identifikasi & analisis permasalahan BPR di daerah; analisis kontribusi BPR terhadap perkembangan perekonomian daerah; identifikasi faktor sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan BPR.
- Selain itu, di tahun 2006 KBI Padang juga merencanakan untuk melakukan penelitian bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (FE Unand).
- 2 judul penelitian yang telah dipersiapkan dan akan diajukan ke Bank Indonesia Padang yaitu (1) Peranan Perbankan dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Sumatera Barat; (2) Percepatan Pelaksanaan Skim Penjamin Kredit Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat.

C. PRESENTASI WALIKOTA PADANG



Sambutan & presentasi Walikota Padang, Bp. Fauzi Bahar

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Padang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada perbankan kota Padang yang telah berpartisipasi dalam menyediakan becak motor sampah tahun 2005 yang lalu. Becak motor tersebut sangat membantu petugas kebersihan dalam mengambil dan mengangkut sampah di rumah-rumah

penduduk yang tidak terjangkau truk sampah. Di tahun 2005, kota Padang memperoleh penghargaan ranking pertama dari Wakil Presiden sebagai kota yang telah siap menghadapi lomba Kota Bersih Tingkat ASEAN. Keberhasilan tersebut tidak lepas karena adanya partisipasi dari pihak perbankan. Selanjutnya, Walikota Padang juga menyampaikan presentasinya mengenai Program Kebersihan Kota Melalui Penyediaan Gantungan Sampah. Beberapa hal yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- Ide penyediaan gantungan sampah muncul dikarenakan adanya beberapa pemukiman yang tidak memungkinkan untuk dibuat bak sampah. Pada pemukiman tersebut, biasanya sampah rumah tangga digantung di pagar-pegar rumah, di batang pohon atau diletakkan begitu saja di tanah.
- Gantungan sampah yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota Padang ini, nantinya dapat menampung sekitar 20 kantong/tas plastik sampah,

dan akan diambil pada jam-jam tertentu oleh petugas kebersihan kota.

- Saat ini sudah tersedia 100 unit gantungan sampah sumbangan dari beberapa instansi. Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan 1 unit gantungan sampah sekitar Rp350.000,-.
- Rencananya ide gantungan sampah ini akan di *launching* oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam waktu dekat ini. Adanya program penyediaan gantungan sampah ini, Kota Padang dijadikan sebagai percontohan oleh pemerintah pusat dalam penanggulangan sampah kota.
- Untuk itu Walikota sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi perbankan di Kota Padang untuk dapat menjadi sponsor pengadaan gantungan sampah tersebut. Bank yang menjadi sponsor dapat menampilkan logo bank-nya pada gantungan sampah tersebut dan dibebaskan dari pajak reklame/iklan. Dengan demikian tercipta kerjasama yang saling menguntungkan.
- Selanjutnya, Walikota Padang juga menyampaikan program mengenai zakat di Kota Padang. Sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang Pemungutan Zakat, pemerintah Kota Padang akan menampung zakat dari pegawai pada perusahaan/dinas/instansi yang berada di Kota Padang. Untuk awalnya, penampungan zakat hanya di lingkungan pemko Padang yang saat ini telah terkumpul sebanyak Rp160 juta. Apabila seluruh perusahaan/dinas/instansi yang berada di Kota Padang menitipkan zakatnya kepada Pemko Padang, maka akan terkumpul dana sebesar Rp12 miliar, suatu jumlah yang sangat besar guna menanggulangi kemiskinan di Kota Padang.

D. SAMBUTAN DPRD SUMATERA BARAT

Beberapa hal yang disampaikan oleh DPRD Sumatera Barat, yang mewakili pihak legislatif, antara lain :

- Sebagai unsur legislatif, kami berharap agar perbankan dapat bekerjasama dengan pemerintah kota dan provinsi dalam membangun Sumatera Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Selanjutnya, kami berharap agar perbankan mempermudah urusan apabila masyarakat, terutama UMKM, mengajukan pinjaman dana. Sehingga yang tadinya "*unfriendly*" menurut penelitian akademisi menjadi "*friendly*".

- Bank Indonesia, beberapa bulan yang lalu, telah melakukan sosialisasi mengenai skim penjaminan yang melibatkan pemerintah daerah juga DPRD. Pada beberapa pola, dana APBD dialokasikan sebagai jaminan terhadap dana yang disalurkan perbankan sebagai pelaksanaan program pemda. Hal tersebut dapat mengisyaratkan bahwa pemda telah berpartisipasi secara nyata dalam mengembangkan UMKM. Tentunya penyaluran dana tersebut jangan terkesan sebagai dana bantuan yang tidak perlu dikembalikan oleh masyarakat.
- Kami juga berharap BPD Sumatera Barat, sebagai tuan rumah di Sumatera Barat, dapat lebih berperan dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi Sumatera Barat. Jangan sampai BPD sebagai "Bank Pegawai Daerah" namun benar-benar sebagai "Bank Pembangunan Daerah".
- Kepada pemerintah daerah Sumatera Barat, kami juga berharap dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun insentif dan penyediaan sarana prasarana.

E. SAMBUTAN WAKAPOLDA SUMATERA BARAT

Beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat, yang mewakili pihak keamanan, yaitu :

- Faktor keamanan memang suatu hal yang sangat penting, tidak hanya bagi dunia usaha tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Sebagai contoh program Walikota Padang untuk menyediakan gantungan sampah, itu juga merupakan aset yang harus diamankan agar tujuan kebersihan kota tercapai.
- Kami sebagai pelayan dan pengayom masyarakat jangan sampai justru merugikan masyarakat. Kita tidak ingin kejadian di Jakarta beberapa waktu yang lalu, yaitu seorang anggota Brimob yang ditugaskan mengawal pengambilan uang client, justru menjadi tersangka dalam kasus perampokan uang tersebut, terjadi di Sumatera Barat.
- Kami disini (Sumatera Barat) sangat keras dan tegas kepada anggota untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa minggu yang lalu kami mendapat surat perintah untuk melakukan pengawalan uang dari Padang ke Pekanbaru, saya sendiri yang memberikan pengarahan agar anggota bekerja dengan baik, disiplin, dan saya minta Kartu Tanda Anggota (KTA) Brimob yang melakukan pengawalan, sebagai jaminan.

- Dalam forum ini, kami juga mengajak dan menghimbau kalangan perbankan dan masyarakat untuk memanfaatkan jasa kepolisian dalam mengambil atau menyetorkan uang yang mungkin dapat menjadi incaran/objek kejahatan.
- Kami juga mendukung program pemerintah dalam pemberantasan maksiat di Kota Padang dan pemberantasan *illegal logging* di Sumatera Barat. Saat ini sudah ada 35 berkas perkara *illegal logging* yang kami sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- Pada kesempatan ini, kami berharap agar gedung-gedung di Kota Padang dan kota lainnya, baik perkantoran maupun tempat usaha, dapat dilengkapi dengan CCTV. Untuk gedung Bank Indonesia Padang, sarana CCTV sudah cukup baik. Hal ini sangat membantu kami apabila terjadi kasus atau peristiwa kriminal/kejahatan. Sebagai contoh dalam kasus pengeboman JW Marriot dan Kedutaan Australia. Pelaku dapat diungkap dengan bantuan CCTV di gedung-gedung sekitarnya.

F. RANGKUMAN DAN KATA PENUTUP OLEH WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT



Wakil Gubernur Sumbar menyampaikan rangkuman dan sekaligus menutup acara

Mewakili Gubernur Sumatera Barat yang berhalangan hadir, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bpk. Marlis Rahman, menyambut baik adanya pertemuan tahunan perbankan tahun ini yang melibatkan pihak pemerintah daerah, DPRD dan dunia usaha. Wakil Gubernur Sumbar juga berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi

Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumbar merangkum dan menyampaikan beberapa hal :

- Pertemuan-pertemuan seperti ini, yang melibatkan pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha, sangat kami harapkan dapat terlaksana secara rutin setiap 6 bulan sekali.
- Pemerintah daerah menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan di Sumatera Barat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari semua pihak, termasuk perbankan, agar program-program kerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat terlaksana.

- Perlu kita ketahui bersama, bahwa jumlah keluarga miskin di Sumatera Barat tahun ini bertambah jumlahnya dari tahun kemarin. Hal ini menjadi tantangan sekaligus perhatian bagi kita semua.
- Sebagaimana diungkapkan oleh DPRD tadi, bahwa kita ingin membangun Sumatera Barat dari 3 sisi yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiga sisi tersebut saling terkait satu sama lain. Untuk pendidikan, pemda Sumatera Barat telah menaikkan anggaran pendidikan dalam APBD. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.
- Sementara itu, sektor pertanian yang merupakan porsi terbesar dalam struktur PDRB Sumatera Barat, dirasakan belum dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Saat ini 1 keluarga petani rata-rata hanya memiliki 0,3 Ha lahan. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah khususnya dan kita bersama pada umumnya, agar para petani ini dapat meningkat kesejahteraannya.
- Di bidang perbankan, pemerintah daerah sangat berharap perbankan mau dan lebih besar menyalurkan kreditnya, terutama di sektor UMKM. Hal-hal yang dirasa masih menjadi kendala, seperti jaminan, agar dilakukan komunikasi dan diskusi intensif dengan dunia usaha, dalam hal ini Kadin Sumbar.
- Akhir kata, semoga pertemuan ini dapat kembali dilaksanakan untuk membahas hal-hal lain yang lebih rinci dan untuk menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang ada, demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



Walikota Padang, Wagub Sumbar, PBI Padang dan anggota DPRD Sumbar sedang berbincang-bincang sebelum acara dimulai.



Suasana Pertemuan Tahunan Perbankan 2006 yang berjalan dengan khidmat, akrab dan penuh harapan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

FORUM KOMUNIKASI LINTAS PELAKU DALAM RANGKA MENGKALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI UMKM

Berangkat dari fakta masih banyak pihak perbankan daerah ataupun instansi Pemda terkait yang belum memahami fungsi Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Konsultan Keuangan/ Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) Sumatera Barat dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UMKM, Bank Indonesia Padang mennggelar Forum Komunikasi Lintas Pelaku dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi UMKM di Gedung Pancasila, Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Maret 2006. Forum ini dibuka oleh Pemimpin Bank Indonesia Padang, C.Y. Boestal yang dihadiri pula oleh Bupati Sawahlunto/ Sijunjung, Darius Apan serta melibatkan peserta dari unsur perbankan daerah, Pemda dan dinas terkait yang berasal dari empat kabupaten (Sawahlunto/Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan) dan dua kota (Sawahlunto dan Solok) di Sumatera Barat.



Pemimpin BI Padang, C.Y. Boestal tengah memberikan sambutan sekaligus membuka Forum Komunikasi Lintas Pelaku di Muaro Sijunjung tgl. 29 Maret 2006

Dalam sambutannya, Pemimpin BI Padang menjelaskan bahwa UMKM berperan besar dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengembangkan usaha mikro potensial. Atas dasar potensi dan kondisi UMKM tersebut, Menko Kesra selaku ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Gubernur Bank

Indonesia telah menandatangani MoU mengenai upaya penganggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada tanggal 22 April 2002. MoU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan KKMB tingkat nasional oleh Sekretaris KPK dan Deputi Gubernur BI pada tanggal 22 Februari 2003. Beberapa bulan kemudian terbentuk pula Satgasda KKMB Sumatera Barat. Pembentukan Satgas bertujuan untuk memberdayakan KKMB dalam rangka meningkatkan daya serap UMKM terhadap kredit perbankan, yang saat ini akses pengusaha UMKM masih dinilai terbatas. Dalam perjalanannya, Satgasda KKMB Sumbar telah menyelenggarakan pelatihan kepada 30 Business Development Service Provider (BDSP), lokakarya, rapat-rapat koordinasi, monitoring dan termasuk forum komunikasi lintas pelaku yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Untuk

pengembangan UMKM ke depan, Pemimpin BI Padang menghimbau bank untuk menambah jaringan kantor banknya di daerah sehingga dapat mempermudah akses pengusaha UMKM terhadap layanan perbankan. Selain itu diharapkan pula KKMB dapat berperan lebih aktif dengan dukungan Satgasda serta perhatian dari Pemda setempat. Peran aktif tersebut antara lain dengan menggali potensi dan mencari produk unggulan di kabupaten/kota yang dapat dikembangkan baik secara teknis melalui jasa pembinaan KKMB ataupun secara keuangan melalui pembiayaan oleh bank yang telah difasilitasi oleh KKMB.



Pemimpin BI Padang, C.Y. Boestal (kedua dari kiri) beserta Bupati Sawahlunto/ Sijunjung (paling kiri) dan narasumber lainnya tengah mendengarkan secara seksama tanggapan dari para peserta forum komunikasi.

Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Darius Apan dalam sambutannya menyambut baik atas terselenggaranya forum komunikasi ini mengingat sektor UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi kerakyatan yang mempunyai peranan, potensi dan kedudukan yang strategis dalam menunjang perekonomian. Pemda Sawahlunto/ Sijunjung melalui APBD tahun 2002 dan 2003 telah mengalokasikan dana tetap untuk membantu

pembiayaan UMKM. Program pinjaman penguatan modal UMKM tersebut dikelola oleh kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari dinas teknis terkait di bidang ekonomi dan bank komersial dengan memberikan tingkat bunga lunak sebesar 6% pertahun untuk jangka waktu pinjaman selama 3 tahun. Program pinjaman bergulir tersebut berjalan sampai dengan sekarang dan telah melayani 637 nasabah UMKM serta menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 423 orang.

Forum komunikasi yang berlangsung sehari ini kemudian menghasilkan pula beberapa butir rekomendasi, sebagai berikut :

- Forum ini hanya langkah awal dalam menggali dan mengoptimalkan potensi UMKM dan perlu ditindaklanjuti dengan forum yang bersifat lebih teknis/mikro.
- Pendekatan komoditi unggulan masih perlu diintegrasikan, begitu pula halnya dengan usaha UMKM yang saat ini cenderung tersebar sebaiknya dapat terkonsentrasi pada suatu kawasan untuk memudahkan akses perbankan.
- Pengembangan UMKM memerlukan sinergi antara pihak-pihak terkait sehingga dapat menjadi lebih terarah.
- Peranan KKMB Kabupaten/Kota harus terus dimonitor oleh Pemda setempat.
- Kepada perbankan, baik bank umum maupun BPR dan pihak yang terkait dengan KKMB agar dapat berperan sebaik-baiknya dan membuka diri terhadap berbagai input/masukan yang berkembang.

COFFEE MORNING BANK INDONESIA DENGAN BPR SE-SUMATERA BARAT: EVALUASI PERKEMBANGAN KINERJA DAN LEMBAGA APEX

Coffee Morning kembali digelar di aula KBI Padang pada hari Selasa, 14 Maret 2006, kali ini Bank Indonesia bersilaturahmi dengan BPR se-Sumatera Barat. Acara yang dibuka oleh Pemimpin BI Padang, C.Y. Boestal ini dihadiri oleh sebanyak 93 direksi BPR dari 103 BPR di Sumatera Barat, juga dihadiri oleh direktur utama BPD



PBI Padang, C.Y. Boestal (tengah) didampingi oleh Koorbid, Achmad Fauzie (kiri) dan Dirut BPD Sumatera Barat, Nazwar Nazir (kiri)

Sumatera Barat, Nazwar Nazir. Tujuan dari coffee morning kali ini, selain untuk meningkatkan komunikasi Bank Indonesia dengan stakeholders (BPR-red), juga sebagai ajang silaturahmi antar BPR se-Sumatera Barat.

Terdapat dua agenda penting dalam acara coffee morning kali ini, pertama adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kinerja BPR se-Sumatera Barat selama tahun 2005 dan kedua adalah perkembangan lembaga APEX Sumatera Barat. Pengawas Bank Senior (PBS) KBI Padang, Zalfitri mengawali acara dengan mempresentasikan perkembangan kinerja BPR dan lembaga APEX. BPR Sumatera Barat sebagai ujung tombak perekonomian di daerah terutama untuk usaha mikro dan kecil, selama tahun 2005 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh total aset yang meningkat sebesar 21,25%, kredit sebesar 21,16%, DPK sebesar 13,64% dan Loan to Deposit Ratio per Desember 2005 mencapai sebesar 105,54%. Sampai dengan bulan Desember 2005, tercatat 78 BPR berpredikat sehat, 8 BPR cukup sehat, 9 BPR kurang sehat, dan 2 BPR tidak sehat. PBS dalam presentasinya juga mengingatkan kepada manajemen BPR agar memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kelemahan tata kerja & pengawasan, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, praktek perbankan yang tidak sehat, dan tindak lanjut atas kasus yang terjadi.

Sementara itu, dalam penjelasan mengenai lembaga APEX, dikemukakan bahwa adanya lembaga APEX, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BPR dan meningkatkan citra yang kuat bagi industri BPR, sehingga kepercayaan masyarakat juga meningkat. Lembaga APEX mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan BPR, oleh karena itu bank yang ditunjuk sebagai Lembaga APEX seyogianya memiliki kriteria yang diyakini bahwa bank Leader tersebut mampu melaksanakan perannya, sehingga penguatan daya saing BPR melalui pembentukan lembaga jasa bersama sebagaimana butir program penguatan struktur perbankan nasional dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dapat terlaksana.



Dari kiri ke kanan, Zalfitri (PBS), Nazwar Nazir (Dirut BPD Sumbar), C.Y. Boestal (PBI Padang), Dasril Munir (Ketua Perbarindo Sumbar), Nazarudin Azis (sekretaris Perbarindo Sumbar), Achmad Fauzie (Koorbid Padang) berfoto bersama se usai penandatanganan kesepakatan.

Pada kesempatan ini, Pemimpin BI Padang, C.Y. Boestal meminta komitmen dari Perbarindo Sumatera Barat sebagai asosiasi BPR Sumbar turut berperan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BPR-BPR anggota Perbarindo. Selain itu, disepakati juga mengenai penunjukan leader APEX Sumatera Barat yaitu BPD Sumatera Barat.

Kesepakatan ini ditandatangani antara Perbarindo Sumatera Barat dan BPD Sumatera Barat, disaksikan oleh Pemimpin BI Padang, Koordinator Bidang dan Pengawas Bank Senior KBI Padang.

BAB 4

KEUANGAN DAERAH

4.1 APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2006

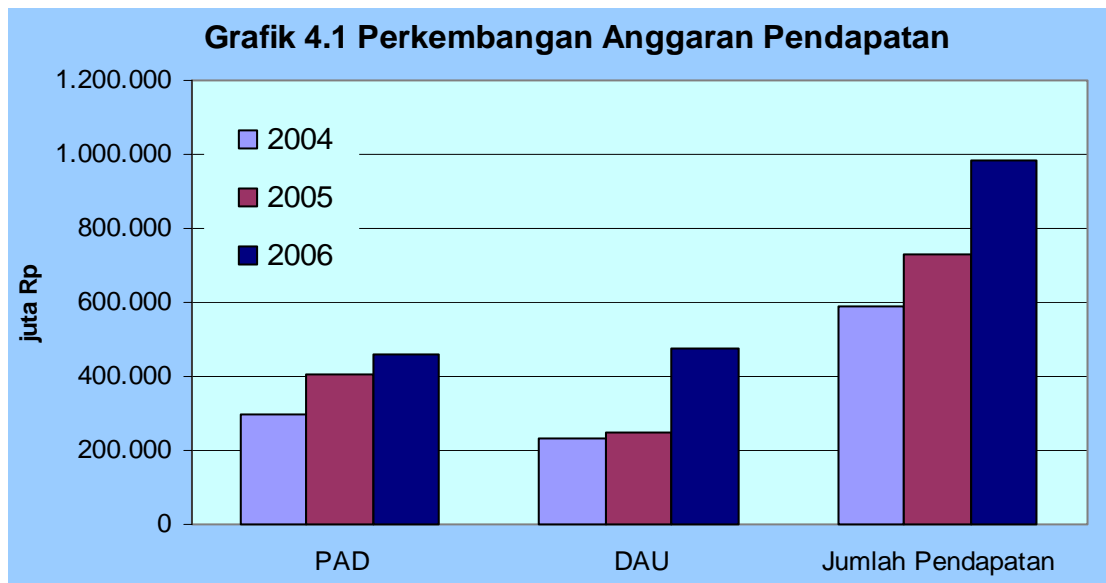
Melalui Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 1 Tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat No.04/KEP.PIMP/2006 tanggal 23 Maret 2006, telah ditetapkan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2006, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp985,15 miliar dan belanja sebesar Rp1.014,24 miliar dengan defisit sebesar Rp29,09 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp51,09 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp22,00 miliar dengan defisit sebesar Rp29,09 miliar.

4.2 Anggaran Pendapatan Daerah

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pos pendapatan pada APBD tahun 2006 ini mengalami peningkatan sebesar 35,08% yaitu dari Rp729,29 miliar menjadi Rp985,15 miliar. Berbeda dengan tahun 2005, komposisi pada pos pendapatan di tahun 2006 lebih banyak berasal dari pos Dana Perimbangan dengan porsi sebesar 53,53%, sementara porsi pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 46,41%, sedangkan sisanya merupakan pos lain-lain pendapatan yang sah dengan porsi sebesar 0,05%. Dengan pergeseran komposisi ini, tampak bahwa anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengandalkan dropping dana dari pemerintah pusat.

Secara nominal pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp457,26 miliar atau naik 12,49% dari tahun 2005, sedangkan dana perimbangan sebesar Rp527,36 miliar atau naik 75,14% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pendapatan Sumatera Barat mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp477,03 miliar dengan porsi sebesar 48,42% dari total pendapatan, dan pajak daerah sebesar Rp384,64 miliar dengan porsi sebesar 39,04%. Angka DAU tahun 2006 tersebut meningkat hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp247,49 miliar. Sementara itu, penerimaan daerah dari pajak daerah hanya meningkat 15,13% dari tahun sebelumnya.

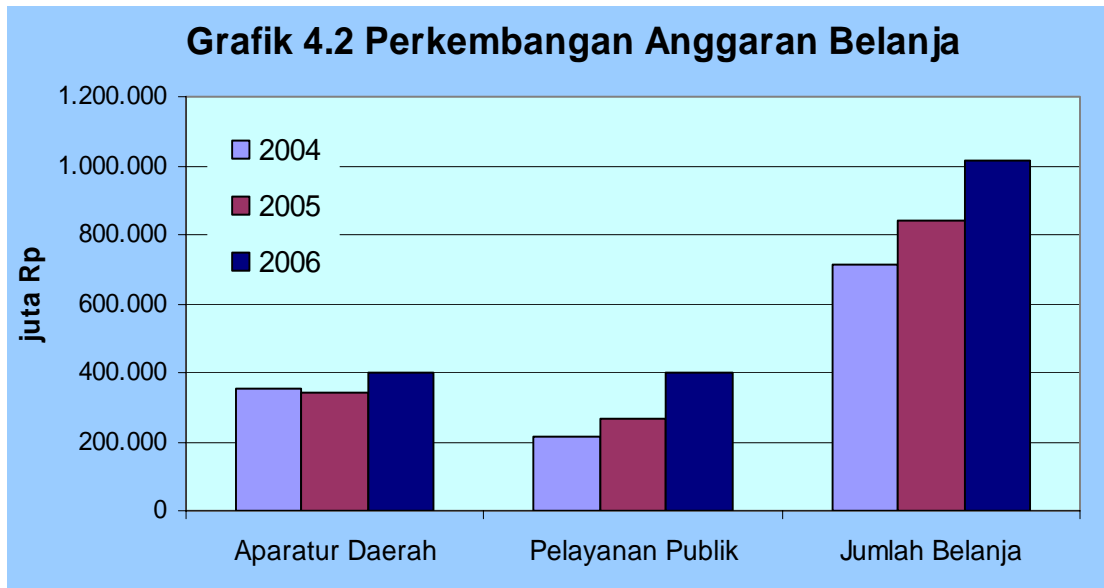
Pos pendapatan daerah yang relatif tidak berubah adalah retribusi daerah yang hanya dianggarkan meningkat sebesar 0,91% dari tahun sebelumnya, atau dari Rp7,78 miliar menjadi sebesar Rp7,85 miliar. Pada pos lain-lain pendapatan asli daerah dianggarkan meningkat 3,31% menjadi Rp40,22 miliar. Fenomena yang cukup menarik adalah berkurangnya kemampuan perusahaan milik daerah memperoleh laba dibandingkan tahun 2005. Hal ini tampak dari pos bagian laba usaha daerah yang dianggarkan turun dari Rp25,71 miliar menjadi Rp24,55 miliar, atau turun sebesar 4,54%.



4.3 Anggaran Pengeluaran/Belanja Daerah

Sementara itu dari sisi belanja/pengeluaran tahun 2006, diperkirakan meningkat sebesar 20,33% dari Rp842,87 miliar menjadi Rp1.014,24 miliar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada pos pengeluaran tahun 2006 antara belanja aparatur daerah dengan belanja pelayanan publik relatif seimbang. Belanja/pengeluaran pada pos aparatur daerah sebesar Rp401,59 miliar dengan porsi sebesar 39,59% dari total belanja, sedangkan belanja pelayanan publik sebesar Rp400,68 miliar dengan porsi sebesar 39,51%. Dilihat dari peningkatannya, belanja pelayanan publik meningkat lebih besar dari belanja aparatur daerah, yaitu naik sebesar 50,58% dari tahun sebelumnya, sementara belanja aparatur daerah hanya meningkat sebesar 17,59%.

Dilihat dari komposisi pada pos aparatur daerah, sebagian besar teralokasikan pada belanja administrasi umum sebesar Rp321,64 miliar, yang terdiri dari belanja pegawai/personalia sebesar Rp252,66 miliar, belanja barang & jasa sebesar Rp35,41 miliar, belanja perjalanan dinas sebesar Rp18,31 miliar, dan belanja pemeliharaan sebesar Rp15,26 miliar. Selanjutnya pos belanja operasi & pemeliharaan sebesar Rp66,64 miliar, dan pos belanja modal sebesar Rp13,30 miliar.



Sementara komposisi pada pos Pelayanan Publik, terbesar teralokasikan pada pos belanja bagi hasil & bantuan keuangan sebesar Rp202,60 miliar, disusul pos belanja modal sebesar Rp197,34 miliar, pos belanja administrasi umum sebesar Rp90,84 miliar, pos belanja operasi & pemeliharaan sebesar Rp112,50 miliar, dan sisanya pada pos belanja tidak tersangka sebesar Rp9,37 miliar.

Dengan pendapatan dan belanja seperti disebutkan di atas maka APBD Sumatera Barat tahun anggaran 2006 mengalami defisit sebesar Rp29,09 miliar atau turun 74,39% dibandingkan perkiraan defisit tahun 2005 yang mencapai Rp113,58 miliar. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diharapkan berasal dari penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp51,09 miliar dikurangi dengan pengeluaran daerah untuk penyertaan modal sebesar Rp22,00 miliar, sehingga akan diperoleh surplus sebesar Rp29,09 miliar.

Tabel 4.1.
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2006

dalam juta rupiah

URAIAN	APBD 2005		APBD 2006		Perubahan 2006/05 (%)
	Nominal	Porsi (%)	Nominal	Porsi (%)	
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	406,503.75	55.74	457,256.11	46.41	12.49
Pajak Daerah	334,075.00	45.81	384,635.00	39.04	15.13
Retribusi Daerah	7,781.17	1.07	7,852.18	0.80	0.91
Bagian Laba Usaha Daerah	25,714.28	3.53	24,548.00	2.49	-4.54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	38,933.30	5.34	40,220.93	4.08	3.31
Dana Perimbangan	301,104.02	41.29	527,357.00	53.53	75.14
Bagi Hasil Pajak	49,026.98	6.72	48,213.00	4.89	-1.66
Bagi Hasil Bukan Pajak	4,587.04	0.63	2,115.00	0.21	-53.89
Dana Alokasi Umum	247,490.00	33.94	477,029.00	48.42	92.75
Dana Alokasi Khusus	-	0.00	-	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	21,677.31	2.97	536.00	0.05	-97.53
Jumlah Pendapatan	729,285.08	100	985,149.11	100	35.08
BELANJA					
APARATUR DAERAH	341,508.87	40.52	401,586.84	39.59	17.59
Belanja Administrasi Umum	282,056.61	33.46	321,642.01	31.71	14.03
Belanja Pegawai/Personalia	204,272.22	24.24	252,660.53	24.91	23.69
Belanja Barang dan Jasa	44,874.37	5.32	35,406.82	3.49	-21.10
Belanja Perjalanan Dinas	18,724.96	2.22	18,312.92	1.81	-2.20
Belanja Pemeliharaan	14,185.06	1.68	15,261.73	1.50	7.59
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	43,041.57	5.11	66,642.90	6.57	54.83
Belanja Modal	16,410.69	1.95	13,301.94	1.31	-18.94
PELAYANAN PUBLIK	266,087.03	31.57	400,675.61	39.51	50.58
Belanja Administrasi Umum	78,239.34	9.28	90,839.81	8.96	16.11
Belanja Pegawai/Personalia	29,000.09	3.44	32,666.34	3.22	12.64
Belanja Barang dan Jasa	39,577.37	4.70	46,820.45	4.62	18.30
Belanja Perjalanan Dinas	1,672.22	0.20	2,555.93	0.25	52.85
Belanja Pemeliharaan	7,989.67	0.95	8,797.10	0.87	10.11
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	78,220.38	9.28	112,498.63	11.09	43.82
Belanja Modal	109,627.31	13.01	197,337.17	19.46	80.01
Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu.	228,348.60	27.09	202,602.80	19.98	-11.27
Belanja Tidak Tersangka	6,924.57	0.82	9,373.15	0.92	35.36
Jumlah Belanja	842,869.07	100	1,014,238.40	100	20.33
Surplus/(Defisit)	-113,583.99		(29,089.30)		-74.39
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Daerah					
Sisa Lebih Perhit. Angg. Tahun Lalu	151,883.99	100.00	51,089.30	100.00	-66.36
Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-
Hasil Penjn Aset Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah	151,883.99	100	51,089.30	100	-66.36
Pengeluaran Daerah					
Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	38,300.00	100.00	22,000.00	100.00	-42.56
Pembyrn Utang Pokok yg Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhit. Angg. Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Daerah	38,300.00	100	22,000.00	100	-42.56
Jumlah Pembiayaan	113,583.99		29,089.30		-74.39

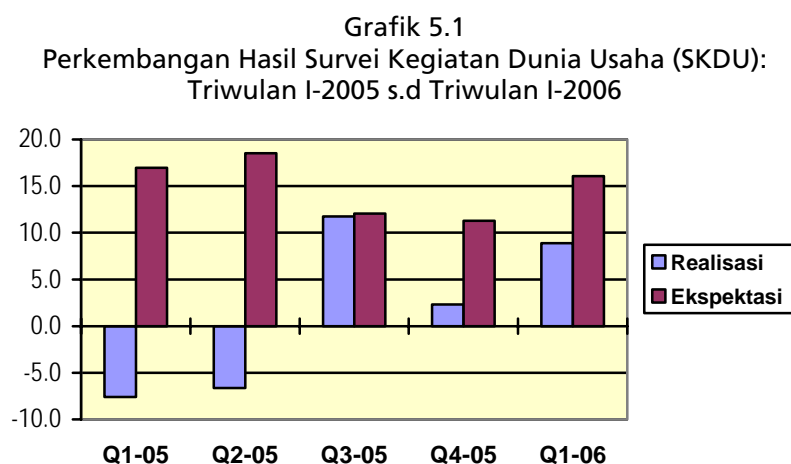
Sumber : Bagian Anggaran Provinsi Sumatera Barat

BAB 5

Prospek Perekonomian

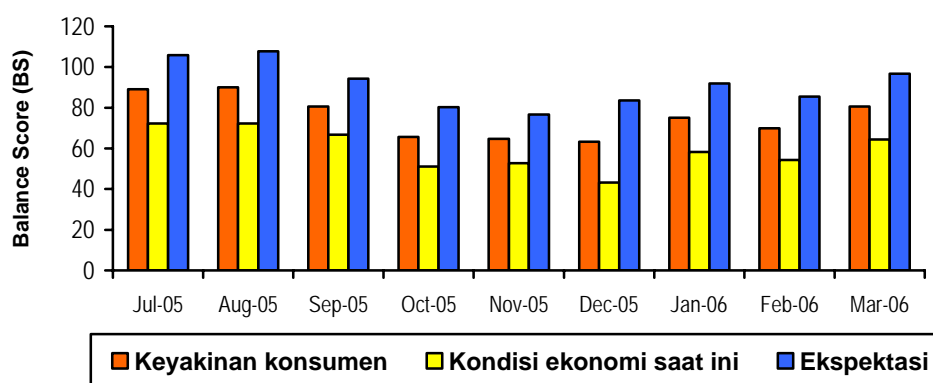
5.1. Prospek Ekonomi

Berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran pada triwulan I-2006 serta kondisi makro ekonomi nasional yang cukup kondusif, kegiatan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II-2006 diprediksikan tetap mengalami pertumbuhan positif. Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang menunjukkan ekspektasi peningkatan kegiatan usaha responden (Grafik 5.1).



Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan diperkirakan terkait dengan peningkatan pengeluaran pemerintah sehubungan dengan telah disahkannya APBD Propinsi Sumatera Barat 2006 pada tanggal 23 Maret 2006 serta APBD kabupaten/kota di Sumatera Barat pada waktu yang hampir bersamaan. Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti tercermin dari hasil survei konsumen, menunjukkan indeks balance score (BS) masih tercatat dibawah 100, berarti konsumen dibayang-bayangi ekspektasi yang pesimis (Grafik 5.2).

Grafik 5.2
Perkembangan Hasil Survei Konsumen: Juli 2005 – Maret 2006

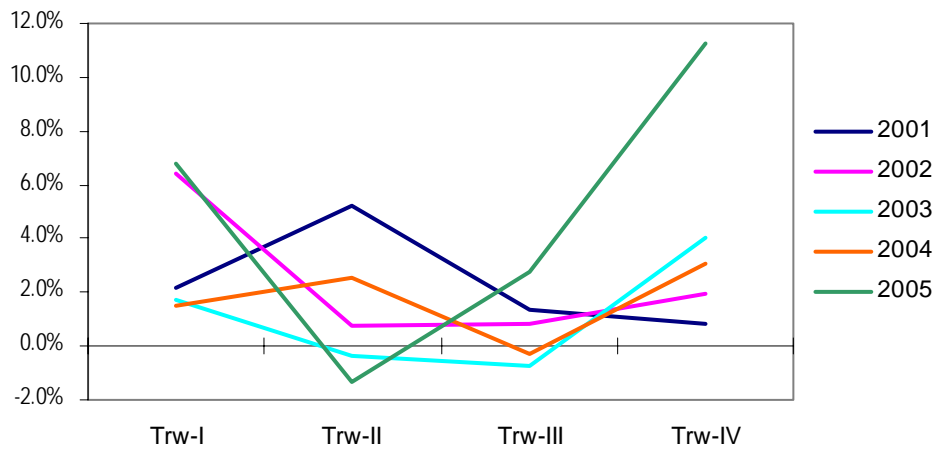


Dari sisi investasi, realisasi investasi diharapkan mulai meningkat setelah pada triwulan I-2006 tumbuh relatif rendah. Proyeksi tersebut berdasarkan kepada upaya-upaya pemerintah daerah untuk menarik investor sekaligus memperbaiki iklim investasi di daerah. Kesuksesan Pemda Sumbar menjadi tuan rumah pertemuan bilateral antara Presiden RI dan PM Malaysia turut memberikan sentimen positif terhadap citra Sumbar di mata investor. Sementara itu dari sisi perdagangan internasional, ekspor Sumbar yang ditopang hasil-hasil perkebunan terutama produk kelapa sawit diperkirakan tetap mengalami peningkatan sejalan dengan permintaan dunia yang cenderung kuat.

5.2. Proyeksi Inflasi

Berdasarkan data historis 2001-2005, tingkat inflasi pada triwulan II rata-rata sekitar 1,36% (q-t-q), lebih rendah dibanding rata-rata inflasi inflasi triwulan I sebesar 3,72% (Grafik 5.3). Namun apabila pola inflasi triwulanan tersebut mengesampingkan kebijakan kenaikan harga BBM pada triwulan II di tahun 2001 maka rata-rata inflasi triwulan II hanya berkisar 0,60%. Bahkan di triwulan II tahun 2003 dan 2005, tingkat harga-harga kota Padang mencatat deflasi. Dengan asumsi kondisi triwulan II-2006 akan mengikuti pola triwulanan seperti lima tahun terakhir yaitu memasuki musim panen padi dan dengan keberhasilan panen yang relatif baik serta tidak ada kebijakan pemerintah di bidang harga yang dapat memicu inflasi, laju inflasi triwulan II-2005 diprediksikan sekitar 1%.

Grafik 5.3 Pola Inflasi IHK triwulanan 2001-2005



Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

TABEL 1.A
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2006

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Tahun 2005 **)				Total Th. 2005	Tahun 2006 ***)
	TRW. I	TRW II	TRW III	TRW. IV		TRW. I
1. PERTANIAN / AGRICULTURE	2,568,737.91	2,575,306.27	2,632,994.95	3,109,680.41	10,886,719.55	3,321,928.51
a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops	1,291,670.67	1,305,149.89	1,330,786.98	1,565,979.38	5,493,586.92	1,676,326.44
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops	591,394.08	603,860.84	625,977.29	754,555.26	2,575,787.46	822,723.86
c. Peternakan/Livestock	232,614.38	228,619.97	219,617.10	249,889.37	930,740.82	266,989.77
d. Kehutanan/Forestry	170,660.76	165,937.73	171,446.53	201,326.80	709,371.82	205,646.98
e. Perikanan/Fishery	282,398.03	271,737.85	285,167.06	337,929.60	1,177,232.53	350,241.45
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/ MINING & QUARRYING	356,362.78	363,443.14	376,786.42	435,264.08	1,531,856.43	453,793.20
a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & Natural Gas	--	--	--	--	--	--
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas	54,783.34	55,469.55	56,174.66	63,294.79	229,722.35	65,866.09
c. Penggalian / Quarrying	301,579.44	307,973.58	320,611.76	371,969.30	1,302,134.08	387,927.11
3. INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRIES	1,248,359.47	1,247,995.14	1,378,858.51	1,540,963.25	5,416,176.37	1,551,952.01
a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing Industries	--	--	--	--	--	--
1. Pengilangan Minyak / Oil Refinery	--	--	--	--	--	--
2. Gas Alam Cair / Liquefied Natural Gas	--	--	--	--	--	--
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing Industries	1,248,359.47	1,247,995.14	1,378,858.51	1,540,963.25	5,416,176.37	1,551,952.01
1. Makan, Minuman dan Tembakau / Food, Drink and Tobacco	329,589.48	322,006.34	350,757.66	392,032.69	1,394,386.17	400,968.63
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	519,509.49	522,668.95	607,865.00	681,582.35	2,331,625.79	637,104.80
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan	52,735.25	53,430.29	56,302.89	62,747.59	225,216.02	65,076.36
4. Kertas dan Barang Cetak	4,087.75	4,141.69	4,349.10	4,791.68	17,370.22	4,982.03
5. Pupuk Kimia dan Barng dari Karet	90,638.72	91,843.96	97,542.48	111,346.58	391,371.74	117,099.33
6. Semen dan Barng Non Logam	221,395.23	222,854.63	230,392.54	253,364.91	928,007.31	290,384.23
7. Logan Dasar, Besi dan Baja	--	--	--	--	--	--
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	29,949.13	30,575.63	31,142.32	34,519.97	126,187.05	35,734.14
9. Barang Lainnya/Other	454.43	473.66	506.51	577.48	2,012.07	602.51
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH / ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY	146,519.16	149,640.02	154,152.79	163,515.20	613,827.17	168,963.80
a. Listrik / Electricity	134,318.00	137,178.97	141,456.10	150,132.44	563,085.51	155,153.48
b. Gas / Gas	--	--	--	--	--	--
c. Air Bersih / Water Supply	12,201.16	12,461.04	12,696.69	13,382.76	50,741.65	13,810.32
5. BANGUNAN / CONSTRUCTION	548,178.55	559,854.76	586,702.21	670,386.05	2,365,121.57	709,672.89
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN / TRADE, HOTEL & RESTAURANT	1,886,725.08	1,912,617.02	1,958,554.13	2,221,321.82	7,979,218.04	2,310,704.56
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & Retail Trade	1,820,092.53	1,845,506.66	1,889,116.31	2,144,177.68	7,698,893.17	2,230,036.25
b. Hotel / Hotels	17,000.84	17,125.15	17,243.26	19,459.84	70,829.09	20,370.15
c. Restoran / Restaurant	49,631.71	49,985.21	52,194.55	57,684.30	209,495.78	60,298.16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI / TRANSPORT & COMMUNICATION	1,249,530.75	1,280,595.87	1,304,611.07	1,714,303.57	5,549,041.27	1,790,210.14
a. Angkutan / Transport	1,021,092.99	1,043,315.82	1,055,279.30	1,411,138.26	4,530,826.37	1,464,806.32
1. Kereta Api/Railway Transport	4,840.35	4,864.07	5,458.92	5,984.43	21,147.77	6,154.90
2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport	646,173.78	659,937.28	676,328.22	930,212.50	2,912,651.77	969,394.35
3. Angkutan Laut / Sea Transport	104,665.29	105,955.27	107,938.73	134,357.36	452,916.65	136,737.76
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan/Inland Water Transport	33,005.21	34,554.67	26,770.07	33,899.21	128,229.16	34,540.13
5. Angkutan Udara / Air Transport	111,448.60	114,468.32	110,262.45	139,738.70	475,918.06	147,255.99
6. Jasa Penunjang Angkutan / Supporting and Auxiliary Transport Activities	120,959.77	123,536.21	128,520.91	166,946.06	539,962.96	170,723.18
b. Komunikasi / Communication	228,437.75	237,280.05	249,331.77	303,165.31	1,018,214.89	325,403.82
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN FINANCE, RENT OF BUILDING & BUSINESS SERVICES	567,038.89	579,116.82	596,699.08	685,776.65	2,428,631.44	716,544.42
a. Bank / Banking	222,769.84	227,514.84	231,472.74	261,009.51	942,766.92	272,659.75
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang / Keuangan/Non Bank Financial Institution and Supporting Activities	121,807.98	124,402.49	128,484.67	150,999.15	525,694.29	156,129.25
c. Sewa Bangunan / Rent of Building	207,939.71	212,368.83	221,539.49	255,986.79	897,834.83	269,156.65
d. Jasa Perusahaan / Business Services	14,521.36	14,830.66	15,202.18	17,781.20	62,335.40	18,598.78
9. JASA-JASA / SERVICES	1,606,667.45	1,640,889.46	1,655,891.31	1,908,442.08	6,811,890.30	2,002,251.43
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public Administration and Defense	1,085,065.86	1,108,177.77	1,110,930.50	1,285,933.23	4,590,107.36	1,354,582.60
b. Swasta / Private Services	521,601.58	532,711.70	544,960.81	622,508.85	2,221,782.94	647,668.83
1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Services	201,867.84	206,167.63	211,024.02	241,691.81	860,751.30	251,920.77
2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural Services	54,498.78	55,659.61	57,390.34	62,631.58	230,180.30	64,993.97
3. Perorangan dan Rumah tangga/ Personal & Household Services	265,234.96	270,884.46	276,546.45	318,185.46	1,130,851.33	330,754.08
PDRB / GRDP	10,178,120.04	10,309,458.50	10,645,250.46	12,449,653.11	43,582,482.12	13,026,020.96

Catatan : **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara

TABEL 1.B
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2005-2006

dalam juta rupiah

Sektor / Sub Sektor	Tahun 2005 **)				Total Th. 2005	Tahun 2006 ***)
	TRW. I	TRW II	TRW III	TRW. IV		TRW. I
1. PERTANIAN / AGRICULTURE	1,777,266.90	1,816,304.51	1,868,434.76	1,919,586.05	7,381,592.22	1,951,130.18
a. Tanaman Pangan & Hortikultura / Farm Food Crops	896,859.98	916,859.95	938,497.85	956,986.26	3,709,204.04	972,967.93
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops	409,976.90	423,013.69	444,079.78	468,148.90	1,745,219.27	479,946.25
c. Peternakan / Livestock	147,688.58	151,853.40	156,044.55	159,539.95	615,126.47	161,262.98
d. Kehutanan / Forestry	127,871.64	128,012.29	129,650.85	130,846.06	516,380.84	130,296.51
e. Perikanan / Fishery	194,869.81	196,565.17	200,161.73	204,064.88	795,661.60	206,656.51
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/ MINING & QUARRYING	233,816.65	237,464.56	242,004.36	245,546.74	958,832.31	249,192.50
a. Migas dan Gas Bumi / Crude Petroleum & Natural Gas	--	--	--	--	--	--
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas	44,734.54	45,092.41	45,010.55	45,144.93	179,982.44	45,524.15
c. Penggalian / Quarrying	189,082.12	192,372.15	196,993.81	200,401.80	778,849.87	203,668.35
3. INDUSTRI PENGOLAHAN / MANUFACTURING INDUSTRIES	915,375.77	928,960.35	952,741.37	975,430.34	3,772,507.82	991,497.36
a. Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing Industries	--	--	--	--	--	--
1. Pengilangan Minyak / Oil Refinery	--	--	--	--	--	--
2. Gas Alam Cair / Liquefied Natural Gas	--	--	--	--	--	--
b. Industri Tanpa Migas / Non Oil & Gas Manufacturing Industries	915,375.77	928,960.35	952,741.37	975,430.34	3,772,507.82	991,497.36
1. Makanan, Minuman dan Tembakau / Food, Drink and Tobacco	246,944.81	253,538.24	260,028.81	266,321.51	1,026,833.37	269,703.79
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	377,577.26	379,163.08	389,438.40	397,694.49	1,543,873.23	405,489.31
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan	39,602.84	39,852.34	40,398.32	40,870.98	160,724.48	41,590.31
4. Kertas dan Barang Cetak	3,107.51	3,138.89	3,182.21	3,218.17	12,646.78	3,244.24
5. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	68,089.59	68,790.92	69,753.99	70,591.04	277,225.53	71,480.48
6. Semen dan Barang Non Logam	158,936.53	163,132.45	168,483.19	174,986.65	665,538.82	178,188.90
7. Logam Dasar, Besi dan Baja	--	--	--	--	--	--
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	20,768.54	20,982.46	21,083.18	21,369.91	84,204.09	21,423.34
9. Barang Lainnya / Other	348.69	361.97	373.27	377.60	1,461.52	376.99
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH / ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY	77,993.44	79,547.02	80,584.00	81,806.38	319,930.84	83,183.10
a. Listrik / Electricity	70,319.82	71,803.57	72,792.94	73,943.83	288,860.16	75,223.06
b. Gas / Gas	--	--	--	--	--	--
c. Air Bersih / Water Supply	7,673.62	7,743.45	7,791.06	7,862.55	31,070.69	7,960.05
5. BANGUNAN / CONSTRUCTION	352,608.56	360,083.86	369,662.09	374,024.11	1,456,378.62	378,512.40
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN / TRADE, HOTEL & RESTAURANT	1,296,608.81	1,310,137.61	1,328,259.24	1,347,514.73	5,282,520.38	1,369,861.93
a. Perdagangan Besar dan Eceran / Wholesale & Retail Trade	1,251,180.06	1,264,192.34	1,281,764.61	1,300,434.82	5,097,571.83	1,322,152.08
b. Hotel / Hotels	11,389.82	11,460.43	11,506.13	11,585.10	45,941.48	11,732.31
c. Restoran / Restaurant	34,038.93	34,484.84	34,988.49	35,494.81	139,007.07	35,977.54
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI / TRANSPORT & COMMUNICATION	894,248.55	905,198.94	917,620.56	936,279.96	3,653,348.01	949,034.61
a. Angkutan / Transport	730,293.31	735,521.66	742,183.76	756,001.10	2,963,999.82	762,706.13
1. Kereta Api / Railway Transport	3,744.80	3,899.83	4,099.50	4,233.56	15,977.69	4,269.97
2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport	485,583.81	491,459.38	495,735.07	507,186.55	1,979,964.82	514,185.73
3. Angkutan Laut / Sea Transport	56,377.27	56,395.94	56,725.59	55,799.93	225,298.73	55,390.81
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan / Inland Water Transport	16,307.19	14,573.73	14,088.43	14,597.02	59,566.37	14,328.44
5. Angkutan Udara / Air Transport	84,908.00	84,194.78	84,548.40	86,805.84	340,457.01	88,489.87
6. Jasa Penunjang Angkutan / Supporting and Auxiliary Transport Activities	83,372.23	84,997.99	86,986.76	87,378.21	342,735.20	86,041.32
b. Komunikasi / Communication	163,955.25	169,677.28	175,436.80	180,278.86	689,348.19	186,328.48
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN FINANCE, RENT OF BUILDING & BUSINESS SERVICES	379,320.75	385,922.77	391,889.81	398,917.48	1,556,050.81	404,395.18
a. Bank / Banking	150,502.00	153,542.14	155,089.08	157,647.74	616,780.97	160,753.40
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang / Keuangan / Non Bank Financial Institution and Supporting Activities	85,835.39	87,672.27	89,088.34	91,441.70	354,037.70	91,898.91
c. Sewa Bangunan / Rent of Building	132,775.65	134,382.23	137,313.46	139,345.32	543,816.67	141,177.18
d. Jasa Perusahaan / Business Services	10,207.72	10,326.12	10,398.92	10,482.71	41,415.48	10,565.69
9. JASA-JASA / SERVICES	1,174,109.28	1,187,512.32	1,204,648.40	1,223,214.25	4,789,484.25	1,248,230.52
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan / Public Administration and Defense	806,863.58	815,819.77	826,914.92	839,070.57	3,288,668.84	859,292.17
b. Swasta / Private Services	367,245.69	371,692.55	377,733.49	384,143.68	1,500,815.41	388,938.35
1. Sosial Kemasyarakatan / Social & Community Services	132,541.27	134,569.15	136,730.18	139,041.18	542,881.77	141,155.81
2. Hiburan dan Rekreasi / Entertainment & Cultural Services	41,026.98	41,199.29	42,405.29	42,705.36	167,336.92	43,145.23
3. Perorangan dan Rumah tangga / Personal & Household Services	193,677.45	195,924.11	198,598.02	202,397.14	790,596.71	204,637.31
PDRB / GRDP	7,101,348.72	7,211,131.93	7,355,844.59	7,502,320.03	29,170,645.26	7,625,037.79

Catatan : **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara

TABEL 2.A
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2006

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Total Tahun 2004	Tahun 2005 **)				Total Tahun 2005 **	Tahun 2006 ***)
		TRW. I	TRW II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	21,423,883.73	5,782,745.60	5,858,588.68	6,028,433.29	7,162,845.99	24,832,613.56	7,462,006.59
A. MAKANAN/ <i>Food</i>	13,356,186.12	3,581,675.59	3,609,596.96	3,709,305.09	4,467,918.86	15,368,496.50	4,634,243.03
B. NON MAKANAN/ <i>Non-Food</i>	8,067,697.61	2,201,070.01	2,248,991.72	2,319,128.19	2,694,927.13	9,464,117.05	2,827,763.56
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ <i>Non-profit Institution</i> Consumption Expenditure	413,639.47	103,932.69	105,219.89	106,504.66	114,880.06	430,537.30	116,818.99
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	4,405,548.48	1,192,204.54	1,206,499.66	1,253,081.70	1,463,193.33	5,114,979.23	1,549,234.69
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ <i>Gross Domestic Fixed capital Formation</i>	6,710,158.23	1,862,742.36	1,884,364.99	1,954,222.52	2,281,107.75	7,982,437.62	2,386,139.54
5. PERUBAHAN STOK/ <i>Change in Stock</i>	182,518.95	79,853.25	61,967.22	105,851.92	150,391.91	398,064.31	161,452.52
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ <i>Export of Goods and Services</i>	5,593,818.97	1,587,095.00	1,623,010.51	1,627,323.34	1,740,634.65	6,578,063.50	1,829,015.85
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ <i>Less Import of Goods and Services</i>	1,568,550.62	430,453.40	430,192.46	430,166.96	463,400.57	1,754,213.39	478,647.22
Jumlah/ Total	37,161,017.21	10,178,120.04	10,309,458.50	10,645,250.46	12,449,653.11	43,582,482.12	13,026,020.96

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara

TABEL 2.A
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2006

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Total Tahun 2004	Tahun 2005 **)				Total Tahun 2005 **	Tahun 2006 ***)
		TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	21,423,883.73	5,782,745.60	5,858,588.68	6,028,433.29	7,162,845.99	24,832,613.56	7,462,006.59
A. MAKANAN/Food	13,356,186.12	3,581,675.59	3,609,596.96	3,709,305.09	4,467,918.86	15,368,496.50	4,634,243.03
B. NON MAKANAN/Non-Food	8,067,697.61	2,201,070.01	2,248,991.72	2,319,128.19	2,694,927.13	9,464,117.05	2,827,763.56
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution Consumption Expenditure	413,639.47	103,932.69	105,219.89	106,504.66	114,880.06	430,537.30	116,818.99
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure	4,405,548.48	1,192,204.54	1,206,499.66	1,253,081.70	1,463,193.33	5,114,979.23	1,549,234.69
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation	6,710,158.23	1,862,742.36	1,884,364.99	1,954,222.52	2,281,107.75	7,982,437.62	2,386,139.54
5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock	182,518.95	79,853.25	61,967.22	105,851.92	150,391.91	398,064.31	161,452.52
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services	5,593,818.97	1,587,095.00	1,623,010.51	1,627,323.34	1,740,634.65	6,578,063.50	1,829,015.85
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services	1,568,550.62	430,453.40	430,192.46	430,166.96	463,400.57	1,754,213.39	478,647.22
Jumlah/ Total	37,161,017.21	10,178,120.04	10,309,458.50	10,645,250.46	12,449,653.11	43,582,482.12	13,026,020.96

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara

Tabel 3
Indeks Harga Konsumen Bulanan Kota Padang (Tahun Dasar 2002)

Akhir Periode	BAHAN MAKANAN	MAKANAN JADI	PERUMAHAN	SANDANG	KESEHATAN	PENDIDIKAN	TRANSPORT	U M U M	
								IHK	Perub.(%)
2004									
Jan	104.46	110.44	114.58	110.52	104.58	112.90	104.30	108.45	0.72%
Feb	104.55	110.38	115.29	109.54	103.07	112.72	104.30	108.47	0.02%
Mar	106.05	111.20	116.47	109.84	102.63	111.83	104.41	109.28	0.75%
Apr	110.47	111.70	117.14	110.38	106.15	111.83	104.41	111.12	1.68%
May	110.38	111.54	117.00	110.62	106.18	111.92	108.49	111.59	0.42%
Jun	111.21	112.00	117.10	111.68	106.50	111.92	108.52	112.04	0.40%
Jul	112.98	113.43	118.06	112.48	106.58	111.92	108.53	113.10	0.95%
Agt	108.70	113.88	118.43	113.00	106.58	112.08	109.05	112.02	-0.95%
Sep	106.76	113.93	118.83	112.84	106.93	115.85	109.05	111.73	-0.26%
Okt	106.96	114.22	118.87	113.84	106.96	116.12	109.05	111.94	0.19%
Nov	109.81	116.17	119.16	116.20	106.96	116.12	109.89	113.52	1.41%
Des	113.05	118.08	120.51	116.90	106.45	116.12	109.92	115.18	1.46%
2005									
Jan	120.94	118.25	121.35	116.51	106.45	116.12	110.42	117.91	2.37%
Feb	120.78	118.20	121.53	116.36	106.53	116.10	110.61	117.90	-0.01%
Mar	127.41	122.95	121.86	117.95	106.53	116.49	124.76	123.01	4.33%
Apr	125.57	125.11	122.08	118.04	106.53	116.49	124.76	122.84	0.14%
May	121.11	124.33	122.01	118.28	108.37	116.48	125.49	121.79	-0.85%
Jun	120.46	125.02	121.95	118.50	108.45	116.48	125.49	121.39	-0.33%
Jul	124.40	125.13	121.98	119.66	108.10	116.63	125.49	122.75	1.12%
Agt	124.83	126.50	122.19	120.76	107.93	116.83	125.55	123.25	0.41%
Sep	127.39	128.28	122.50	122.79	109.45	116.91	126.22	124.73	1.20%
Okt	142.24	133.67	131.95	126.26	110.22	118.81	164.86	138.12	10.74%
Nov	148.26	135.72	132.35	126.80	111.89	126.55	164.90	141.04	2.11%
Des	140.68	135.62	132.57	127.99	111.97	126.55	164.86	138.76	-1.62%
2006									
Jan	136.36	135.76	132.49	129.59	112.60	126.56	164.57	137.50	-0.91%
Feb	136.50	139.49	135.58	129.26	113.68	126.56	165.29	138.90	1.02%
Mar	138.79	142.98	135.60	128.70	118.15	126.69	165.65	140.39	1.07%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat

Tabel 4
IHK Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa
(Tahun Dasar 2002)

Kelompok / Subkelompok	IHK		Perubahan q-t-q
	Des 2005	Mar 2006	
UMUM	138.76	140.39	1.17%
BAHAN MAKANAN	140.68	138.79	-1.34%
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	144.46	171.67	18.84%
Daging dan Hasil-hasilnya	112.40	110.00	-2.14%
Ikan Segar	140.59	120.79	-14.08%
Ikan Diawetkan	127.38	115.56	-9.28%
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	120.28	117.76	-2.10%
Sayur-sayuran	153.95	149.88	-2.64%
Kacang-kacangan	145.95	146.94	0.68%
Buah-buahan	149.42	152.34	1.95%
Bumbu-bumbuan	179.61	140.81	-21.60%
Lemak & Minyak	123.72	123.50	-0.18%
Bahan makanan lainnya	107.46	107.44	-0.02%
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	135.62	142.98	5.43%
Makanan Jadi	146.18	148.92	1.87%
Minuman yang Tidak Beralkohol	136.56	142.15	4.09%
Tembakau & Minuman Beralkohol	116.37	132.87	14.18%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	132.57	135.6	2.29%
Biaya Tempat Tinggal	122.10	128.05	4.87%
Bahan Bakar, Penerangan & Air	166.44	166.44	0.00%
Perlengkapan Rumah Tangga	116.18	115.86	-0.28%
Penyelenggaraan Rumah Tangga	110.69	110.64	-0.05%
SANDANG	127.99	128.7	0.55%
Sandang Laki-laki	113.49	114.36	0.77%
Sandang Wanita	119.48	118.49	-0.83%
Sandang Anak-anak	120.90	121.85	0.79%
Barang Pribadi, Sandang lainnya	156.06	158.51	1.57%
KESEHATAN	111.97	118.15	5.52%
Jasa Kesehatan	121.97	135.93	11.45%
Obat-obatan	111.88	114.53	2.37%
Jasa Perawatan & Jasmani	141.90	141.90	0.00%
Perawatan Jasmani & Kosmetik	105.71	109.99	4.05%
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	126.55	126.69	0.11%
Jasa Pendidikan	140.62	140.62	0.00%
Kursus Pelatihan	105.59	102.93	-2.52%
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	112.81	114.73	1.70%
Rekreasi	103.11	103.11	0.00%
Olahraga	107.49	108.20	0.66%
TRANSPORT, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	164.86	165.65	0.48%
Transportasi	180.28	180.48	0.11%
Komunikasi & Pengiriman	122.28	122.28	0.00%
Sarana & Penunjang Transportasi	137.00	146.57	6.99%
Jasa Keuangan	133.07	139.00	4.46%